agustina bidarti

by Agustina Bidarti

Submission date: 23-Sep-2020 08:50AM (UTC+0700)
Submission ID: 1394446059
File name: Teori_Kependudukan_Agustina_Bidarti.pdf (1.65M)
Word count: 46542
Character count: 310478

Lindan Bestari

TEORI
KEPENDUDUKAN

AGUSTINA BIDARTI

TEORI KEPENDUDUKAN

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana (Pasal 72)

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima rarus juta rupiah).

TEORI KEPENDUDUKAN

AGUSTINA BIDARTI

Lindan Bestari

Teori Kependudukan

Penulis:
Agustina Bidarti

ISBN : 978-623-94601-0-5
Penyunting : Mukodas
Tata Letak : Gozali
Desain Sampul : Andri Novadina
Diterbitkan oleh : Penerbit Lindan Bestari

Alamat Redaksi
Jln. Raya Leuwiliang, Ds. Cibeber II
Kampung Cibeber IV. RT 02/02
Leuwiliang, Bogor. 16640
lindan.bestari@gmail.com
www.lindanbestari.com
0816-263-895

Cetakan Pertama Agustus 2020

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

Kata Pengantar

Ada begitu banyak buku-buku asing yang ditulis mengenai situasi dan kondisi negara-negara di luar Indonesia. Buku-buku tersebut tentunya memakai contoh-contoh dan analisis sesuai dengan kasus di berbagai negara di luar Indonesia. Bagi pengajar maupun mahasiswa di Indonesia tentu saja contoh-contoh maupun analisis-analisis yang dibuat oleh penulis asing sering tidak cocok dalam penerapannya di Indonesia.

Agar teori kependudukan ini berguna, sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia, dan memiliki hubungan yang selaras, maka diperlukan buku-buku pelajaran yang ditulis oleh pengajar sekaligus penulis-penulis di Indonesia. Buku "Teori Kependudukan" ini ditujukan untuk memberi sumbang saran atas pemecahan masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia yang merupakan buku "pengantar" untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa secara umum yang hendak memulai mempelajari Ilmu Kependudukan. Untuk mahasiswa Fakultas Pertanian, pemakaian buku kependudukan ini harus dilengkapi dengan buku-buku teori kependudukan secara umum karena dari segi teori kependudukan tidak dibahas secara mendalam pada buku ini.

Penulis baru mengembangkan dua belas bidang spesialisasi pada buku ini.

Bagian I : Pengertian dan Lingkup Kependudukan
Bagian II : Pertumbuhan Penduduk
Bagian III : Proyeksi Penduduk
Bagian IV : Fertilitas

Bagian V : Mortalitas
Bagian VI : Perkawinan dan Perceraian
Bagian VII : Kebijakan Kependudukan
Bagian VIII : Tantangan Kependudukan
Bagian IX : Perubahan Kependudukan
Bagian X : Angkatan Kerja
Bagian XI : Keluarga Berencana
Bagian XII : Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Buku ini merupakan pengembangan dari modul yang telah penulis gunakan sebagai bahan ajar sejak tahun 2013 sehingga penulis mengganggap buku ini memadai digunakan sebagai bahan perkuliahan dengan perlu ditambahkan bahan-bahan bacaan lain pada daftar pustaka yang disebutkan pada akhir bab dalam buku ini. Selain dapat digunakan sebagai bahan kuliah pada Perguruan Tinggi (atau sederajat), penulis memiliki keyakinan buku ini juga dapat dipakai oleh pejabat-pejabat struktural yang ingin menambah pengetahuan mengenai ilmu kependudukan Indonesia, selain itu buku ini dapat dipakai untuk menambah referensi dalam pelaksanaan tugas pengembagan keilmuan.

Secara konsep buku ini sudah tertuang dalam modul perkuliahan yang digunakan sejak tahun 2013 dan penulis baru dapat mengembangkan serta merampungkan tulisan ini menjadi buku selama bekerja dari rumah (*work from home*) di masa pandemi covid 19 merebak di Indonesia pada kisaran bulan Februari sampai dengan juli 2020. Kepada Dekan Fakultas Pertanian dan seluruh staf dosen di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Sriwijaya, penulis ucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya karena diberikan kesempatan untuk mengampu mata kuliah kependudukan.

Dalam setiap tahap permulaan penyusunan konsep penulis mendapat dorongan besar dari tim penerbit Lindan Bestari khususnya kepada Pak Mukodas dan Ibu Miranti, terima kasih atas *sharing* ilmu dan waktu yang diberikan dalam pembimbingan penulisan buku ini dan stimulasi ilmiah yang sangat berharga telah penulis dapatkan dari teman-teman sejawat dari berbagai universitas di Indonesia yang telah tergabung dalam grup Pendampingan Penulisan Buku Ajar.

Saran dari berbagai ahli telah diterima oleh penulis dalam berbagai tahap penyusunan buku ini, sehingga tanggungjawab atas segala kesalahan dan kekurangan buku ini adalah pada diri penulis. Penulis sangat mengharapkan buku ini dapat mencapai sasaran. Demi kesempurnaan dalam penerbitan selanjutnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca pemakai buku ini. Akhirul kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak. Salam.

Palembang, 15 Agustus 2020

Dr. Agustina Bidarti, SP., M.Si.

Daftar Isi

Kata Pengantar v

Daftar isi viii

Bab I Pendahuluan

Pengertian dan Lingkup Kependudukan 1

Konsep Dasar Kependudukan 5

Masalah Kependudukan 10

Hukum Kependudukan 13

Teori-Teori Kependudukan 17

Teori Kependudukan Kontemporer 22

Tugas 27

Bab II Komposisi Penduduk

Pendahuluan 28

Pertumbuhan Penduduk 31

Perubahan Penduduk 33

Komposisi Penduduk 39

Ukuran-Ukuran dalam Komposisi Penduduk 42

Piramida Penduduk 45

Distribusi Penduduk 48

Pembangunan Kependudukan 52

Tugas 56

Bab III Proyeksi Penduduk

Pendahuluan 57
Pengertian Proyeksi Penduduk 58
Metode Perhitungan Proyeksi Penduduk 60
Angka Harapan Hidup dan Proyeksi Penduduk 63
Proyeksi dan Pertumbuhan Penduduk 67
Tugas 71

Bab IV Fertilitas

Pendahuluan 72
Konsep Fertilitas 73
Faktor-Faktor Fertilitas 77
Hubungan langsung dan Tidak Langsung dalam Fertilitas 81
Pengukuran Fertilitas Tahunan 84
Dampak Fertilitas terhadap Ekonomi 88
Tugas 91

Bab V Mortalitas

Pendahuluan 92
Konsep Mortalitas 94
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mortalitas 96
Indikator Mortalitas 100

Sumber Data Mortalias 103
Mortalitas dan Teori Kelangsungan Hidup 105
Kesehatan dan Mortalitas 107
Tugas 112
Bab VI Perkawinan dan Perceraian
Pendahuluan 113
Pengertian Perkawinan dan Perceraian 114
Ukuran-Ukuran Perkawinan 115
Ukuran-Ukuran Perceraian 121
Sumber Data Perkawinan dan Perceraian 123
Tren, Perbedaan dan Pola Perkawinan di Indonesia . 125
Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia 127
Tugas 130
Bab VII Kebijakan Kependudukan
Pendahuluan 131
Konsep Kebijakan dan Kependudukan 132
Ruang Lingkup Kependudukan 134
Perkembangan Kebijakan Kependudukan di Indonesia 136
Tantangan Masa Depan Kebijakan Penduduk Indonesia 138
Status Kebijakan Kependudukan 141

Usaha Pemecahan Masalah Kepadatan Penduduk 144
Tugas 146
Bab VIII Tantangan Kependudukan
Pendahuluan 147
Masalah Kependudukan di Indonesia 149
Penduduk dan Masalah Pembangunan 155
Tantangan Masa Depan Kependudukan di Indonesia. 159
Tugas 161
Bab IX Perubahan Kependudukan
Pendahuluan 162
Perubahan Penduduk yang Pesat 163
Perubahan Penduduk dan Migrasi 167
Perubahan Penduduk dan Imigrasi 171
Tugas 183
Bab X Angkatan Kerja
Pendahuluan 184
Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan 186
Ukuran Dasar Ketenagakerjaan 188
Sumber-Sumber Data Ketenagakerjaan 190
Komposisi Penduduk yang Bekerja 193
Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 196
Tugas 201

Bab XI Keluarga Berencana

Pendahuluan 202
Pengertian Keluarga Berencana 203
Tujuan Program Keluarga Berencana 205
Penilaian dan Ukuran-Ukuran Pelaksanaan Program Keluarga Berencana 207
Metode Langsung Estimasi Ukuran KB 212
Metode Tidak Langsung Estimasi Ukuran KB 216
Pola, Perbedaan, dan Determinan KB 217
Faktor-Faktor Berpengaruh pada KB 220
Tugas 222

Bab XII Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Pendahuluan 223
Keterkaitan Masalah Kepadatan Penduduk dan Lingkungan Hidup 226
Hubungan Antara Kependudukan dengan Lingungan Hidup 230
Penanggulangan Masalah-Masalah Kependudukan ... 240
Tugas 244
Daftar Pustaka 245
Biodata Penulis 253

BAB I
PENDAHULUAN

Pengertian dan Lingkup Kependudukan

Menurut Undang Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Transfer penduduk adalah istilah untuk negara yang mewajibkan perpindahan sekelompok penduduk dari kawasan tertentu, terutama dengan alasan etnisitas atau agama. Kebijakan transmigrasi oleh pemerintah Indonesia selama orde baru bisa dikategorikan transfer penduduk.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang

membutuhkan data yang lebih rinci. Kelahiran dan perpindahan penduduk di suatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan, sedangkan kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Pertumbuhan penduduk memengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu pemanfaatan sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk merupakan sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan, serta pemanfaatan. Dalam hubungan ini, adanya pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi memperberat tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mempersempit usaha-usaha menciptakan keserasian sosial.

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, di mana angka kelahiran lebih besar dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang kongkret dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi dibandingkan dengan, misalnya di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra.

Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan-tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial, karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah tersebut bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, baik di negara maju maupun negara Indonesia yang sedang berkembang ini. Masalah kependudukan terjadi karena perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Macam-macam masalah kependudukan, yaitu: pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan tingkat pendidikan.

Dari ketiga masalah kependudukan tersebut, pertumbuhan penduduk merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi

menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertumbuhan penduduk di negara Indonesia ini sudah sangat pesat karena dilihat dari sensus penduduk yang berdasarkan informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk di negara Indonesia pada tahun 2000 sebanyak 200.241.999 jiwa sedangkan pada tahun 2010 sudah mencapai 237.641.326 jiwa. Perkembangan penduduk yang pesat itu terjadi karena beberapa faktor, yaitu tingkat angka kelahiran, tingkat angka kematian, dan tingkat perpindahan-perpindahan penduduk (migrasi).

Konsep Dasar Kependudukan

Ilmu yang berkutat pada permasalahan kependudukan kerap disebut dengan demografi. Demografi berasal dari bahasa latin “*demos*” yang berarti penduduk, dan “*grafein*” yang berarti menulis. Sehingga secara harfiah demografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang kependudukan. Sebagai ilmu, demografi mempelajari tentang natalitas atau fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian) dan migrasi (perpindahan penduduk). Penduduk sendiri merupakan sekumpulan manusia yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu, dengan berbagai kondisi mereka dan kian berkembang.

Manusia sebagai insan individu dan sosial berkarakter dinamis. Peningkatan pelayanan publik selayaknya bertumpu pada kondisi kehidupan individu dan masyarakat. Sebagaimana prinsip pertama pembangunan berkelanjutan: "Manusia (penduduk) merupakan pusat perhatian pembangunan berkelanjutan, dan dikehendaki agar memiliki kehidupan yang sehat dan produktif dalam keserasian dengan alam. Salah satu cara untuk mencapai sasaran itu adalah melalui kebijakan kependudukan".

Di Indonesia sendiri karakteristik yang menonjol dari masalah kependudukan adalah: (1) jumlah penduduk yang besar; (2) pertambahan penduduk yang tinggi; (3) persebaran yang tidak merata; (4) komposisi penduduk yang muda.

Permasalahan yang muncul pada konsep pembangunan berkelanjutan akibat permasalahan kependudukan tersebut antara lain: (1) hasil pembangunan habis termakan penduduk yang besar; (2) pembangunan tidak maksimal karena persebaran yang tidak merata dengan penduduk yang rendah; (3) penyediaan lapangan kerja & penduduk yang besar.

Kebijaksanaan kependudukan di Indonesia dilaksanakan dalam beberapa kebijakan seperti pengendalian pertumbuhan penduduk, penurunan tingkat kelahiran, penurunan tingkat kematian, dan peningkatan mutu penduduk, serta persebaran dan mobilitas penduduk.

Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dikemukakan bahwa kebijaksanaan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka

mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Sehubungan dengan itu perlu menyebarkan penduduk, di samping pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan kerja. Jelaslah bahwa salah satu unsur pokok kebijaksanaan kependudukan sebagai upaya pengembangan sumber daya adalah upaya pengendalian pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu pengendalian pertumbuhan penduduk akan ditingkatkan dan diintensifkan dalam Repelita V. Pengendalian pertumbuhan penduduk terutama akan dilaksanakan melalui penurunan tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian.

Penurunan tingkat kelahiran terutama akan diusahakan secara langsung melalui pemantapan pelaksanaan program keluarga berencana yang diarahkan pada keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dan potensi yang ada. Kebijaksanaan penurunan tingkat kelahiran perlu pula dibarengi dengan kebijaksanaan yang diarahkan kepada usaha meningkatkan umur persalinan pertama dan dengan upaya meningkatkan kesadaran penduduk akan kegunaan dan keuntungan mempunyai anak sedikit. Kebijaksanaan ini selanjutnya akan mendorong pelembagaan Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) akan mempercepat penurunan tingkat kelahiran. Sesuai dengan amanat GBHN usaha langsung untuk menurunkan tingkat kelahiran adalah melalui kebijaksanaan pelaksanaan keluarga berencana. Dengan makin banyaknya peserta keluarga berencana, maka akan dapat diusahakan secara lebih efektif penurunan tingkat kematian dan peningkatan peranan wanita

dalam pembangunan yang akhirnya akan menurunkan tingkat kelahiran.

Penurunan tingkat kematian dalam Repelita V secara nasional tingkat kematian diharapkan dapat diturunkan dari 58 per 1.000 kelahiran pada akhir Repelita IV menjadi sekitar 50 per 1.000 kelahiran pada akhir Repelita V. Sasaran penurunan tingkat kematian bayi ini akan dibarengi dengan penurunan tingkat kematian kasar dari 7,9 per 1.000 penduduk pada tahun 1993. Sementara itu, angka harapan hidup pada waktu lahir diharapkan meningkat dari 63 tahun pada tahun 1988 menjadi sekitar 65 tahun pada tahun 1993. Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran di atas, dalam Repelita V dilaksanakan usaha-usaha peningkatan pelayanan. Hal tersebut dilakukan dengan mengusahakan agar pelayanan kesehatan tidak saja dekat, tetapi juga terjangkau rakyat banyak. Dalam hubungan ini maka jumlah Puskesmas dan fungsinya terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Sementara itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada rakyat dilakukan juga Pelayanan Terpadu yang memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak seperti dalam mengatasi masalah-masalah gizi, diare, imunisasi, dan keluarga berencana. Di samping itu untuk meningkatkan produktivitas kerja, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai sasaran pembangunan kependudukan, dilakukan pula upaya peningkatan kesehatan kerja.

Peningkatan mutu penduduk dalam bentuk peningkatan status gizi berperan penting dalam pencapaian sasaran-sasaran kependudukan. Kebijaksanaan di bidang pangan dan gizi

secara umum ditujukan bagi peningkatan upaya penyediaan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan gizi penduduk yang semakin bermutu secara merata. Selain di bidang gizi, bidang pendidikan juga berperan penting dalam usaha mencapai sasaran-sasaran kependudukan terutama melalui perubahan sikap dan perilaku terhadap suatu tatanan kehidupan yang baru. Kesadaran dan kemampuan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan cara hidup sehat, pengendalian kelahiran, peningkatannya melalui pendidikan. Sejalan dengan ini maka usaha-usaha di bidang pendidikan terus dilaksanakan.

Persebaran dan mobilitas penduduk. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan akan sangat membantu di dalam pemecahan masalah persebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih seimbang. Ketimpangan persebaran penduduk mengakibatkan bahwa di daerah padat penduduk sumber daya alam menderita tekanan eksploitasi berlebihan, sedang di daerah jarang penduduk sumber daya alam tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu kebijaksanaan persebaran penduduk dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah tertuju pada tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam yang tersedia. Dalam rangka memperbaiki pola persebaran penduduk dan angkatan kerja, maka perlu diupayakan pembagian lapangan kerja antardaerah yang seimbang. kegiatan yang dilakukan adalah melalui program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang dimaksudkan untuk mempertemukan permintaan dengan penawaran tenaga kerja.

Dengan demikian diharapkan penyebaran tenaga kerja akan dapat terlaksana dengan lebih lancar.

Masalah Kependudukan

Pada dasarnya masalah kependudukan merupakan suatu sumber masalah sosial yang penting, oleh karena pertambahan penduduk dapat menghambat penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama jika pertambahan tersebut tidak dapat terkontrol secara efektif. Masalah sosial sebagai akibat pertambahan penduduk tidak hanya dirasakan oleh masyarakat-masyarakat pada daerah tertentu, melainkan dirasakan pula oleh masyarakat secara menyeluruh dalam suatu negara. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Di Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam rangka pengaturan pertambahan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Kecuali itu juga dilakukan program Transmigrasi, yang dimaksudkan sebagai usaha pemerataan atau keserasian jumlah penduduk di seluruh wilayah tertentu.

Ledakan penduduk, pertambahan jumlah penduduk disebabkan oleh jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar daripada jumlah kematian (mortalitas). Di Indonesia sekarang laju kelahiran 49 dan jumlah ini menunjukkan laju kelahiran yang tinggi. Laju kelahiran yang sedang antara 20-30, sedangkan laju kelahiran rendah di bawah 20.

Pertambahan penduduk yang pesat juga disebabkan oleh penurunan angka kematian. Di dunia Barat kematian bayi telah turun sampai 0,5% dan bagi dokter hal ini merupakan tantangan. Malthus sendiri sudah membayangkan bahwa penurunan angka kematian akan memunculkan gejala kelebihan penduduk yang serius. Menurut perhitungan, jika dalam waktu yang relatif singkat di dunia kita nantinya akan terjadi sistem pembatasan kelahiran yang optimal, maka kesimpulannya, "masih dibutuhkan 40 tahun lebih untuk menghentikan pertumbuhan penduduk". Ini disebabkan dengan adanya program KB yang intensif saja penduduk dunia masih akan mampu bertambah dua kali lipat, sehingga dalam tahun 2020 jumlah umat manusia di planet kita mencapai 7 milyar jiwa.

Penduduk di Indonesia menghadapi masalah dalam 4 aspek yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah penduduk di Indonesia besar, yaitu merupakan urutan kelima di dunia.
2. Tingkat pertambahan cepat. Menurut sensus penduduk tahun 1980, tingkat pertambahan penduduk Indonesia setahun 2,32%. Ini berarti sebagian besar penduduk terdiri atas anak-anak yang masih memerlukan berbagai kebutuhan.
3. Penyebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Sekitar 65% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa, sedangkan penduduk-penduduk luar Jawa seluruhnya hanya 35%.
4. Pertumbuhan penduduk dan hubungannya dengan pendidikan serta lapangan kerja.

Teori transisi kependudukan memiliki beberapa tahap. Tahap peralihan keadaan demografis, yakni sebagai berikut.

1. Tingkat kelahiran dan kematian tinggi. Penduduk tetap atau naik sedikit. anggaran kesehatan meningkat. Penemuan obat-obatan semakin maju. Angka kelahiran tetap tinggi.
2. Angka kematian menurun, tingkat kelahiran masih tinggi dan pertumbuhan penduduk meningkat. Adanya Urbanisasi, usia kawin meningkat, pelayanan KB semakin luas, pendidikan meningkat.
3. Angka kematian terus menurun, angka kelahiran menurun, laju pertumbuhan penduduk menurun.
4. Kelahiran dan kematian pada tingkat rendah pertumbuhan penduduk kembali seperti kategori I - mendekati nol. Keempat kategori ini akan dialami oleh negara yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi.

Penerapan transisi kependudukan yang mencerminkan kenaikan taraf hidup rakyat di suatu negara adalah besarnya tabungan dan akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan yang sangat cepat di banyak negara berkembang tampaknya disebabkan oleh fase atau tahap transisi demografi yang dialaminya. Ini terjadi pada fase kedua dan ketiga dalam proses kependudukan. Umumnya ada empat tahap dalam proses transisi, yaitu sebagai berikut.

Tahap 1, masyarakat praindustri. Di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian tinggi menghasilkan laju pertambahan penduduk rendah;

Tahap 2, tahap pembangunan awal. Di mana kemajuan

dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik.

Tahap 3, tahap pembangunan lanjut. Di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumah tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai menurun.

Tahap 4, kemantapan dan stabil. Di mana pasangan-pasangan berumah tangga melaksanakan pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah. Banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja hingga angka pertambahan neto penduduk sangat rendah atau bahkan mendekati nol.

Hukum Kependudukan

Dalam upaya pengelolaan masalah kependudukan telah dilakukan berbagai pendekatan. Namun, kesadaran yang menghubungkan hukum dengan masalah kependudukan (*law and population*) baru berkembang pada tahun 1960-an. Beberapa persetujuan yang turut andil dalam perkembangan keduanya yakni sebagai berikut.

1. Deklarasi tentang kependudukan (*declaration on population*) yang ditandatangani 30 negara 1966 & 1967 (termasuk Indonesia).
2. Konferensi Internasional PBB tentang HAM (*UN International Conference on Human Rights*) di Teheran, 1968.

3. Deklarasi PBB tentang Kemajuan & Perkembangan Sosial (*UN Declaration on Social Progress & Development*), 1969.
4. Konverensi Kependudukan Sedunia (*World Population Conference*) di Bukares, 1974.

Pengakuan bahwa Keluarga Berencana adalah merupakan HAM menimbulkan kewajiban bagi negara agar peraturan hukum yang bertentangan diubah & diganti. Hal ini yang menjadi dasar pendekatan hukum dalam program kependudukan yang menghasilkan perkembangan antara lain sebagai berikut.

1. Kelompok peraturan yang berhubungan langsung dengan kependudukan, yaitu tentang kontrasepsi, aborsi dsb.
2. Kelompok peraturan yang berhubungan tidak langsung dengan kependudukan & menyangkut faktor sosial, yaitu tentang perkawinan, penduduk, hak anak, waris kedudukan wanita dsb.
3. Kelompok peraturan yang berhubungan tidak langsung dengan kependudukan & menyangkut faktor ekonomi, yaitu tentang: tunjangan anak, cuti hamil, pajak, bantuan bersalin, jaminan sosial dll.

Dari hasil kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua peraturan ditujukan pada motif memengaruhi fertilitas rendah atau mengarah pada perilaku reproduksi sehat. Namun, turut mengarah pada kesehatan individu guna mengurangi angka kematian walaupun belum begitu pesat berkembang.

Fungsi hukum dalam hal ini sebagai *social control*, hukum bertugas sebagai sarana mempertahankan pola kehidupan yang melembaga atau menjaga tertib yang ada. Di sini hukum mengendalikan warga agar bertindak sebagaimana hukum menghendaki/mengatur dan mempertahankan pola perilaku yang dikehendaki. Sebagai *social engineering*, hukum bertugas sebagai sarana guna menciptakan perubahan dalam masyarakat. Di sini hukum sebagai pencipta perubah nilai-nilai sosial yang tidak mendukung kebijakan kependudukan ke arah nilai-nilai baru yang dianggap lebih baik

Dua macam kebijakan kependudukan yang paling terkenal yakni kebijakan penduduk kualitatif dan kuantitatif. Kebijakan kependudukan kuantitatif dapat dibagi dua yaitu prenatalis dan antinatalis. Kedua kebijakan ini mengatur jumlah penduduk yang bekerja melalui fertilitas. Masih ada kebijakan kuantitatif yang berkaitan dengan mortalitas. Ada beberapa jalan yang dapat ditempuh untuk mengatur kebijakan kualitatif dan kuantitatif penduduk: mengizinkan/tidak mengizinkan alat kontrasepsi dan alat pengguguran, modifikasi pendapat dan sikap terhadap reproduksi, memperbaiki kondisi yang memengaruhi kesehatan, menghalangi migrasi.

Terdapat pembagian kebijakan kependudukan, yakni sebagai berikut.

1. Hukum yang sebagian atau seluruhnya ditentukan penduduk. Ini meliputi peraturan-peraturan yang dibuat untuk menanggulangi problem yang terjadi karena tindak laju dan ciri demografi. Sebab ini dapat memengaruhi

peraturan-peraturan dalam hubungannya dengan perlindungan orang-orang tua, hak-hak istimewa orang-orang asing dan kelompok minoritas lainnya.

2. Hukum yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap penduduk. Ini meliputi peraturan-peraturan mengenai perkawinan dan keluarga, peraturan tentang susunan ekonomi dan masyarakat. Secara tidak langsung kebijakan pemerintah adalah membuat umur minimum pada waktu menikah, bantuan ekonomi bagi keluarga, berkewajiban si bapak untuk memberi tunjangan pada keluarganya, pemberian warisan, dll.
3. Hukum yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penduduk. Ini meliputi peraturan yang dibuat untuk mengurangi mortalitas dan melindungi keselamatan masyarakat, dan peraturan untuk pengawasan natalitas. Peraturan pertama yakni meliputi bidang sanitasi, pengobatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular. Peraturan kedua yakni meliputi praktik-praktik kontrasepsi dan pengguguran demi mengendalikan angka natalitas. Peraturan ini mencakup kewajiban menikah, memberikan kebebasan kepada militer dan memberikan hak istimewa kepada ayah dan keluarga besar.

Kebijakan kependudukan terdiri atas tipe yang dibentuk langsung maupun tidak langsung, eksplisit maupun implisit, domestik maupun internasional, dan kebijakan intervensi maupun nonintervensi. Kebijakan langsung akan memengaruhi variabel kependudukan secara langsung. Kebijakan eksplisit dibedakan dengan kebijkaan implisit dalam hal bahwa kebijakan eksplisit dirumuskan dan

dinyatakan secara jelas maksud pemerintah untuk memengaruhi variabel kependudukan.

Kebijakan domestik berhubungan erat dengan usaha memengaruhi segala peristiwa kependudukan negeri sendiri, sedangkan kebijakan internasional merupakan sikap resmi yang dianut oleh suatu negeri dalam usahanya untuk memengaruhi perkembangan penduduk dunia secara keseluruhan atau wilayah negara tertentu. Berbeda dengan kebijakan nonintervensi, kebijakan interversi merupakan tindakan mengombinasikan berbagai cara untuk memengaruhi baik variabel demografi maupun faktor ekonomi, sosial, politik dan teknologi.

Teori-Teori Kependudukan

Aliran Malthusian

Thomas Robert Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "*Essay on Population*", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangakn pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus.

Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit, dan kematian.

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain *preventive checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), *possitive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan).

Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu sebagai berikut.

a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi.
b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur).

Menurut aliran ini pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama dengan *preventif checks* (pengekangan diri), yang terdiri dari, (a) *moral restraint* (pengekangan diri); (b) mengekang nafsu seks; (c) tunda kawin; (d) *vice* atau kejahatan (pengurangan kelahiran); (e) pengguguran kandungan; (f) homoseksual. Cara kedua, *positive checks* (lewat proses kelahiran), yang terdiri dari, (a) Vice atau kejadian (pencabutan nyawa) terdiri dari bunuh anak-anak, bunuh orang cacat dan bunuh orang tua; (b) *misery* (kemelaratan) dengan cara epidemi, bencana alam, peperangan dan kekurangan makanan.

Meskipun demikian teori tersebut mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut ini.

a. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makanan dapat berjalan.
b. Kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian.
c. Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah.
d. Fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan.

Aliran Marxist

Karl Marx dan Frederick Hegel sebagai pelopor aliran ini tidak sependapat dengan Malthus, (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan. Menurut *Marxist* tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). *Marxist* juga

berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Kanada, dll. Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonomi sosialis seperti Rusia, negara-negara di Eropa Timur, China, Korea Utara, dan Vietnam.

Dasar pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada "*Natural Resource*" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk.

Berikut ini adalah beberapa pendapat aliran Marxis.

a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi memengaruhi kesempatan kerja.
b. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh.
c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral *restraint* untuk menekan angka kelahiran.

Aliran Neo-Malthusian

Pada abad 20 teori Malthus mulai diperdebatkan kembali. kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara "*Preventif Check*" yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Tahun 1960-an dan 1970-an foto-foto telah diambil dari ruang angkasa dengan menunjukkan bumi terlihat seperti sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar dan bahan makanan yang terbatas. Pada suatu saat kapal ini akan kehabisan bahan bakar dan bahan makanan tersebut sehingga akhirnya malapetaka menimpa kapal tersebut.

Tahun 1871 Ehrlich menulis buku "*The Population Bomb*" dan kemudian direvisi menjadi "*The Population Explotion*" yang berisi:

a. sudah terlalu banyak manusia di bumi ini;
b. keadaan bahan makanan sangat terbatas;
c. lingkungan rusak sebab populasi manusia meningkat.

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow, melalui buku "*The Limit to Growth*" ia menarik hubungan antara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, melapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya.

Teori Kependudukan Kontemporer

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Jadi taraf hidup (*standard of living*) merupakan determinan fertilitas.

Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat eropa.

Arsene Dumont seorang ahli demografi bangsa Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Pada tahun 1980 dia menulis sebuah artikel berjudul "*Depopulation et Civilization*". Ia melancarkan teori penduduk baru yang disebut dengan teori kapilaritas sosial (*theory of social capilarity*). Kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, misalnya seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan sosial ekonomi yang tinggi melebihi apa yang dia sendiri telah capai. Untuk dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, keluarga yang besar merupakan beban yang berat dan perintang. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler. Teori kapilaritas sosial dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, di mana tiap-tiap individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Di negara Perancis pada abad ke-19 misalnya, di mana sistem demokrasi sangat baik, tiap-tiap orang berlomba mencapai kedudukan yang tinggi dan sebagai akibatnya angka kelahiran turun dengan cepat. Di negara sosialis di mana tidak ada kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat, sistem kapilaritas sosial tidak dapat berjalan dengan baik.

Emile Durkheim adalah seorang ahli sosiologis Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19. Apabila Dumont menekankan perhatiannya pada faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk, maka Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya

pertumbuhan penduduk yang tinggi (Weeks, 1992). Ia mengatakan, akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbul persaingan di antara penduduk untuk dapat mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan, dan mengambil spesialisasi tertentu, keadaan seperti ini jelas terlihat pada kehidupan masyarakat perkotaan dengan kehidupan yang kompleks. Apabila dibandingkan antara kehidupan masyarakat tradisional dan masyarakat perkotaan, akan terlihat bahwa pada masyarakat tradisional tidak terjadi persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tetapi pada masyarakat industri akan terjadi sebaliknya. Hal ini disebabkan ada masyarakat industri tingkat pertumbuhan dan kepadatan penduduknya tinggi.

Michael Thomas Sadler dan Doubleday. Kedua ahli ini adalah penganut teori fisiologis. Sadler mengemukakan, bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara. Jika kepadatan penduduk tinggi, daya reproduksi manusia akan menurun, sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia akan meningkat. Seorang ahli, Thomson meragukan kebenaran teori ini setelah melihat keadaan di Jawa, India, dan Cina di mana penduduknya sangat padat, tetapi pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Dalam hal ini Malthus lebih konkret argumentasinya daripada Sadler. Malthus mengatakan bahwa penduduk di suatu daerah dapat mempunyai tingkat fertilitas yang tinggi, tetapi dalam pertumbuhan alaminya rendah karena tingginya tingkat kematian. Namun demikian, penduduk tidak dapat

mempunyai fertilitas tinggi, apabila tidak mempunyai kesuburan (*fecunditas*) yang tinggi, tetapi penduduk dengan tingkat kesuburan tinggi dapat juga tingkat fertilitasnya rendah. Teori Doubleday hampir sama dengan teori Sadler, hanya titik tolaknya berbeda.

Kalau Sadler mengatakan bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan tingkat kepadatan penduduk, maka Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi kenaikan kemakmuran menyebabkan turunnya daya reproduksi manusia. Jika suatu jenis makhluk diancam bahaya, mereka akan mempertahankan diri dengan segala daya yang mereka miliki. Mereka akan mengimbanginya dengan daya reproduksi yang lebih besar.

Kekurangan bahan makanan akan merupakan perangsang bagi daya reproduksi manusia, sedang kelebihan pangan justru merupakan faktor pengekang perkembangan penduduk. Dalam golongan masyarakat yang berpendapatan rendah, sering kali terdiri dari penduduk dengan keluarga besar, sebaliknya orang yang mempunyai kedudukan yang lebih baik biasanya jumlah keluarganya kecil. Rupa-rupanya teori fisiologis ini banyak diilhami dari teori aksi dan reaksi dalam meninjau perkembangan penduduk suatu negara atau wilayah. Teori ini dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat mortalitas penduduk semakin tinggi pula tingkat produksi manusia.

Pandangan yang suram dan pesimis dari Malthus beserta penganut-penganutnya ditentang keras oleh kelompok teknologi. Mereka beranggapan manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu melipatgandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali (*recycling*) barang-barang yang sudah habis dipakai, sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Ahli futurology Herman Kahn mengatakan bahwa negara-negara kaya akan membantu negara-negara miskin, dan akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada orang-orang miskin. Dalam beberapa dekade tidak akan terjadi lagi perbedaan yang mencolok antara umat manusia di dunia ini. Dengan tingkat teknologi yang ada sekarang ini mereka memperkirakan bahwa dunia ini mampu menampung 15 milliun orang dengan pendapatan melebihi Amerika Serikat dewasa ini.

Dunia tidak akan kehabisan sumber daya alam, karena seluruh bumi ini terdiri dari mineral-mineral. Proses pengertian dan *recycling* akan terus terjadi dan era ini disebut dengan era substitusi. Mereka mengkritik bahwa *The Limit to Growth* bukan memecahkan masalah tetapi memperbesar permasalahan tersebut. Kelompok Malthus dan kelompok teknologi mendapat kritik dari kelompok ekonomi, karena kedua-duanya tidak memperhatikan masalah-masalah organisasi sosial di mana distribusi pendapatan tidak merata. Orang-orang miskin yang kelaparan, karena tidak meratanya distribusi pendapatan di negara-negara tersebut. Kejadian seperti ini di Brasil, di mana Pendapatan Nasional (GNP) tidak dinikmati oleh rakyat banyak adalah salah satu contoh dari ketimpangan organisasi sosial tersebut.

Tugas 1: Buat Paper Tokoh-Tokoh Teori Kependudukan

Untuk lebih mendalami teori kependudukan lebih lanjut, mahasiswa diminta untuk membuat paper tokoh-tokoh teori kependudukan. Silakan anda membuat paper dengan acuan, tulisan tersebut terdapat riwayat masa kecil, pendidikan, teorinya, dan pemakaian serta penerapan oleh negara-negara di dunia. Boleh dilengkapi dengan foto-foto. Diskusikanlah dengan rekan-rekan Anda di dalam kelas.

Tugas 2: Menginventaris Masalah-Masalah Kependudukan di Sekitar Kita dan Cara Mengatasinya

1. Amatilah keadaan di sekitar Saudara dan lakukan inventaris masalah-masalah kependudukan yang ada. Tulislah masalah-masalah tersebut di kertas kerja.
2. Buatlah faktor-faktor penyebabnya.
3. Diskusikanlah dengan rekan-rekan Saudara di kelas bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.
   a. Cara mengatasi secara teoretis.
   b. Cara mengatasi secara opini pribadi.
4. Buatlah laporan hasil diskusi tersebut.

BAB II
KOMPOSISI PENDUDUK

Pendahuluan

Manusia sudah ada di bumi sekitar dua juta tahun yang lalu, namun pada awal peradaban, jumlah manusia masih sangat sedikit. Pada 10.000 tahun sebelum masehi populasi manusia hanya sekitar lima juta jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di bumi ini semakin bertambah jumlahnya, bahkan hingga tahun 2019, jumlah populasi manusia mencapai 7.7 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat waktu yang diperlukan makin lama makin singkat.

Penduduk merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah. Permasalahan penduduk dalam suatu wilayah dapat memberi dampak atau pengaruh yang cukup besar, salah satunya yaitu pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat di dunia, terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan penduduk di suatu negara pada hakekatnya didasarkan oleh tiga elemen utama yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Penduduk pada hakikatnya dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi penduduk yang besar dan berkualitas akan menjadi aset yang sangat bermanfaat bagi pembangunan, namun sebaliknya penduduk yang besar tapi rendah kualitasnya justru akan menjadi beban yang berat bagi pembangunan. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa sebagian besar ditentukan oleh

kualitas sumber daya manusia dan bukan oleh sumber daya alamnya. Negara-negara seperti Singapura, Hongkong, Korea, Taiwan, Jepang dan sebagian besar negara-negara maju di dunia dapat dikatakan miskin akan sumber daya alam, tapi mereka dapat berkembang dan maju dengan pesat karena mereka mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan tetap melakukan investasi pembangunan yang memadai dalam bidang ini.

Pertumbuhan penduduk sendiri merupakan perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besarnya kelahiran *(birth)*, kematian *(death)*, migrasi masuk *(in migration)*, dan migrasi keluar *(out migration)*. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila terdapat bayi yang lahir dan penduduk yang datang, dan penduduk akan berkurang jumlahnya apabila terdapat penduduk yang mati dan penduduk yang keluar wilayah tersebut.

Komposisi pendudukan menyangkut struktur penduduk atau pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Misalnya, secara geografis, biologis, sosial dan atau ekonomi**.** Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan yang terpenting. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan.

Ada beberapa macam komposisi pendudukan, yakni (1) berdasarkan aspek biologis, (2) berdasarkan aspek sosial, (3) berdasarkan aspek ekonomi, dan (4) berdasarkan aspek geografis.

Berdasarkan aspek biologis, misalnya penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Berdasarkan aspek social, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan. Berdasarkan aspek ekonomis, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan. Berdasarkan aspek geografis, misalnya penduduk digolongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota.

Ada tiga cara menghitung jumlah pendudukan, yakni sensus penduduk, registrasi, dan survei. Yang pertama adalah sensus penduduk. Sensus berasal dari bahasa Latin "*censere*" yang berarti penaksiran harta benda seseorang warga Negara dan pencatatan nama warga negara. Selanjutnya adalah registrasi. Registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan kejadian penting yang dialami seseorang, misalnya perkawinan, perceaian, adopsi anak dan perpindahan penduduk. Kumpulan catatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk. Terakhir adalah survei. Survei merupakan pencacahan penduduk dengan cara mengambil daerah sampel. Pencacahan penduduk dengan metode survei tidak dilakukan di seluruh wilayah negara, melainkan hanya pada daerah-daerah tertentu yang dianggap mewakili.

Pertumbuhan Penduduk

Faktor utama penyebab tercapainya jumlah penduduk dua kali lipat, dengan waktu yang semakin lama semakin singkat adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan di bidang kesehatan. Dengan kemajuan teknologi kesehatan kelahiran dapat diatur dan kematian dapat dicegah. Ini semua mengakibatkan menurunnya angka kematian secara drastis atau mencolok.

Sesuai dengan tingkat kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka tiap-tiap masyarakat atau negara, pertumbuhan penduduknya mengalami 4 periode yaitu sebagai berikut.

Periode I. Pada periode ini pertumbuhan penduduk berjalan dengan lambat yang ditandai dengan adanya tingkat kelahiran dan kematian yang rendah sehingga disebut periode statis.

Periode II. Tahap kedua ini angka kematian mulai turun karena adanya perbaikan gizi makanan dan kesehatan. Akibat dari itu semua pertumbuhan penduduk menjadi cepat mengingat angka kelahiran yang masih tinggi.

Periode III. Periode ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk mulai turun. Tingkat kematian pada periode ini stabil sampai pada tingkat rendah dan angka kelahiran menurun, penyebabnya antara lain adanya pembatasan jumlah anggota keluarga.

Periode IV. Pada masa ini tingkat kematian stabil, tetapi tingkat kelahiran menurun secara perlahan sehingga pertumbuhan penduduk rendah. Periode ini di sebut periode penduduk stasioner.

Dari empat periode di atas, pertumbuhan penduduk Indonesia berada pada periode kedua dan sekarang sedang menuju periode ketiga. Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor nonalami.

Terakhir, pertumbuhan total adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih pertumbuhan nonalami, dengan rumus sebagai berikut.

$P = L - M$	$P = I - E$	$P = (L - M) + (I - E)$
Keterangan : P = Pertumbuhan penduduk L = Lahir M = Mati	Keterangan : P = Pertumbuhan penduduk I = Imigrasi E = Emigrasi	Keterangan : P = Jumlah pertumbuhan penduduk dalam satu tahun L = Jumlah kelahiran dalam satu tahun M = Jumlah kematian dalam satu tahun I = Imigrasi E = Emigrasi

Pertumbuhan penduduk alami merupakan pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari hasil selisih tingkat kelahiran dengan kematian dalam satu tahun. Kemudian Pertumbuhan penduduk nonalami diperoleh dari selisih imigrasi (migrasi masuk) dengan emigrasi (migrasi keluar). Pertumbuhan penduduk nonalami disebut juga dengan pertumbuhan penduduk karena migrasi.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Jika tidak hati-hati dalam mengelolanya, maka negeri ini akan menghadapi ledakan penduduk (*baby booming*). Problem yang akan dihadapi pertambahan

penduduk ini terutama adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, jelas setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula ketersediaan pangan. Begitu juga energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi yang besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tidak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Karena itu, saat ini dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk. Tingginya pertambahan penduduk ini disebabkan beberapa faktor seperti angka bayi lahir yang tinggi juga ditambah adanya warga dari daerah lain yang datang baik untuk menetap, bekerja, dan lainnya. Namun yang paling memengaruhi laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah angka kelahiran yang tinggi.

Tentunya, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut harus ada sinergisitas antarlembaga ataupun kedinasan dengan melibatkan masyarakat. Dengan intervensi program tentunya diharapkan laju pertumbuhan penduduk ini bisa ditekan bahkan diharapkan turun di bawah satu persen. Upaya yang dilakukannya itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah atau contohnya program pembangunan keluarga melalui KB sehingga bisa dilakukan pembinaan mulai dari bina keluarga balita hingga lansia.

Perubahan Penduduk

Setidaknya ada tiga hal yang memengaruhi perubahan penduduk. Mortalitas, fertilitas, dan Migrasi. Berikut adalah penjelasannya.

Mortalitas

Mortalitas atau kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas).

Mortalitas merupakan salah satu komponen dalam proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk dan bersifat mengurangi jumlah penduduk. Mortalitas merupakan indikator yang menentukan kesejahteraan penduduk, dan merepresentasikan kualitas penduduk dalam suatu wilayah. Tingkat mortalitas yang rendah menunjukkan keberhasilan pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam bidang kesehatan. Ukuran dalam mortalitas menunjukkan angka, rasio, persentase atau peluang terjadinya mortalitas atau kematian penduduk dalam suatu wilayah.

Fertilitas

Fertilitas merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*). Atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud di sini hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung.

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya

bayi yang lahir hidup. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk. Istilah fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda tanda kehidupan: misalnya berteriak; bernafas; jantung berdenyut; dan sebagainya.

Seorang perempuan yang secara biologis subur (*fecund*) tidak selalu melahirkan anak-anak yang banyak, misalnya dia mengatur fertilitas dengan abstinensi atau menggunakan alat-alat kontrasepsi. Kemampuan biologis seorang perempuan unuk melahirkan sangat sulit untuk diukur. Ahli demografi hanya menggunakan pengukuran terhadap kelahiran hidup (*live birth*). Fekunditas sebaliknya, merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya.

Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia. Istilah fertilitias sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita.

Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (*still live*) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Kemampuan fisiologis wanita untuk memberikan kelahiran

atau berpartisipasi dalam reproduksi dikenal dengan istilah fekunditas. Tidak adanya kemampuan ini disebutin fekunditas, sterilitas atau infertilitas fisiologis. Pengetahuan yang cukup dapat dipercaya mengenai proporsi dari wanita yang tergolong subur dan tidak subur belum tersedia. Ada petunjuk bahwa di beberapa masyarakat yang dapat dikatakan semua wanita kawin dan ada tekanan sosial yang kuat terhadap wanita/pasangan untuk mempunyai anak, hanya sekitar satu atau dua persen dari mereka yang telah menjalani perkawinan beberapa tahun tetapi tidak mempunyai anak.

Seorang wanita dikatakan subur jika wanita tersebut pernah melahirkan paling sedikit seorang bayi. Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas (kematian) karena seorang wanita hanya meninggal sekali, tetapi dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Kompleksnya pengukuran fertilitas ini karena kelahiran melibatkan dua orang (suami dan istri), sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang saja (orang yang meninggal). Seseorang yang meninggal pada hari dan waktu tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai risiko kematian lagi. Sebaliknya, seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak, tidak berarti risiko melahirkan dari wanita tersebut menurun.

Terdapat sejumlah faktor menurut Ida Bagus Mantra (1985) yang dapat memengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor nondemografi. Faktor-faktor demografi antara lain: struktur atau komposisi umur; status perkawinan; umur kawin pertama; keperidian atau fekunditas; dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-

faktor nondemografi di antaranya adalah: keadaan ekonomi penduduk; tingkat Pendidikan; perbaikan status wanita; urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung atau pun tidak langsung terhadap fertilitas.

Migrasi

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat pada sekitar wilayah satu negara saja.

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Jenis-jenis Migrasi dapat terjadi di dalam satu negara maupun antarnegara. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam yaitu: (1) imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan

tujuan menetap. Orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. (2) Emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. (3) Remigrasi atau repatriasi, yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya.

Yang kedua adalah migrasi nasional, yaitu perpindahan penduduk dari daerah ke daerah lain pada negara tersebut. Migrasi nasional ini dibagi menjadi empat, yaitu: (1) urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota, (2) transmigrasi, perpindahan antarpulau, (3) ruralisasi, perpindahan dari kota ke desa, (4) evakuasi, perpindahan dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman.

Pada dasarnya faktor-faktor orang yang melakukan migrasi dibagi menjadi dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Contoh faktor pendorong adalah sebagai berikut.

1. Berkurangnya lapangan pekerjaaan di tempat asal,
2. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dll.
3. Adanya wabah penyakit berbahaya.
4. Makin berkurangnya sumber-sumber alam di tempat asal.
5. Adanya tekanan atau diskriminasi politik, agama, atau suku di daerah asal.
6. Alasan perkawinan atau pekerjaan yang mengharuskan pindah dari daerah asal.

Sedangkan contoh faktor penarik adalah seperti berikut.

1. Adanya rasa kecocokan di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.

2. Kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
3. Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang dianggap menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
5. Banyak terdapat tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi penduduk-penduduk pedesaan atau kota kecil.

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan sebuah mata statistik dari statistik kependudukan yang membagi dan membahas masalah kependudukan dari segi umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk yaitu pengelompokkan penduduk berdasarkan kriteria (ukuran) tertentu. Dasar untuk menyusun komposisi penduduk yang umum digunakan adalah umur, jenis kelamin, mata pencaharian, dan tempat tinggal. Pengelompokkan penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Komposisi menurut umur biasanya dijabarkan dalam kelompok-kelompok umur 5 tahun, sedangkan menurut jenis kelamin adalah laki-laki dan

perempuan. Umur penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1) umur 0–14 tahun, dinamakan usia muda atau usia belum produktif; (2) umur 15–64 tahun dinamakan usia dewasa, usia kerja atau usia produktif; (3) umur 65 tahun ke atas dinamakan usia tua, usia tak produktif, atau usia jompo.

Sesuai dengan pengelompokkan umur di atas, maka struktur (susunan) penduduk negara-negara di dunia dibagi 3 yaitu sebagai berikut.

1. Struktur penduduk muda, bila suatu negara atau wilayah sebagian besar penduduk usia muda.
2. Struktur penduduk dewasa, bila suatu negara sebagian besar penduduk berusia dewasa.
3. Struktur penduduk tua, bila suatu negara sebagian besar terdiri penduduk berusia tua.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk ada 3 macam yaitu berikut ini.

1. Piramida penduduk muda berbentuk limas. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda lebih besar dibanding usia dewasa. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk bertambah lebih banyak. Jadi penduduk sedang mengalami pertumbuhan.
2. Piramida penduduk stasioner atau tetap, berbentuk granat. Bentuk ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda seimbang dengan usia dewasa. Hal ini berarti penduduk dalam keadaan stasioner sehingga

pertambahan penduduk akan tetap diwaktu yang akan datang.

3. Piramida penduduk tua berbentuk batu nisan. Piramida bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda lebih sedikit bila dibandingkan dengan usia dewasa. Di waktu yang akan datang jumlah penduduk mengalami penurunan karena tingkat kelahiran yang rendah dan kematian yang tinggi.

Negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki piramida penduduk berbentuk limas dan negara-negara maju umumnya berbentuk granat dan sebagian kecil berbentuk batu nisan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin didasarkan atas jenis pria dan wanita. Komposisi ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelahiran seperti jika sebagian besar penduduk suatu negara terdiri wanita usia subur (15–44 tahun) maka tingkat kelahiran akan tinggi. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di daerah atau negara tertentu pada tahun tertentu disebut perbandingan jenis kelamin (*sex ratio*).

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan dari kelompok usia produktif. Usia produktif (15–64 tahun) selain menanggung kebutuhan hidup dirinya juga menanggung kebutuhan hidup golongan usia muda (0–14 tahun) dan golongan tua (65 tahun ke atas).

Komposisi penduduk menurut pekerjaan. Penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang, misalnya pekerjaan-pekerjaan tersebut

antara lain pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, buruh, pedagang, petani, pengusaha dan sopir. Komposisi penduduk menurut pendidikan. Berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang telah ditamatkan penduduk dapat dikelompokkan dalam tingkat misalnya SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi. Pengelompokkan ini dapat digunakan untuk menentukan besarnya tingkat pendidikan penduduk. Komposisi Penduduk menurut agama, misalnya pengelompokkan ini berdasarkan kepada agama yang dianut penduduk yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Komposisi penduduk menurut tempat tinggal, misalnya tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk di desa dan di kota. Ciri khas negara agraris seperti Indonesia adalah sebagian besar penduduk tinggal di desa.

Ukuran-Ukuran dalam Komposisi Penduduk

Terdapat beberapa ukuran-ukuran dalam demografi, berikut adalah penjabarannya.

Jumlah/bilangan absolute

Sering digunakan dalam analisis demografi. Misalnya menurut hasil sementara SP 2000, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 203,5 juta orang. Bilangan *absolute* ini kemudian dikembangkan menjadi bilangan *relative* agar lebih mudah dianalisis.

Rasio

Menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Dengan kata lain merupakan perbandingan antara dua bilangan $\frac{a}{b}$ dan dapat dinyatakan dalam

persepuluh, perseratus, atau perseribu. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Ada beberapa kriteria dalam menghitung rasio ini.

1. Rasio jenis kelamin

$$= \frac{jumlah\ penduduk\ pria}{jumlah\ penduduk\ wanita}\ x\ 100$$

2. Rasio jenis kelamin menurut umur:

$$SRi = \frac{Mi}{Fi}\ x\ k$$

Keterangan:

Sri = rasio jenis kelamin pada umur atau golongan umur i tahun.
Mi = jumlah penduduk laki-laki pada umur atau golongan umur i tahun.
Fi = jumlah penduduk perempuan pada umur atau golongan umur i tahun.
K = konstanta, biasanya nilainya 100.

3. Rasio menurut jenis kelamin kelahiran (*sex ratio at birth* = SRB):

$$SRB = \frac{BM}{BF}\ x\ k$$

Keterangan:

SRB = rasio jenis kelamin kelahiran
BM = kelahiran bayi laki-laki
BF = jumlah kelahiran bayi perempuan
k = konstanta

4. Rasio anak perempuan (*child women ratio*=CWR)

$$CWR = \frac{P(0-4)}{Pf\ (15-49)}\ x\ k$$

Keterangan :

CWR = rasio anak perempuan
P (0 – 4) = jumlah penduduk usia di bawah 5 tahun
Pf (15 – 49 = jumlah penduduk perempuan usia 15 – 49 tahun
k = konstanta

5. Rasio beban tanggungan (*dependency ratio* = DR)

$$DR = \frac{Penduduk\ umur\ (0-14\ tahun) + penduduk\ umur\ 65\ tahun\ dan\ lebih}{Penduduk\ umur\ 15-64\ tahun}$$

6. Kepadatan penduduk (*man land ratio*)

Kepadatan penduduk ini dibagi menjadi 3 bagian

a. Kepadatan penduduk kasar adalah banyaknya penduduk per satuan luas.

$$KP = \frac{Jumlah\ penduduk\ suatu\ wilayah}{Luas\ wilayah}$$

b. Kepadatan penduduk fisiologis ialah jumlah penduduk tiap kilometer persegi lahan pertanian.

$$Kepadatan\ penduduk\ fissologis = \frac{Jumlah\ penduduk\ suatu\ wilayah}{Luas\ lahan\ pertanian}$$

c. Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk petani tiap-tiap kilometer persegi lahan pertanian.

$$Kepadatan\ penduduk\ agraris = \frac{Jumlah\ penduduk\ petani\ suatu\ wilayah}{Luas\ lahan\ pertanian}$$

Rate (angka atau tingkat)

Jumlah peristiwa sebanding jumlah penduduk yang mengandung risiko peristiwa tersebut, angka ini merupakan suatu bentuk khusus dari rasio. Ada dua macam angka yaitu: Angka kasar yaitu angka yang dipakai untuk menghitung peristiwa demografis. Penduduk total, termasuk penduduk yang tidak menanggung risiko peristiwa demografi tersebut. Misalnya angka kelahiran kasar (CBR=*crude death rate*). Angka spesifik yaitu angka yang dipakai untuk menghitung perstiwa demografi penduduk yang menanggung risiko peristiwa demografi tersebut, misalnya angka fertilitas menurut umur (ASFR= *age spesifik fertility rate*).

Proporsi

menyatakan suatu perbandingan antara dua bilangan, di mana pembilangnya merupakan dari penyebut $\left(\frac{a}{a+b}\right)$. Apabila proporsi dinyatakan dalam perseratus, dikenal dengan nama persen. Rumusnya sebagai berikut

$$Proporsi = \frac{Penduduk\ umur\ 10\ tahun\ ke\ atas\ yang\ berstatus\ kawin}{Penduduk\ umur\ 10\ tahun\ ke\ atas}$$

Piramida Penduduk

Susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat digambarkan secara grafis dengan perbedaan atas dan bawah. Gambaran tersebut dinamakan piramida penduduk. Dalam piramida ada garis horizontal dan garis vertikal, sumbu vertikal menggambarkan umur penduduk dari nol sampai dengan 65 tahun lebih, dengan interval satu tahunan ataupun lima tahunan.

Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk baik secara absolut maupun relatif dalam skala tertentu. Pada bagian kiri sumbu vertikal digambarkan penduduk laki-laki dan perempuan di sebelah kanan. Tidak seluruh piramida penduduk selalu runcing bagian atas. Untuk negara maju, susunan penduduk yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk, bagian atas sama besar dengan bagian bawah, bahkan ada beberapa negara maju dengan grafik piramida penduduk bagian atas lebih besar.

Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total.

Piramida penduduk adalah penyajian data komposisi penduduk yang dapat disajikan dengan grafik yang berbentuk piramida. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. Fungsi Piramida Penduduk adalah: (1) untuk menggambarkan keadaan umum penduduk suatu negara. (2) mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki dan perempuan. (3) meramalkan keadaan penduduk di masa yang akan datang.

Dengan piramida penduduk, akan dapat diketahui gambaran mengenai hal-hal berikut ini

1. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan.
2. Penduduk kelompok anak-anak, dewasa dan orang tua.

3. Jumlah angkatan kerja.
4. Jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan.
5. Angka ketergantungan.
6. Rasio laki-laki dan perempuan.
7. Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan.
8. Perkiraan jumlah kelahiran yang akan datang.

Susunan penduduk atas dasar umur dan jenis kelamin, karakteristik penduduk suatu daerah atau negara dapat diklasifikasi menjadi tiga bentuk piramida penduduk yaitu sebagai berikut.

Piramida Penduduk Muda

Piramida penduduk muda (expensive) berbentuk kerucut alasnya lebar dan puncaknya meruncing. Komposisi piramidanya: (a) sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda; (b) kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan; (c) tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi; (d) Pertumbuhan penduduknya tinggi.

Piramida Penduduk Dewasa.

Bentuk piramida menyerupai persegi empat, bentuk tersebut menggambarkan keadaan penduduk. Komposisi piramidanya: (a) jumlah penduduk dalam keadaan stasioner; (b) jumlah kelahiran dan kematian seimbang; (c) jumlah penduduk relatif tetap; (d) pertumbuhan penduduk rendah; (e) penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua.

Piramida Penduduk Tua.

Bentuk piramidanya menyerupai bentuk nisan, bentuk ini menggambarkan: (a) jumlah penduduk terus berkurang; (b) angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian; (c) sebagian

besar penduduk berada pada kelompok usia tua. (d) pertumbuhan penduduk sangat rendah bahkan tidak ada sama sekali

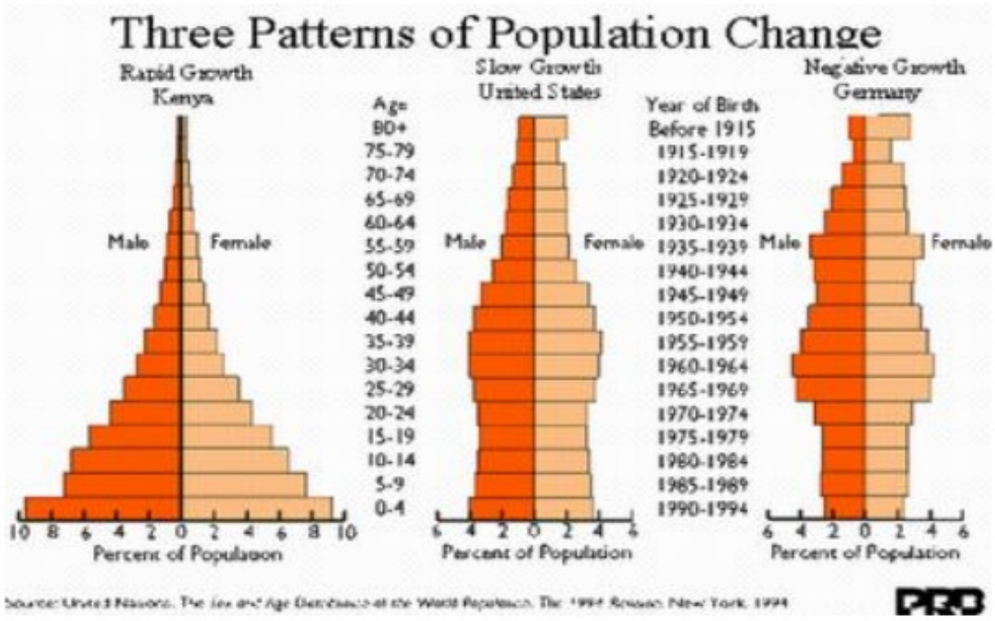

Contoh gambar piramida penduduk

Distribusi Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap Km^2 pada suatu wilayah negara. Faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk tiap-tiap daerah atau negara adalah: (1) faktor fisiografis, (2) faktor biologis; dan (3) faktor kebudayaan dan teknologi.

Kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam. (1) Yang pertama adalah kepadatan penduduk aritmatik, sangat mudah dalam perhitungannya. Data kepadatan penduduk aritmatik sangat bermanfaat. Contohnya adalah dengan diketahuinya tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah, maka dapat digunakan untuk perencanaan penyediaan fasilitas sosial. Jika pada suatu daerah memiliki kepadatan penduduk aritmatik yang rendah, maka penyediaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dapat digabung dengan daerah yang berdekatan. (2) yang kedua adalah kepadatan penduduk Indonesia antara pulau yang satu dan pulau yang lain tidak seimbang. Selain itu, kepadatan penduduk antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain juga tidak seimbang. Hal ini disebabkan karena persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan Madura. Padahal, luas wilayah pulau Jawa dan Madura hanya sebagian kecil dari luas wilayah negara Indonesia. Akibatnya, pulau Jawa dan Madura memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah-daerah lain tingkat penduduknya rendah. Provinsi yang paling padat penduduknya adalah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Daya dukung lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Daya dukung lingkungan pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau lain, sehingga setiap satuan luas di Pulau Jawa dapat mendukung kehidupan yang lebih tinggi, misalnya dibandingkan dengan di Kalimantan, Papua,

Sulawesi, dan Sumatra. Kemampuan suatu wilayah dalam mendukung kehidupan itu ada batasnya. Apabila kemampuan wilayah dalam mendukung lingkungan terlampau, dapat berakibat pada terjadinya tekanan-tekanan penduduk. Jadi, meskipun di Jawa daya dukung lingkungannya tinggi, namun juga perlu diingat batas kemampuan wilayah tersebut dalam mendukung kehidupan.

Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua.

1. Persebaran penduduk berdasarkan geografis. Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Penduduk Indonesia tersebar secara tidak merata di beberapa kepulauan besar dan kecil.
2. Persebaran penduduk berdasarkan administrasi. Persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu negara. Secara administrasi penduduk Indonesia tersebar di 34 provinsi; kemudian setiap provinsi dibagi lagi dalam kabupaten, kecamatan, dan desa (kelurahan).

Penduduk atau warga suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu: (1) orang yang tinggal di daerah tersebut dan (2) orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Misalkan bukti kewarganegaraan, tetapi memilih tinggal di daerah lain. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Masalah-masalah kependudukan dipelajari dalam ilmu Demografi.

Berbagai aspek perilaku manusia dipelajari dalam sosiologi, ekonomi, dan geografi. Demografi banyak digunakan dalam pemasaran, yang berhubungan erat dengan unit-unit ekonomi, seperti pengecer hingga pelanggan potensial.

Persebaran penduduk di muka bumi nyatanya tidak dialami oleh penduduk secara merata. Adapun tugas geograf yang khusus adalah memetakan persebaran itu dengan jelas. Hasil suatu sensus pada tahun tertentu di suatu wilayah harus dipetakan sehingga dapat kelihatan bagi pembaca peta, seluk-beluk kepadatan di berbagai bagian dari wilayah itu. Dari situ dapat dianalisis mengapa bagian wilayah yang satu lebih padat atau kurang padat dibandingkan dengan yang lain. Geografi ingin mengetahui faktor-faktor geografis manakah yang kiranya memengaruhi persebaran yang tidak merata tersebut. Lembah-lembah sungai biasanya berpenduduk lebih padat daripada di sekitarnya sehingga air merupakan faktor utama dari kepadatan. Kota lebih padat dari pedesaan, latar belakangnya lain lagi; demikian pula desa-desa di sepanjang jalan raya provinsi. Untuk lebih sempurna analisisnya para geograf menggunakan peta udara sebagai alatnya.

Persebaran penduduk di muka bumi nyatanya tidak dialami oleh penduduk secara merata. Adapun tugas geograf yang khusus adalah memetakan persebaran itu dengan jelas. Hasil suatu sensus pada tahun tertentu di suatu wilayah harus dipetakan sehingga dapat kelihatan bagi pembaca peta, seluk-beluk kepadatan di berbagai bagian dari wilayah itu. Dari situ dapat dianalisis mengapa bagian wilayah yang satu lebih padat atau kurang padat dibandingkan dengan yang lain. Geografi ingin mengetahui faktor-faktor geografis manakah yang kiranya memengaruhi persebaran yang tidak merata tersebut. Lembah-lembah sungai biasanya berpenduduk lebih

padat daripada di sekitarnya sehingga air merupakan faktor utama dari kepadatan. Kota lebih padat dari pedesaan, latar belakangnya lain lagi; demikian pula desa-desa di sepanjang jalan raya provinsi. Untuk lebih sempurna analisisnya para geograf menggunakan peta udara sebagai alatnya.

Pembangunan Kependudukan

Pembangunan yang baik membutuhkan perencanaan pembangunan yang matang, data kependudukan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan tersebut, sebagai contoh dalam perencanaan pembangunan kesehatan anak diperlukan jumlah penduduk usia di bawah 5 tahun. Contoh lain kebutuhan data pemilihan umum (Pemilu) atau pilihan kepala daerah (Pilkada) diperlukan data penduduk usia di atas 17 tahun. Data kependudukan yang lengkap dan akurat akan menyempurnakan perencanaan pembangunan yang akan dibuat sehingga akan menghasilkan pembangunan yang efisien dan berkesinambungan. Kelengkapan data kependudukan sangat didukung oleh sumber-sumber data misalnya data registrasi, data sensus penduduk, data survei dan lain sebagainya.

Bagi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, negara-negara di Eropa Barat dan Skandinavia, Australia, data kependudukan mereka lebih lengkap dan akurat dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, Bangladest, negara-negara Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Pemerintahan di negara-negara maju lebih apresiatif terhadap data kependudukan,

memandang data kependudukan sebagai data yang sangat penting, sebaliknya di banyak negara berkembang data kependudukan belum dianggap sebagai data yang penting bagi pembangunan. Sekalipun data kependudukan di beberapa negara berkembang cukup lengkap, tetapi sering diragukan reliabilitasnya. Kelengkapan dan akurasi data kependudukan dapat bermanfaat dalam menangani masalah-masalah yang muncul misalnya data pemilu, penanganan bencana alam, pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan bahkan masalah-masalah kejahatan yang muncul di kota-kota besar.

Pembangunan segala bidang yang dilaksanakan di berbagai negeri, sering menimbulkan dampak yang menyangkut penduduk. Awalnya pembangunan berorientasi pada peningkatan produksi tanpa memandang secara serius dampak negatifnya terhadap penduduk, sehingga penduduk menjadi 'korban' sekaligus 'penikmat' pembangunan yang dilakukan secara bersamaan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memberikan stimulus bagi peningkatan bahan pakan dan produk jasa, seiring dengan hal itu sumber daya alam akan mengalami penurunan daya dukungnya. Oleh karena itu pembangunan berwawasan kependudukan menjadi urgen untuk diterapkan pada pembangunan di berbagai negara.

Kependudukan sebagai sebuah multidisiplin ilmu (*studies*) yang memfokuskan pada berbagai persoalan kehidupan manusia menunjukkan *space* kependudukan yang sangat luas. Keluasan studi kependudukan memungkinkan untuk memberikan penjelasan fenomena sosial, budaya,

ekonomi, ketahanan, lingkungan fisik yang dihadapi oleh penduduk baik dalam wilayah pedesaan pertanian, pesisir, maupun perkotaan.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan, perubahan yang dilakukan oleh kebudayaan manusia sebagai upaya untuk menyempurnakan diri dalam kehidupannya, implikasi perubahan yang terjadi semakin kompleks. Sementara itu tujuan pembangunan yang hendak dicapai semakin rumit karena cakupan yang akan dicapai tidak hanya ekonomi tetapi menyangkut sosial-kebudayaan dan bahkan biogeofisik. Kondisi kekinian jauh berbeda dengan awal pembangunan yang dilakukan di Eropa pada awal abad ke-XX yang banyak berorientasi pada produksi atau ekonomi *an sich*; oleh karena itu, arah pembangunan di negara-negara berkembang terutama Indonesia harus dipertautkan dengan kebudayaan (Salim, 1987 :10). Melalui konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*), diupayakan agar pembangunan tercapai keselarasan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan di mana penduduk berdomisili; sementara itu lingkungan mempunyai keterkaitan dengan kebudayaan.

Konsepsi pembangunan yang berkelanjutan (s*ustainable*) yang dicetuskan oleh Komisi Sedunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*World Comission on Environment and Development*) pada tahun 1987, menunjukkan semakin pentingnya pendekatan intra- dan interdisipliner untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam akibat pembangunan.

Pada dasarnya penerima dampak negatif pembangunan berupa kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya alam adalah penduduk, bukan penduduk sebagai individu tetapi penduduk dalam pengertian *agregrat* seperti yang termaktub dalam Undang-undang RI No. 10 tahun 1992: Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu.

Secara teknis, penduduk yang dimaksud adalah penduduk laki-laki atau wanita; penduduk tempatan atau migran; penduduk terbelakang/terpelajar; penduduk tanpa memandang agama, suku, ras; penduduk dengan komposisi balita atau anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia; berstatus manajer, buruh, ningrat, rakyat biasa; penduduk berstatus kawin, tidak kawin. Pembangunan berwawasan kependudukan berarti perubahan yang direncanakan berdasarkan pada data kependudukan dan bermanfaat bagi penduduk secara multikultural. Dengan demikian pembangunan berwawasan kependudukan pembangunan yang tidak berdimensi diskriminasi karena perbedaan-perbedaan agama, gender, rasa atau etnis, bahasa, kelas sosial, kemampuan, pendidikan, *skill*, umur.

Tugas 1 :

Buatlah tugas Individu. Anggaplah kelas kuliah Saudara adalah representatif dari jumlah pendudukan Indonesia. Selanjutnya berdasarkan jumlah mahasiswa kelas mata kuliah "Kependudukan", buatlah (1) rasio jenis kelamin; (2) rasio jenis kelamin umur; (3) rasio menurut jenis kelamin kelahiran; (4) rasio anak perempuan; (5) rasio beban tanggungan keluarga saudara; (6) buatlah kepadatan penduduk kelas Saudara. Gunakan rumus yang sesuai, seperti yang dipelajari di Bab ini.

Tugas 2 :

Buatlah gambaran piramida penduduk kelas mata kuliah "Kependudukan". Piramida tersebut harus menggambarkan beberapa hal, yakni: (1) perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan; (2) perbandingan umur (tahun kelahiran); dan (3). jumlah lapangan kerja yang dibutuhkan. Buatlah sesuai piramida yang kita pelajari di bab ini.

BAB III
PROYEKSI PENDUDUK

Pendahuluan

Dari hasil sensus penduduk tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia adalah 179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ketiga di antara negara-negara yang sedang berkembang setelah China dan India. Dibanding dengan jumlah sensus tahun 1980 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata 1,98% per tahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 195,3 juta jiwa.

Bila dilihat dari luas wilayah pada peta penyebaran penduduknya terlihat tidak merata di 27 provinsi. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1990 sekitar 60% penduduk tinggal di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa hanya 7% luas wilayah Indonesia. Di lain pihak, pulau Kalimantan yang luas wilayahnya hanya ditempati oleh 5% dari jumlah penduduknya. Kondisi tersebut memerlukan upaya pemerataan dan upaya tersebut telah dilaksanakan melalui program transmigrasi dan gerakan kembali ke Desa. Dilihat dari tingkat pertambahan penduduknya Indonesia masih tergolong tinggi, hal ini bila tidak diupayakan pengendaliannya akan menimbulkan banyak masalah.

Di Indonesia dari tingkat partisipasi anak usia sekolah baru mencapai 53% meskipun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun telah dicanangkan oleh pemerintah. Dibanding negara tetangga, tingkat partisipasi pendidikan kita tergolong rendah.

Pengertian Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk (menurut komposisi umur dan jenis kelamin) di masa yang akan datang berdasarkan asumsi arah perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Proyeksi secara umum adalah untuk mengetahui perkembangan di masa yang akan datang berdasarkan data yang telah ada.

Proyeksi pada dasarnya merupakan suatu perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian (nilai dari suatu variabel) untuk waktu yang akan datang. Hasil proyeksi menggambarkan tingkat kemampuan untuk masa yang akan datang, untuk menghindari atau mengurangi tingkatan risiko dari kesalahan. Maka diperlukan asumsi-asumsi yang dibuat oleh pihak pengambil keputusan, yang didukung oleh proyeksi tentang tingkat kemampuan populasi peternakan di masa depan secara objektif.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi).

Ada beberapa kegunaan dari proyeksi, yaitu sebagai berikut.

1. Di bidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai gizi serta susunan penduduk menurut umur.
2. Di bidang kesehatan, menentukan jumlah medis, dokter, obat-obatan, jumlah tempat tidur di rumah sakit yang diperlakukan selama periode proyeksi.

3. Di bidang pendidikan, untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan masa yang akan datang.
4. Di bidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja yang erat kaitannya dengan proyeksi tentang kemungkinan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, *skilled*, dan pengalaman dari tenaga kerja.
5. Di bidang produksi dan jasa, dengan proyeksi angkatan kerja dalam hubungannya dengan data mengenai produktivitas merupakan dasar estimasi produk barang-barang dan jasa di masa mendatang.

Beberapa pengertian mengenai perkiraan penduduk, yakni sebagai berikut.

1. Perkiraan penduduk (*population estimate*).

   Perkiraan penduduk adalah penaksiran atau pendugaan penduduk, biasanya tentang jumlahnya pada waktu tertentu. Sebuah perkiraan didasarkan pada pemahaman saat ini peran yang dimainkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk dan pada metodologi. Berbagai metodologi yang tersedia untuk membuat perkiraan, mulai dari ekstrapolasi sederhana ke kompleks beberapa model persamaan yang melibatkan puluhan variabel demografi, sosial ekonomi, dan lingkungan.

2. Ramalan penduduk (*population forecast*).

   Sebuah ramalan populasi menyediakan perkiraan tren masa depan kemungkinan besar dalam ukuran populasi dan indikator demografi seperti distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

Ada 2 macam jenis perkiraan penduduk, yaitu sebagai berikut.

1. Perkiraan antarsensus (*intercental estimate*).

   Perkiraan antarsensus adalah perkiraan mengenai keadaan penduduk di antara 2 sensus dari data yang sudah diketahui, sehingga dari hasil sensus keduanya dapat diperhitungkan. Pertumbuhan penduduk dianggap linier, artinya setiap tahun penduduk akan bertambah dengan jumlah yang sama.
2. Perkiraan pascasensus (*postcental estimate*).

   Perkiraan pascasensus adalah perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus. Prinsipnya juga sama, yaitu pertumbuhan penduduk adalah linear.

Metode Perhitungan Proyeksi Penduduk

Ada beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk masa yang akan datang dengan menggunakan metode antara lain sebagai berikut.

Metode Matematik.

Metode matematik digunakan jika hanya jumlah penduduk total yang diketahui dan data tentang komponen pertumbuhan penduduk tidak tersedia. Metode matematik juga memiliki beberapa cara, yaitu:

1. Model linear aritmatik. Model linear aritmatik adalah teknik proyeksi paling sederhana dari seluruh model. Adapun persamaan dari model ini, yaitu :

$$P_t = \alpha + \beta T$$

Keterangan :
Pt = penduduk pada tahun proyeksi t
α = intercept = penduduk pada tahun dasar
β = koefisien = rata-rata pertambahan penduduk
T = periode waktu proyeksi = selisih tahun proyeksi dengan tahun dasar

2. Model geometrik. Model geometrik dengan asumsi bahwa dalam model ini adalah penduduk akan bertambah/berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan yang tetap. Adapun persamaannya, yakni:

$$P_t = \alpha + \beta T$$

Keterangan :
Pt = penduduk pada tahun proyeksi t
α = intercept = penduduk pada tahun dasar
β = koefisien = rata-rata pertambahan penduduk
T = periode waktu proyeksi = selisih tahun proyeksi dengan tahun dasar

3. Model logistik atau model eksponensial. Model ini dengan persamaan yang di gunakan yaitu:

$$Pn = Po \cdot e^{rn}$$

Keterangan:
Pn = Jumlah penduduk pada n tahun
Po = Jumlah penduduk awal tahun
r = tingkat pertumbuhan penduduk
n = periode waktu dalam tahun
e = ketetapan = 2,71828

Metode Komponen

Metode ini sering digunakan dalam penghitungan proyeksi penduduk. Metode ini melakukan tiap komponen penduduk secara terpisah dan untuk mendapat proyeksi jumlah penduduk total, hasil proyeksi tiap komponen digabungkan. Metode ini membutuhkan data-data sebagai berikut: (a) komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan; (b) perapian (*smothing*); (c) pola mortalitas menurut umur, (d) pola fertilitas menurut umur; (e) rasio jenis kelamin saat lahir; (f) proporsi migrasi menurut umur. Artinya, proyeksi penduduk dengan metode ini adalah dengan memperhatikan komponen demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jika penduduk awal tahun yang berumur x tahun adalah P (x,a), dan banyak kematian yang berumur x tahun adalah D (x), serta banyak net migran yang berumur x tahun adalah NM (x), maka dengan demikian proyeksi penduduk berumur x tahun pada tahun t adalah:

$$P(x,t,k) = P(x,a) - D(x) + NM(x)$$

dengan :

Dx = P(x,a) (1-Sx)

NM(x) = ASOMR(x) – ASIMR(x) P(x,a)

ASOMR(x) = Age Specific Out-Migration Rate per orang

ASIMR(x) = Age Specific In-Migration Rate per orang

Khusus untuk x = 0 tahun, proyeksi penduduk berumur 0 tahun yaitu P(0,t,k) didapat dari banyaknya kelahiran selama periode proyeksi, yang didapat dari

$$P(0,t,k) = (\Sigma\ ASFRx\ \ Pf\ x)\ S0$$

dengan :

ASFRx = Angka Kelahiran per wanita umur 15-49 tahun
Pfx = banyak penduduk yang berumur 15 – 49 tahun
S0 = rasio masih hidup bayi yang baru lahir

Angka Harapan Hidup dan Proyeksi Penduduk

Dalam kenyataannya, kepadatan penduduk sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misalnya kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Adanya permasalahan yang timbul tersebut akan membawa dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Struktur dan distribusi penduduk menjadi pijakan dalam berbagai kegiatan perencanaan, baik dalam pendidikan, militer, kesehatan maupun bisnis dan sebagai pedoman dalam mengoptimalkan pembangunan yang berwawasan penduduk dalam suatu wilayah. Struktur penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu dan distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk guna melihat pemerataan yang maksimal di suatu wilayah. Mengidentifikasi keduanya adalah langkah awal dalam analisis kependudukan.

Komposisi penduduk salah satunya dapat dilihat berdasarkan umur, di mana penduduk usia produktif dan penduduk usia nonproduktif yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk biasanya menyajikan data kependudukan berupa jenis kelamin dan umur, yang digambarkan dengan dua grafik batang berlawanan arah dengan posisi horizontal.

Komposisi atau Struktur penduduk ini terdiri dari 3 jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Piramida Penduduk Muda

   Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Bentuk ini umumnya kita lihat pada negara – negara yang sedang berkembang. Misalnya : India, Brazil dan Indonesia.

2. Piramida Stasioner

   Bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) sebab tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi. Piramida penduduk yang berbentuk system ini terdapat pada negara-negara yang maju seperti Swedia, Belanda dan Skandinavia.

3. Piramida Penduduk Tua

   Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu Negara bias kekurangan penduduk. Negara yang bentuk piramida

penduduknya seperti ini adalah Jerman, Inggris, Belgia dan Perancis.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk. Menurut CIA World Factbook, tahun 2011 angka harapan hidup di Indonesia secara keseluruhan adalah 70,76 dengan komposisi angka harapan hidup untuk pria berkisar 68,26 sedangkan angka harapan hidup untuk wanita berkisar 73,38. Angka tersebut memang menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, angka harapan hidup di Indonesia masih berada pada urutan ke-108 di dunia berdasarkan data PBB dari 191 negara.

Banyak hal yang melatarbelakangi angka harapan hidup di suatu daerah pada posisi tinggi atau rendah. Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada peningkatan pelayanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), pendidikan, dan pendapatan yang digambarkan dalam pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan terhadap kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh faktor lokasi, yaitu mudahnya untuk dijangkau atau tidak.

Bentuk pelayanan kesehatan tidak hanya terbatas pada fasilitas pelayanan, akan tetapi juga meliputi tenaga kesehatan. Keberadaan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan, informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk

mendatangi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang merujuk pada kondisi fisik baik secara kualitas maupun kuantitas juga menjadi hal yang krusial pada terjaminnya kesehatan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik RI, Kabupaten Jember sendiri pada tahun 2012 menunjukkan bahwa indeks kesehatan berada pada persentase 63,68 mengalami peningkatan sebesar 0,30% dari tahun sebelumnya.

Tidak hanya mengenai kesehatan yang menunjang angka harapan hidup pada suatu wilayah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat turut mempunyai pengaruh dan peranan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidaknya lingkungan, kesehatan individu, keluarga dan masyarakat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Untuk mengubah perilaku masyarakat tidak mudah namun sangat diperlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk memperkecil terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan sebagai akibat dari lingkungan yang kurang sehat, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Beberapa indikator yang menggambarkan kondisi lingkungan antara lain rumah sehat, air bersih, sarana sanitasi (pembuangan air limbah, tempat sampah, dan kepemilikan jamban), tempat umum dan pengelolaan makanan, serta sarana pengolahan limbah di sarana pelayanan kesehatan. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan

masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan oleh pemerintah.

Pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu secara umum dapat diklasifikasikan menurut beberapa hal berikut ini.

1. Karakteristik demografi, seperti umur, jenis kelamin, jumlah wanita usia subur dan jumlah anak.
2. Karakteristik sosial, antara lain tingkat pendidikan dan status perkawinan.
3. Karakteristik Ekonomi, antara lain kegiatan penduduk yang aktif secara ekonomi, lapangan usaha, status dan jenis pekerjaan, serta tingkat pendapatan,
4. Karakteristik geografis atau persebaran, antara lain berdasarkan tempat tinggal, daerah perkotaan-pedesaan, provinsi, dan kabupaten.

Proyeksi dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Jumlah penduduk yang besar bagi beberapa kalangan merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun di sisi lain beberapa kalangan justru meragukan apakah jumlah penduduk yang besar adalah sebagai aset seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi

kebalikan dari hal tersebut bahwa penduduk merupakan beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut.

Penduduk dan pembangunan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pembangunan tidak bisa terjadi tanpa penduduk, begitu juga penduduk tidak akan sejahtera tanpa adanya pembangunan. Di satu sisi penduduk adalah pemicu pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk menjadi penghambat pembangunan, mengapa demikian? Penduduk yang memicu pembangunan adalah penduduk yang produktif sekaligus konsumtif, sebaliknya penduduk yang menghambat pembangunan adalah penduduk yang lebih konsumtif dibandingkan produktif, demikian juga bila kuantitas penduduk tidak terkendali.

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas. Salah satu cara menurunkan tingkat fertilitas yaitu dengan penundaan kelahiran anak pertama.

Sebenarnya permasalahan yang muncul di bidang kependudukan bukan hanya pada jumlah yang besar semata akan tetapi juga berimbas pada turunan dari kuantitas yang besar tersebut antara lain adalah persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi yang dimiliki juga masih rendah dan akibatnya

produktivitas kerja makin menurun serta masalah krusial yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang, yang mengalami peningkatan penduduk lebih cepat. Tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa, sementara di provinsi Sumatera utara 4,8 juta jiwa, Menurut sensus nasional tahun 2016, populasi kini telah meningkat sekitar 1,8 persen per tahun.

Permasalahan kependudukan telah menjadi masalah penting bagi pemerintah dan para pakar kependudukan di Indonesia (Sunaryanto, 2012). Hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukkan kenaikan laju pertumbuhan penduduk Indonesia dari 1,45 persen pada periode 1990 – 2000 menjadi 1,49 persen pada periode 2000 – 2010. Jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dan diproyeksikan mencapai 261.890.900 jiwa pada tahun 2017 (Badan Pusat Statistik [BPS], 2013). Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan Amerika Serikat.

Selain jumlah penduduk yang tinggi tersebut, *Total Fertility Rate* (TFR) Indonesia masih berada pada angka 2,6 di tahun 2012. Menurut data *United Nations* (UN), angka TFR Indonesia tersebut tergolong tinggi. Menurut UN (2007), suatu negara akan mencapai tahap *replacement level fertility* ketika TFR berada pada angka 2,1. Ini berarti bahwa Indonesia belum mencapai tahap *replacement level fertility* sehingga upaya penurunan tingkat kelahiran masih diperlukan.

Kondisi TFR tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi tinggi, serta berakibat pada meningkatnya angka kelahiran. Apabila angka kelahiran tidak terkendali maka jumlah penduduk akan semakin besar. Namun, jumlah penduduk yang besar di Indonesia belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM) Konsekuensi dari peningkatan penduduk terhadap pembangunan berkelanjutan menyebabkan tujuan pembangunan berkelanjutan terganggu. Di antaranya kerusakan hutan setiap tahun meluas rata-rata 21.000 ha per tahun, alih fungsi lahan 700.321 ha per tahun, pencemaran air meningkat, di kawasan perpindahan penduduk yang tinggi, 3,5 persen dengan status cemar kurang, ketersediaan air bersih menyusut rata-rata 2,1 persen per tahun, penduduk sekitar kawasan hutan susah mendapatkan air konsumsi. Begitu juga ketersediaan air untuk lahan pertanian menyusut, sehingga produktivitas pertanian rendah.

Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional [BKKBN], 2009). Dengan demikian, Indonesia harus melakukan upaya pengendalian kelahiran agar tidak menimbulkan masalah yang berkelanjutan.

Adapun di antara berbagai faktor yang memengaruhi penundaan kelahiran anak adalah faktor sosial ekonomi seperti pendidikan responden, status bekerja wanita, status ekonomi, pendidikan suami, pekerjaan suami, faktor budaya yaitu wilayah, daerah tempat tinggal, dan faktor demografi seperti usia perkawinan pertama berpengaruh terhadap

lamanya waktu menikah hingga kelahiran anak pertama pada wanita.

Apabila seseorang tidak berhasil mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus dilakukan. Penundaan kelahiran anak pertama berkaitan erat dengan interval kelahiran. Dengan adanya penundaan kelahiran anak pertama setelah menikah, interval kelahiran anak pertama akan semakin panjang. Interval kelahiran anak pertama merupakan jarak antara waktu pernikahan hingga kelahiran anak pertama.

Tugas

Anggaplah kelas mata kuliah "Kependudukan" sebagai penduduk di suatu wilayah Indonesia. Buatlah perhitungan proyeksi penduduk kelas Saudara tersebut. Gunakan perhitungan proyeksi penduduk di kelas Saudara tersebut dengan berdasarkan perhitungan: (1) metode matematik, (2) model linear aritmatik, (3) model geometrik, (4) model logistik atau model eksponensial, (5) metode komponen yang kita pelajari dalam bab ini.

BAB IV
FERTILITAS

Pendahuluan

Fertilitas pada masyarakat yang lebih maju (industri), di mana ekonomi material sudah menjadi orientasi hidup individu akibat dari fertilisasi, maka fertilitas cenderung mengalami penurunan. Perubahan ini lebih jauh telah menyebabkan penurunan fertilitas di negara-negara maju karena struktur lembaga ekonominya telah berubah, yang berpengaruh terhadap standar hidup yang tinggi, aspirasi untuk mobilitas dan keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang bersifat nonkeluarga.

Anak tidak dilihat dalam kemanfaatan secara sosial tetapi lebih dianggap beban ekonomi karena biaya (*cost*) yang harus ditanggung berbanding lurus dengan jumlah anak yang dimiliki. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang harus diberikan kepada lembaga-lembaga formal seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, peningkatan gizi keluarga, dan seterusnya. Keluarga besar dan pendapatan yang rendah mempersempit peluang orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka dan memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Berbeda dengan negara berkembang, salah satunya di Indonesia, fertilitas masih menjadi hal yang harus dikendalikan untuk menahan laju pertumbuhan penduduk. Pada situasi di mana nilai-nilai budaya (*cultural factors*) sebagai faktor utama dalam memengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah anak yang dimiliki keluarga, maka dampak

fertilitas terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga menjadi tidak signifikan. Artinya, pada situasi seperti ini, orientasi keluarga miskin atau kaya terhadap jumlah anak yang diinginkan relatif tidak ada perbedaan. Menilai anak dari perspektif beban atau aset sebagai disampaikan oleh teori ekonomi fertilitas menjadi tidak pas untuk menjelaskan fenomena perilaku fertilitas keluarga.

Salah satu komponen yang memengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran (fertilitas) yang bersifat menambah jumlah penduduk. Fertilitas adalah kemampuan menghasilkan keturunan yang dikaitkan dengan kesuburan wanita (fekunditas).

Konsep Fertilitas

Fertilitas (*fertility*) sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Dari pengertian ini, kelahiran merupakan banyaknya bayi yang lahir dari wanita. Ada bayi yang disebut lahir hidup yaitu lahirnya seorang bayi yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tidak diperkirakan berapa lama bayi tersebut menunjukkan tanda-tanda kehidupan tersebut. Tanda-tanda kehidupan antara lain bernafas, ada denyutan jantung dan lain-lain.

Ada satu kata yang memiliki makna yang menyerupai fertilitas, yaitu natalitas. Perbedaan keduanya hanya pada ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk, sedangkan natalitas mencakup

peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Ada pula bayi lahir mati artinya bayi tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jika anak pada saat dilahirkan dalam kondisi hidup kemudian meninggal pada waktu masih bayi, tetap dikatakan anak lahir hidup (ALH). Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Seorang perempuan yang telah melahirkan seorang anak tidak berarti risiko melahirkan dari perempuan tersebut menurun. Kompleksnya pengukuran fertilitas, karena kelahiran melibatkan dua orang, suami dan istri, sedangkan kematian melibatkan satu orang saja. Masalah lain yang dijumpai dalam pengukuran fertilitas ialah tidak semua perempuan mengalami risiko melahirkan karena ada kemungkinan dari mereka tidak mendapat pasangan untuk berumah tangga. Juga ada beberapa perempuan yang bercerai, menjanda.

Di samping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (Mantra, 2006). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Di satu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan. Fertilitas merupakan kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Fertilitas merupakan hasil

reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam pengertian demografi menyatakan banyaknya bayi yang lahir hidup.

Istilah fertilitas sering disebut dengan kelahiran hidup *(live birth)*, yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati *(still live)* yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Kemampuan fisiologis wanita untuk memberikan kelahiran atau berpartisipasi dalam reproduksi dikenal dengan istilah fekunditas. Tidak adanya kemampuan ini disebut infekunditas, sterilitas, atau infertilitas fisiologis. Pengetahuan yang cukup dapat dipercaya mengenai proporsi dari wanita yang tergolong subur dan tidak subur belum tersedia. Ada petunjuk bahwa di beberapa masyarakat yang dapat dikatakan semua wanita kawin dan ada tekanan sosial yang kuat terhadap wanita/pasangan untuk mempunyai anak, hanya sekitar satu atau dua persen saja dari mereka yang telah menjalani perkawinan beberapa tahun tetapi tidak mempunyai anak. Seorang wanita dikatakan subur jika wanita tersebut pernah melahirkan paling sedikit seorang bayi.

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas (kematian) karena seorang wanita hanya meninggal sekali, tetapi dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Kompleksnya pengukuran fertilitas ini

karena kelahiran melibatkan dua orang (suami dan istri), sedangkan kematian hanya melibatkan satu orang saja (orang yang meninggal). Seseorang yang meninggal pada hari dan waku tertentu, berarti mulai saat itu orang tersebut tidak mempunyai risiko kematian lagi. Sebaliknya, seorang wanita yang telah melahirkan seorang anak, tidak berarti risiko melahirkan dari wanita tersebut menurun.

Dalam buku *Dasar-Dasar Demografi* terbitan FE UI, dijelaskan konsep-konsep penting yang harus dipegang dalam mengkaji fenomena fertilitas, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Lahir hidup (*Life Birth*), menurut WHO, adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan, misal : bernafas, ada denyut jantungnya atau tali pusat atau gerakan-gerakan otot.
2. Lahir mati (*Still Birth*) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
3. Abortus adalah kematian bayi dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu. Ada dua macam abortus : disengaja (*induced*) dan tidak disengaja (*spontaneus*). Abortus yang disengaja mungkin lebih sering kita kenal dengan istilah aborsi dan yang tidak disengaja lebih sering kita kenal dengan istilah keguguran.
4. Masa reproduksi (*Childbearing age*) adalah masa di mana perempuan melahirkan, yang disebut juga usia subur (15-49 tahun).

Konsep lain yang agak berbeda terkait kematian bayi, yakni sebagai berikut.

1. Kematian bayi *intra uterin* (di dalam kandungan ibu), terdiri dari: (a) *abortus*, kematian janin menjelang dan sampai pada kandungan berumur 16 minggu; (b) *immatur*, kematian janin antara umur kandungan di atas 16 minggu sampai 28 minggu. (c) *prematur*, kematian janin di dalam kandungan pada umur kandungan di atas 28 minggu sampai waktu lahir.
2. Kematian bayi *extra uterin* (di luar kandungan ibu), terdiri dari: lahir mati (*still birth*), jika bayi yang lahir setelah cukup masanya, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan;
3. Kematian baru lahir (*neonatal death*) atau kematian endogen, kematian sebelum bayi berumur 1 bulan yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa bayi sejak lahir.
4. Kematian lepas baru lahir (*post neonatal death*), kematian bayi setelah berumur 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun yang biasanya disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan lingkungan luar.

Faktor-Faktor Fertilitas

Ada beberapa faktor yang memengaruhi fertilitas yang terdiri dari tiga tahap penting dari proses reproduksi: (1) tahap hubungan kelamin (*intercourse*); (2) tahap konsepsi (*conseption*); dan (3) tahap kehamilan (*gestation*).

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi fertilitas akan melalui faktor-faktor yang langsung ada kaitannya dengan ketiga tahap reproduksi di

atas. Faktor-faktor yang langsung mempunyai kaitan dengan ketiga tahap yang disebut "variable antara". Dalam Variabel antara ini, Davis dan Blake menyebutkan ada 11 variabel yang dikelompokkan sebagai berikut.

Tahap pertama disebut dengan *intercouse variables*. Tahap ini adalah faktor-faktor yang mengatur terjadinya hubungan kelamin: (1) umur memulai hubungan kelamin; (2). Selibat permanen: proporsi wanita yang tak pernah mengadakan hubungan kelamin; (3) Lamanya masa reproduksi sesudah atau di antara masa hubungan kelamin; (4) abstinensi sukarela; (5) abstinensi terpaksa (misalnya impotensi, sakit, berpisah sementara), (6). Frekuensi senggama.

Tahap kedua adalah "*conception variable*", yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kemungkinan terjadinya konsepsi (*conception*), yaitu: (7). fekunditas atau infekunditas yang disebabkan hal-hal yang tidak disengaja; (8) pemakaian kontrasepsi; (9) fekunditas atau infekunditas yang disebabkan hal-hal yang disengaja (misal: sterilisasi).

Tahap ketiga adalah "*gestation variable*", yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kehamilan dan kelahiran, yaitu: (10) mortalitas janin karena sebab-sebab yang tidak disengaja; dan (11) Mortalitas janin karena sebab-sebab yang disengaja.

Menurut Ronald Freedman, "*intermediate variable*" sangat erat hubungannya dengan norma-norma sosial/masyarakat. Jadi pada akhirnya perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh norma yang ada.

Anak dilihat dari 2 segi yaitu segi kegunaan (*utility*) dan biaya (*cost*). Kegunaannya ialah memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut.

Apabila ada kenaikan pendapatan, aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua mengingikan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biaya (*cost*) nya naik. Sedangkan kegunaannya turun sebab walaupun anak masih memberikan kepuasan akan tetapi balas jasa ekonominya turun. Di samping itu orang tua juga tak tergantung dari sumbangan anak. Jadi biaya membesarkan anak lebih besar daripada kegunaannya. Hal ini mengakibatkan '*demand*' terhadap anak menurun atau dengan kata lain fertilitas turun.

Anak sebagai barang konsumsi tahan lama (*durable golds*). Orang tua mempunyai pilihan antara kuantitas dan kualitas anak. Kualitas diartikan pengeluaran (*biaya*) rata-rata untuk anak oleh suatu keluarga yang didasarkan atas 2 asumsi: (1) selera orang tua tidak berubah; dan (2) harga anak dan barang-barang konsumsi lainnya tidak dipengaruhi keputusan rumah tangga untuk berkonsumsi.

Kemudian ada juga beberapa faktor penentu dalam studi perbedaan fertilitas di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

Yang pertama adalah tempat tinggal wanita pada saat pencacahan. Pengamatan terhadap perbedaan fertilitas menurut tempat tinggal (kota-pedesaan), menunjukkan bahwa fertilitas di daerah kota sedikit lebih tinggi daripada di

pedesaan. Gavis Jones, memberikan ulasan mengenai tingginya tingkat fertilitas di kota mungkin disebabkan oleh tingginya tingkat '*memory lapse*' wanita pedesan dibandingkan wanita yang tinggal di daerah kota. Hatmadji, sebaliknya mempunyai pendapat bahwa fertilitas di jawa-pedesaan memang sedikit lebih tinggi daripada di jawa-kota. Mengingat perbedaannya hanya sedikit ini mungkin disebabkan oleh konsep urban/rural yang dipakai. Konsep tersebut lebih menekankan pada fasilitas fisik di suatu daerah daripada cara hidup penduduk yang tinggal di daerah tersebut.

Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap fertilitas tidak tepat seperti yang diperkirakan, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wanita, makin rendah fertilitasnya. Supraptilah dengan menggunakan data Survei Fertilitas Mortalitas Indonesia melaporkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dan fertilitas berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

Yang ketiga adalah umur perkawinan pertama. Sejalan dengan pemikiran bahwa makin muda seseorang melakukan perkawinan makin panjang masa reproduksinya maka dapat diharapkan makin muda seseorang melangsungkan perkawinannya makin banyak pula anak yang dilahirkan, jadi hubungan antara umur perkawinan dan fertilitas negatif. Hipotesis ini mendapat dukungan peneliti-peneliti dalam penemuan atas studi-studinya.

Yang keempat adalah pengalaman bekerja. Ukuran yang dipakai untuk faktor pengalaman bekerja berbeda-beda misalnya jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, status

pekerjaan, kegiatan yang biasanya dilakukan (*usual activity*). Wanita yang mengurus rumah tangga saja cenderung memiliki anak lebih banyak sedangkan wanita yang bekerja mempunyai anak lebih sedikit. Penggolongan yang mereka lakukan atas kegiatan yang biasanya dilakukan adalah wanita yang bekerja, mencari pekerjaan, dan mengurus rumah tangga. Selanjutnya Harijati Hatmadji menambahkan bahwa perbedaan jumlah anak yang dilahirkan antara wanita yang bekerja dan yang mengurus rumah tangga lebih besar di kota daripada di pedesaan.

Hubungan Langsung dan Tidak Langsung dalam Fertilitas

Teori Freedman menyatakan bahwa fertilitas dipengaruhi oleh faktor sosial, demografi, ekonomi, norma, lingkungan yang merupakan faktor tidak langsung yang memengaruhi fertilitas melalui faktor langsung. Faktor-faktor yang langsung memengaruhi fertilitas disebut sebagai "*intermediate variable*" atau "*proximate determinant*".

Faktor penentu fertilitas secara langsung dan tidak langsung sebagai variabel independen. Adapun faktor tidak langsung adalah: pendidikan kegiatan utama; jenis pekerjaan; kuintil kekayaan sebagai faktor sosial ekonomi; jumlah anak yang meninggal; faktor norma (jumlah anak yang diinginkan, jenis kelamin anak yang diinginkan, jumlah anak yang diinginkan pasangan, pendapat pasangan terhadap ber-KB, keputusan ber-KB); faktor lingkungan (terpapar terhadap media tentang KB); faktor demografi sebagai variabel kontrol (umur WUS dan tempat tinggal).

Sementara itu faktor langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Faktor yang memengaruhi terjadinya kehamilan (intercourse): umur pertama kali melakukan hubungan seksual, umur kawin pertama, status perkawinan. Yang kedua adalah faktor konsepsi (*conception*), yaitu pemakaian kontrasepsi, kesuburan/segera haid setelah melahirkan, segera melakukan hubungan seksual setelah melahirkan, umur pertama melahirkan, infertilitas, ASI eksklusif. Dan yang ketiga adalah faktor kehamilan (*gestation*): aborsi.

Terdapat dampak negatif dan positif pada fertilitas atau kelahiran. Berikut adalah dampak negatif dari fertilitas antara lain sebagai berikut.

1. Persaingan lapangan pekerjaan. Persaingan lapangan pekerjaan ini di sebabkan oleh pertumbuhan penduduk di negara kita yang sangat tinggi dan rupanya pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah selama ini sehingga yang terjadi adalah bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia.
2. Persaingan untuk mendapatkan pemukiman. Persaingan untuk mendapat permukiman yang layak ini biasa terjadi di daerah perkotaan yang padat, dan permasalahan seperti ini biasa terjadi karena perumahan yang tidak memadai dan kondisi rumah yang sudah tak layak huni. Namun tidak semua masyarakat bersaing untuk mendapatkan pemukiman yang layak , nyatanya banyak juga masyarakat yang memilih tetap tinggal yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya dengan alasan

sudah terbiasa dan warisan dari nenek moyang sehingga mereka enggan untuk meninggalkannya.

3. Meningkatnya jumlah kemiskinan. Dampak dari kepadatan penduduk selanjutnya adalah meningkatnya jumlah kemiskinan. Meningkatnya jumlah kemiskinan ini disebabkan oleh kurang berkembangnya kreativitas dari masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri, hal tersebut bukan tanpa alasan karena untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang mana untuk mendapatkan itu semua masyarakat membutuhkan sarana pendidikan, sedangkan di negeri kita ini sarana pendidikan masih belum dapat dirasakan semua rakyatnya karena faktor kemiskinan.
4. Rendahnya kesempatan pendidikan. Di negara kita ini memiliki tingkat kelahiran yang tinggi namun tidak didampingi dengan tingkat kematian, dengan demikian tentu semakin banyak fasilitas dan jumlah tenaga kerja guru yang diperlukan, namun sebagai hasilnya tidak setiap anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak dan memadai.

Dampak Positif dari Fertilitas antara lain sebagai berikut.

1. Berlimpahnya sumber daya manusia. Kita bisa memanfaatkannya sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dari negara kita sendiri, tanpa membutuhkan tenaga dari luar negeri untuk memakmurkan bangsa ini sendiri dan bisa mengirim tenaga kerja dari Indonesia ke luar negeri, karena berlimpahnya ketersediaannya Sumber Daya Manusia dari Indonesia itu sendiri.

2. Dapat meningkatkan produksi. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia, berarti banyak pula tenaga pekerja-pekerja di Indonesia yang memproduksi suatu kebutuhan hidup untuk masyarakat Indonesia itu sendiri, tanpa harus membutuhkan produksi dari luar negeri yang tidak kalah saing hasil produktivitasnya.
3. Meningkatkan solidaritas antarbangsa. Bertambahnya penduduk, berarti makin banyak juga aneka ragam suku bangsa di tanah air ini, kita bisa meningkatkan solidaritas antarsesama bangsa setanah air untuk mempersatukan jiwa tanah air, dengan bersosialisasi antarsesama, sehingga dapat mencapai tujuan bangsa bersama sama dengan jiwa solidaritas yang tinggi.
4. Kesempatan berwirausaha menjadi lebih besar. Banyaknya jumlah penduduk bisa dimanfaatkan untuk berwirausaha, dalam kata lain dapat membuka lapangan kerja baru bagi sebagian besar penduduk di Indonesia, sehingga dapat memproduksi suatu barang atau teknologi yang berguna untuk bangsa itu sendiri, dan memajukan bangsa Indonesia yang saat ini masih dikategorikan sebagai negara berkembang.

Pengukuran Fertilitas Tahunan

Pengukuran fertilitas tahunan hampir sama dengan pengukuran mortalitas. Pengukuran fertilitas tahunan meliputi hal-hal berikut ini.

***Angka Kelahiran Kasar* (*Crude Birth Rate*).**

Angka kelahiran kasar yaitu jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun dan merupakan ukuran fertilitas yang paling sederhana

karena data yang diperlukan hanya jumlah kelahiran dan dan jumlah seluruh penduduk.

Rumusnya adalah:

$$CBR = \frac{B}{Pm}\ x\ k$$

Keterangan:

CBR = *Crude Bride Rate* atau Tingkat Fertilitas Kasar
Pm = Penduduk Pertengahan tahun
K = Bilangan konstanta yang biasanya bernilai 1.000
B = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu

Contoh:

Berdasarkan sensus 2010 di Sumatera Selatan terdapat jumlah penduduk 25 juta jiwa dan banyaknya bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapakah CBR Sumatera Selatan?

$$CBR = \frac{B}{Pm}\ x\ k$$

$$CBR = \frac{500.000}{25.000.000}\ x\ 1000$$

CBR = 20

Artinya, setiap 1000 penduduk terdapat 20 kelahiran.

Angka Ferilitas Umum (General Fertility Rate)

Membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk wanita usia 15 – 49 tahun karena penduduk yang mempunyai risiko hamil adalah wanita dalam usia reproduksi (umur 15 – 49 tahun).

Rumusnya:

$$GFR = \frac{B}{Pf\ (15-49)}\ x\ k$$

Keterangan:

GFR = Angka fertilitas umum
B = Jumlah kelahiran
Pf (15-49) = Jumlah penduduk wanita umur 15-49 tahun pada pertengahan tahun
k = biasanya 1000

Contoh:

Penduduk Negara X pada pertengahan tahun 2011 sebesar 200 juta, penduduk wanita umur 15 – 49 tahun sebesar 40 juta, sedangkan jumlah kelahiran selama tahun 2011 = 8 juta.
Berapa GFR-nya ?

Jawab :

$$GFR = \frac{B}{Pf\ (15-49)}\ x\ k$$

$$GFR = \frac{8.000.000}{40.000.000}\ x\ 1000$$

GFR = 200

Artinya tiap 1.000 wanita umur 15 – 49 tahun selama satu tahun melahirkan 200 bayi.

Angka Fertilitas Khusus Menurut Umur (Age Specific Fertility Rates).

Apabila (sebagai tambahan penduduk wanita yang diklasifikasikan menurut umur) data jumlah kelahiran menurut umur ibu sudah tersedia, maka pola angka kelahiran khusus menurut umur akan dapat dihitung dengan cara membagi jumlah kelahiran oleh ibu yang tercakup di dalam setiap umur (atau kelompok umur) dengan jumlah wanita yang tercakup pada umur (kelompok umur) itu di dalam suatu jumlah penduduk tertentu.

Rumus:

$$ASFR = \frac{Bi}{Pfi}\ x\ k$$

Keterangan:

ASFR = Angka Kesuburan wanita
Bi = Jumlah Kelahiran dari kelompok x
Pfi = Jumlah Perempuan pada kelompok umur f
k = angka konstanta = 1000

Contoh:

Jumlah Kelahiran dari kelompok umur 15-49 tahun berjumlah 8.920. Jumlah Perempuan pada kelompok tersebut 150.000, Hitunglah ASFR ?

Jawab :

$$ASFR = \frac{BI}{PFi}\ x\ k$$

$$ASFR = \frac{8.920}{150.000}\ x\ 1000$$

$$= 66$$

Jadi jumlah kesuburan pada tahun tersebut sebanyak 66 jiwa.

Dampak Fertilitas terhadap Ekonomi

Jumlah anak merupakan variabel tidak langsung yang berhubungan dengan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan kehidupannya. Dalam beberapa kajian sering kali jumlah anak ini dikaitkan dengan beban keluarga dan di lapangan faktanya menjadi tidak sederhana karena parameter yang digunakan oleh sebuah keluarga untuk menilai atau menjelaskan apakah anak menjadi beban atau tidak bagi keluarga menjadi sangat luas dimensinya.

Untuk itu Indonesia harus memiliki *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang meliputi fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Kondisi yang diinginkan adalah penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat tercapainya penduduk tanpa pertumbuhan, di mana tingkat fertilitas, mortalitas semakin menurun, dan persebaran lebih merata. Dalam hal fertilitas adalah tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2015 dan terus berlanjut hingga tahun 2035. Untuk mencapai Kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) 2,1 per wanita atau *net reproduction ratio* (NRR) sebesar 1 per wanita pada tahun 2015. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan lebih mudah dicapai apabila anak pada keluarga inti jumlahnya ideal, yaitu "dua anak lebih baik", dengan cara mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak. Tingkat fertilitas di suatu negara dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi atau karakteristik lainnya.

Leibenstein mengatakan bahwa mempunyai anak dapat dilihat dari dua segi ekonomi, yaitu segi kegunaan (*utility*) dan biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan merawat anak. Apabila ada kenaikan pendapatan orang tua, maka aspirasi untuk mempunyai anak akan berubah, lebih menginginkan kualitas yang lebih baik daripada kuantitas. Umur kawin pertama dapat menjadi indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Perempuan yang kawin usia muda mempunyai rentang waktu untuk hamil dan melahirkan lebih panjang dibandingkan dengan mereka yang kawin pada umur lebih tua dan mempunyai lebih banyak anak. Berdasarkan SDKI (2007) rata-rata usia kawin pertama adalah 18,1, sedangkan idealnya adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dalam Undang-Undang tahun 2006, dinyatakan bahwa usia perkawinan untuk perempuan 16 tahun dan pria 19 tahun.

Pertambahan penduduk dapat dipengaruhi juga karena faktor kelahiran yang tidak direncanakan akibat tidak turut serta ber-KB atau yang disebut dengan *unmet need*. Pengertian persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Kejadian kehamilan yang tidak diinginkan lebih banyak terjadi pada pasangan yang mempunyai anak lebih dari 2 (>2) orang karena tidak menggunakan alat kontrasepsi. Di Indonesia pada tahun 2011 partisipasi pasangan usia subur (PUS) ber KB hanya mencapai 61,4 %, dengan *unmet need* sebesar 9,1 persen.

Jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas SDM yang baik akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara, sehingga diperlukan upaya penurunan tingkat fertilitas. Salah satu cara menurunkan tingkat fertilitas yaitu dengan penundaan kelahiran anak pertama. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji gambaran umum penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran umum penundaan kelahiran anak pertama. Selain itu, metode regresi logistik biner digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil analisis menunjukkan variabel sosial ekonomi yang berpengaruh signifikan adalah pekerjaan suami di sektor nonpertanian. Sementara itu, variabel demografi yang berpengaruh signifikan terhadap penundaan kelahiran anak pertama di wilayah perdesaan Indonesia adalah umur kawin pertama dan persepsi jumlah anak ideal.

Kondisi TFR tersebut menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi tinggi, serta berakibat pada meningkatnya angka kelahiran. Apabila angka kelahiran tidak terkendali maka jumlah penduduk akan semakin besar. Namun, jumlah penduduk yang besar di Indonesia belum diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya (SDM). Kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sehubungan dengan pengendalian kelahiran, transisi penurunan fertilitas terjadi ketika ada transisi dari suatu populasi dengan kesuburan alami ke populasi yang kesuburannya dikendalikan. Penundaan kelahiran anak

pertama berpengaruh terhadap penurunan fertilitas. Interval kelahiran anak pertama merupakan salah satu faktor yang penting dalam memengaruhi fertilitas pada masyarakat dengan tingkat penggunaan kontrasepsi yang rendah. Pada usia kawin yang ideal, semakin panjang interval kelahiran anak pertama maka akan memperlambat laju pertumbuhan penduduk.

Adapun di antara berbagai faktor yang memengaruhi penundaan kelahiran anak yakni faktor sosial ekonomi seperti pendidikan responden, status bekerja wanita, status ekonomi, pendidikan suami, pekerjaan suami, faktor budaya yaitu wilayah, daerah tempat tinggal, dan faktor demografi seperti usia perkawinan pertama berpengaruh terhadap lamanya waktu menikah hingga kelahiran anak pertama.

Tugas

Amatilah dan observasilah keluarga Saudara. Lingkup keluarga ini termasuk jumlah saudara ayah dan jumlah keluarga saudara ibu. Selanjutnya buatlah perhitungan fertilitas pada keluarga-keluarga Saudara tersebut. Gunakan rumus perhitungan fertilitas dengan memperhatikan dan menggunakan: (1) Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*); (2) Angka Ferilitas Umum (*General Fertility Rate*); (3) dan (4) Angka Fertilitas Khusus Menurut Umur (*Age Specific Fertility Rates*) seperti yang kita pelajari di bab ini.

BAB V
MORTALITAS

Pendahuluan

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen demografi yang dapat memengaruhi perubahan penduduk. Kedua komponen demografi yang lainnya adalah fertilitas (kelahiran) dan migrasi. Informasi tentang kematian itu penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi pihak swasta yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan kesehatan.

Mortalitas atau kematian dapat menimpa siapa saja, tua, muda, kapan dan di mana saja. Kasus kematian terutama dalam jumlah banyak berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, adat istiadat maupun masalah kesehatan lingkungan. Indikator kematian berguna untuk memonitor kinerja pemerintah pusat maupun lokal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan. Misalnya, perencanaan fasilitas perumahan, fasilitas pendidikan, dan jasa-jasa lainnya untuk kepentingan masyarakat. Data kematian juga diperlukan untuk kepentingan evaluasi terhadap program-program kebijaksanaan penduduk.

Dokumen *International Conference on Population and Development* (ICPD) yang dirumuskan pada 1994 menyebutkan bahwa permasalahan kependudukan yang terjadi di sebagian besar penduduk dunia harus segera

diselesaikan. Permasalahan tersebut meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi, IMR dan CMR yang tinggi, fertilitas dan KB, kesehatan reproduksi dan ibu hamil, akses pendidikan yang terbatas, permasalahan lansia serta permasalahan imigrasi dan urbanisasi. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, mortalitas menjadi salah satu kajian yang sangat menarik untuk dibahas karena menjadi salah satu target dalam pembangunan manusia satu negara.

Berbagai indikator disusun untuk melihat seberapa besar pencapaian pembangunan manusia dalam kaitannya dengan mortalitas. Tercatat dalam beberapa kesepakatan internasional target beberapa indikator mortalitas menjadi pagu yang harus dicapai bagi tiap-tiap negara di dunia, termasuk di dalamnya adalah dokumen ICPD pada 1994 dan MGDs pada tahun 2000. Indikator mortalitas yang digunakan sebagai kesepakatan tersebut meliputi angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu dan HIV/AIDS.

Indonesia sebagai bagian dari negara-negara dunia memiliki kewajiban untuk mencapai target yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini target dari indikator mortalitas sebagai salah satu komponen pembangunan manusia harus dicapai sebagai wujud komitmen terhadap dunia internasional. Misalnya salah satu target mortalitas adalah angka harapan hidup. Pada 1997 dalam "Resolusi WHO dengan tema *Health for all by 2000"* menyatakan bahwa pada tahun 2000 seluruh negara-negara di dunia harus mencapai rata-rata angka harapan hidup bagi warganya menjadi 60 tahun. Target pencapaian angka harapan hidup

tersebut kemudian meningkat pada kesepakatan global berikutnya yaitu ICPD tahun 1994. Dalam kesepakatan bersama dalam ICPD disebutkan bahwa seluruh negara-negara di dunia harus mencapai rata-rata angka harapan hidup bagi warganya menjadi berumur lebih dari 65 tahun. Pada tahun 2005 harapan hidup yang telah ditetapkan tersebut harus dipenuhi bagi Indonesia agar pembangunan manusianya tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain di dunia. Selain angka harapan hidup, target indikator lainnya juga harus dipenuhi.

Untuk itu maka dibutuhkan berbagai macam informasi (data) yang cukup banyak dan diamati dalam periode waktu yang relatif cukup panjang. Hal ini menjadi penting sebagai salah satu langkah dalam penciptaan pembangunan yang berkelanjutan yang tepat sasaran khususnya dalam bidang pembangunan manusia dalam kaitannya dengan mortalitas. Dengan berpijak pada hal tersebut maka ditentukan judul penelitian Mortalitas.

Konsep Mortalitas

Mortalitas atau kematian merupakan salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk, dua komponen yang lainnya adalah kelahiran (f*ertilitas*) dan mobilitas penduduk. Kematian dapat diartikan sebagai peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Konsep-konsep lain yang terkait dengan pengertian mortalitas adalah sebagai berikut.

1. *Neo-natal death* adalah kematian yang terjadi pada bayi yang belum berumur satu bulan.
2. Lahir mati (*still birth*) atau yang sering disebut kematian janin (*fetal death*) adalah kematian sebelum dikeluarkannya secara lengkap bayi dari ibunya pada saat dilahurkan tanpa melihat lamanya dalam kandungan.
3. *Post neo-natal* adalah kematian anak yang berumur antara satu bulan sampai dengan kurang dari satu tahun.
4. *Infant death* (kematian bayi) adalah kematian anak sebelum mencapai umur satu tahun.

Faktor-faktor yang memengaruhi kematian dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

1. Faktor langsung (faktor dari dalam). Faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: umur, jenis kelamin, penyakit, kecelakaan, kekerasan, bunuh diri.
2. Faktor tidak langsung (faktor dari luar). Faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu: Tekanan, baik psikis maupun fisik, Kedudukan dalam perkawinan, Kedudukan sosial-ekonomi, Tingkat pendidikan, Pekerjaan, Beban anak yang dilahirkan, Tempat tinggal dan lingkungan, Tingkat pencemaran lingkungan, Fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit dan Politik dan bencana alam.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Mortalitas

Angka kematian bayi dan balita di Indonesia tertinggi di negara ASEAN. Tiap tahun 12,9 juta anak meninggal, 28% kematian disebabkan karena pneumonia, 23% karena penyakit diare, dan 16% karena penyakit tidak memperoleh vaksinasi. Penyebab angka kesakitan dan kematian anak terbanyak saat ini masih diakibatkan oleh pneumonia dan diare. Pencegahan sederhana dan dapat diperoleh seperti vaksin, antibiotik, terapi rehidrasi oral, kontrasepsi, dapat mencegah 25 – 90% kematian karena penyebab spesifik. Secara keseluruhan 65% kematian anak bisa di cegah dengan biaya murah.

Penyebab-penyebab kematian ibu dan bayi dipengaruhi oleh lima faktor: (1) pendidikan; (2) lingkungan; (3) ekonomi; (4) minimnya tenaga medis; dan adat istiadat.

Yang pertama adalah faktor pendidikan. Angka kematian ibu yang begitu tinggi salah satunya karena tingkat pendidikan para ibu di Indonesia yang masih sangat rendah. Jika kita melihat dari jenjang pendidikan, data Badan Pusat Statistik tahun 2010 menyatakan bahwa mayoritas ibu di Indonesia yang tidak memiliki ijazah SD sebesar 33,34 persen. Selanjutnya sebanyak 30,16% ibu hanya memiliki ijazah SD atau sederajat. Dan hanya terdapat 16,78% ibu yang berpendidikan setara SMA. Hanya 7,07% ibu yang berpendidikan perguruan tinggi. Penyerapan informasi yang beragam dan berbeda sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seorang ibu. Latar pendidikan formal serta informal akan sangat berpengaruh pada seluruh aspek

kehidupan para ibu mulai dari segi pikiran, perasaan maupun tindakannya.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi calon ayah dan calon ibu akan mampu merencanakan kehamilan dengan baik sehingga bisa terhindar dari *4 Terlalu*: yaitu melahirkan *terlalu* muda (di bawah 20 tahun), *terlalu* tua (di atas 35 tahun), *terlalu* dekat (jarak melahirkan kurang dari 2 tahun) dan *terlalu* banyak (lebih dari 4 kali). Dalam penanganan kehamilan dan persalinan pun pendidikan akan sangat penting agar bisa terhindar dari faktor risiko *3 Terlambat*: yaitu *terlambat* mengambil keputusan di tingkat keluarga, *terlambat* merujuk/transportasi dan *terlambat* mendapat pelayanan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang ibu, maka akan semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap proses sebelum kehamilan dan setelah kehamilannya, sehingga untuk menjaga agar dirinya sehat dalam masa kehamilan, maka ibu tersebut pasti akan melaporkan dan memeriksakan dirinya kepada tenaga medis yang ahli di bidangnya. Dan sebaliknya, jika pendidikan seorang ibu rendah seperti yang banyak terjadi di Indonesia, maka kesehatannya selama masa kehamilan tidak begitu diperhatikan. Oleh sebab itu banyak terjadi kematian pada ibu melahirkan yang disebabkan kesadaran akan kesehatan yang rendah.

Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi KIA. Banyak aspek yang memengaruhi KIA yang dapat dilihat dalam suatu lingkungan. Dalam hubungannya dengan meningkatnya kasus kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas), lingkungan yang

dibahas adalah aspek geografis. Kondisi geografis suatu lingkungan memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan itu sendiri. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti sulit terjangkau oleh sarana transportasi tentu saja mengakibatkan sulitnya sarana dan tenaga kesehatan untuk menjangkau daerah tersebut. Imbasnya, kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan tersebut akan terbengkalai, masyarakat akan minim dalam sarana kesehatan, dan banyak ibu yang mengalami kesulitan selama masa kehamilan, melahirkan dan juga nifas, sehingga angka kematian ibu (hamil, melahirkan, dan nifas) akan terus bertambah besar.

Faktor ketiga adalah ekonomi. Kondisi keuangan yang tidak mencukupi tentu menyulitkan para ibu (hamil, melahirkan dan nifas) untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai. Oleh sebab itu, mereka cenderung tidak memeriksakan kesehatan dirinya sebelum kehamilan hingga setelah kehamilan. Akibatnya, banyak ibu yang meninggal saat melahirkan karena penyakit yang baru diketahui ketika akan melahirkan.

Selanjutnya yang keempat adalah minimnya tenaga medis. Salah satu faktor tingginya KIA di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan. Departemen Kesehatan menetapkan target 90 persen persalinan ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010. Perbandingan dengan hasil survei SDKI bahwa persalinan yang ditolong oleh tenaga medis profesional meningkat dari 66 persen dalam SDKI 2002–2003 menjadi 73 persen dalam SDKI 2007. Angka ini relatif rendah

apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Dengan cukupnya tenaga medis diharapkan persoalan berupa *kevalidan* data dan kasus yang tidak tersentuh dapat dikurangi sehingga dapat mengurangi angka AKI.

Terakhir yang kelima adalah adat istiadat. Pada kasus kematian ibu akibat perdarahan, faktor budaya berpengaruh terhadap tingginya angka kematian ibu. Adalah kecenderungan bagi ibu di perdesaan dan keluarga miskin untuk melahirkan dengan bantuan dukun beranak, bukan dengan bantuan petugas medis yang telah disediakan. Ada pula tradisi suku tertentu yang mengharuskan ibu nifas ditempatkan dalam suatu tempat yang dapat dikatakan kurang higienis.

Faktor-faktor yang memengaruhi kematian dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor langsung (faktor dari dalam), yakni: umur; jenis kelamin; penyakit; kecelakaan; kekerasan; bunuh diri.
2. Faktor tidak langsung (faktor dari luar), yakni: tekanan (baik psikis maupun fisik); kedudukan dalam perkawinan; kedudukan sosial-ekonomi; tingkat pendidikan; pekerjaan; beban anak yang dilahirkan; tempat tinggal dan lingkungan; tingkat pencemaran lingkungan; fasilitas kesehatan dan kemampuan mencegah penyakit; politik; dan bencana alam.

Indikator Mortalitas

Indikator mortalitas merupakan angka atau indeks, yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat kematian suatu penduduk. Ada berbagai macam ukuran kematian, mulai dari yang paling sederhana sampai yang cukup kompleks. Namun demikian perlu dicatat bahwa keadaan kematian suatu penduduk tidaklah dapat diwakili oleh hanya suatu angka tunggal. Biasanya berbagai macam ukuran kematian dipakai sekaligus guna mencerminkan keadaan kematian penduduk secara keseluruhan. Hampir semua ukuran kematian merupakan suatu "*rate*" atau "*ratio*". *Rate* merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian (misalnya kematian, kelahiran, sakit, dan sebagainya) selama periode waktu-waktu tertentu.

Kematian (mortalitas) adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi tiap saat setelah kelahiran hidup. (Budi Utomo, 1985). Morbiditas (penyakit/kesakitan) adalah kondisi penyimpangan dari keadaan yang normal, yang biasanya dibatasi pada kesehatan fisik dan mental. Pada kasus tertentu morbiditas ini terjadi secara terus menerus (morbiditas kumulatif) yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian pada penderitanya.

Ada beberapa cara pengukuran angka kematian di antaranya adalah sebagai berikut.

Tingkat Kematian Kasar (Crude Death Rate)

Tingkat kematian kasar adalah banyaknya kematian pada tahun tertentu, tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun.

Rumusnya

$$CDR = \frac{D}{P}\ x\ k$$

Keterangan:

D = jumlah kematian pada tahun x

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun x

k = konstanta 1000

Tingkat kematian ini dapat digolongkan dalam kriteria sebagai berikut:

Tingkat kematian Golongan

> 18 Tinggi

14–18 Sedang

9–13 Rendah

Tingkat Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate)

Tingkat kematian menurut umur adalah jumlah kematian penduduk pada tahun tertentu berdasarkan klasifikasi umur tertentu.

Rumus:

$$ASDR = \frac{Di}{Pmi}\ x\ k$$

Keterangan

Di = jumlah kematian pada kelompok umur (i)

Pmi = jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada kelompok umur (i)

k = angka konstan (1000)

Tingkat Kematian Bayi (Infant Death Rate (IDR)

Bayi (*infant*) merupakan orang yang berumur 0 (nol) tahun atau dalam kata lain anak-anak yang masih belum sampai pada hari ulang tahunnya yang pertama. Angka kematian bayi merupakan variabel sosial ekonomis dan demografis yang sangat penting karena data tersebut dapat menunjukkan banyaknya fasilitas medis dan taraf kehidupan penduduk.

Rumusnya:

$$IMR = \frac{Do}{B}\ x\ k$$

Keterangan:

Do = Jumlah kematian bayi pada tahun tertentu

B = Jumlah lahir hidup pada tahun tertentu

k = bilangan konstan (1000)

Kriteria penggolongan tingkat kematian bayi:

Tingkat kematian bayi Golongan

> 125 Sangat Tinggi

75-125 Tinggi

35-75 Sedang

<35 Rendah

Tingkat Kematian Anak

Tingkat kematian anak didefinisikan sebagai jumlah kematian anak berumur 1 sampai 4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Dengan demikian, angka kematian anak tidak menyertakan angka kematian bayi. Angka kematian anak lebih merefleksikan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung memengaruhi tingkat kesehatan anak.

Angka Kematian Ibu

Angka kematian ibu adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas dalam satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dengan persen atau permil.

Rumusnya

$$AKI = \frac{Pf}{P}\ x\ 100$$

Keterangan

Pf = Jumlah kematian ibu karena kehamilan, kelahiran dan nifas

P = Jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama

Sumber Data Mortalitas

Cara mengetahui sumber data kematian dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, antara lain sebagai berikut.

Sistem registrasi vital

Apabila sistem ini bekerja dengan baik merupakan sumber data kematian yang ideal. Di sini, kejadian kematian dilaporkan dan dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Di Indonesia, belum ada sistem registrasi vital yang bersifat nasional, yang ada hanya sistem registrasi vital yang bersifat lokal, dan hal ini tidak sepenuhnya meliputi semua kejadian kematian pada kota-kota itu sendiri. Dengan demikian di Indonesia tidak mungkin memperoleh data kematian yang baik dari sistem registrasi vital.

Sensus dan survei penduduk

Sensus dan survei penduduk merupakan kegiatan sesaat yang bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk, termasuk pula data kematian. Berbeda dengan sistem registrasi vital, pada sensus atau survei kejadian kematian

dicacat setelah sekian lama peristiwa kejadian itu terjadi. Data ini diperoleh melalui sensus atau survei dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu bentuk langsung (*Direct Mortality Data*) dan bentuk tidak langsung (*Indirect Mortalilty Data*). Dalam bentuk langsung, data kematian bentuk langsung diperoleh dengan menanyakan kepada responden tentang ada tidaknya kematian selama kurun waktu tertentu. Apabila ada tidaknya kematian tersebut dibatasi selama satu tahun terakhir menjelang waktu sensus atau survei dilakukan, data kematian yang diperoleh dikenal sebagai "*Current mortality Data*".

Dalam bentuk tidak langsung (*Indirect Mortalilty Data*)**,** data kematian bentuk tidak langsung diperoleh melalui pertanyaan tentang 'S*urvivorship*' golongan penduduk tertentu misalnya anak, ibu, ayah dan sebagainya. Dalam kenyataannya, data ini mempunyai kualitas lebih baik dibandingkan dengan data bentuk langsung. Oleh sebab itu data kematian yang sering dipakai di Indonesia adalah data kematian bentuk tidak langsung dan biasanya yaitu data 'S*urvivorship*' anak. Selain sumber data di atas, data kematian untuk penduduk golongan tertentu di suatu tempat, kemungkinan dapat diperoleh dari rumah sakit, dinas pemakaman, kantor polisi lalu lintas dan sebagainya.

Penelitian

Penelitian kematian penduduk biasanya dilakukan bersamaan dengan penelitian kelahiran yang disebut dengan penelitian statistik vital.

Perkiraan (Estimasi)

Tingkat kematian dapat diperkirakan menggunakan pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung tersebut dilakukan dengan cara mengamati tahapan kehidupan dari waktu ke waktu. Pendekatan tidak langsung ini memiliki tiga kesulitan utama yaitu terbatasnya sumber daya untuk memastikan data dan disertai kesalahan pada sampling, tingkat mobilitas remaja yang tinggi menyebabkan remaja terhindar dari sampling, dan tidak perkiraan struktur kematian yang tidak mudah.

Mortalitas dan Teori Kelangsungan Hidup

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup anak menjadi dua yaitu: (1) variabel yang dianggap eksogenus atau sosial ekonomi seperti budaya, sosial-ekonomi, masyarakat dan faktor regional; (2) Variabel endogenus atau faktor *biomedical* seperti pola pemberian ASI, kebersihan, sanitasi dan nutrisi.

Hubungan antara karakteristik sosial-ekonomi dengan angka kematian anak sangat kuat, walaupun masih merupakan "*Black Box*" mengenai mekanisme pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap angka kematian anak dalam penelitian sosial. Faktor medis yang menyebabkan kematian anak tidak dapat dimasukkan ke dalam ranah penelitian sosial, melainkan ke dalam penelitian medis. Faktor medis tersebut lebih difokuskan pada proses biologi dari penyakit seperti penyakit yang menyebabkan kematian anak (infeksi, diare, dan kurang gizi).

Pendekatan variabel antara atau determinan terdekat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sejumlah faktor sosial ekonomi dapat memengaruhi kelangsungan hidup anak. Kunci dari pendekatan ini adalah identifikasi serangkaian determinan terdekat atau variabel antara yang secara langsung memengaruhi risiko morbiditas dan mortalitas. Semua determinan sosial dan ekonomi harus melalui variabel antara untuk dapat memengaruhi kelangsungan hidup anak. Variabel antara ini dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut.

Faktor ibu

Faktor ibu meliputi umur, paritas, dan jarak kelahiran. Masing-masing faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap hasil kehamilan dan kelangsungan hidup bayi. Selain itu, dimungkinkan juga terdapat sinergisme di antara variabel-variabel faktor ibu, misalnya jarak kelahiran yang dekat ditambah dengan umur ibu yang muda.

Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan berkaitan dengan penularan penyakit kepada anak dan ibu. Empat kategori yang menggambarkan jalur-jalur utama penularan penyakit ke sekelompok besar penduduk meliputi : udara, makanan, air, dan jari, kulit, tanah dan benda mati, serangga, parasit dan virus.

Kekurangan gizi

Kekurangan gizi berhubungan dengan kalori, protein, dan gizi mikro. Kelangsungan hidup anak tidak hanya dipengaruhi oleh tersedianya gizi bagi anak melainkan juga bagi ibu. Gizi dan diet ibu selama hamil akan memengaruhi berat bayi yang

dilahirkan. Gizi ibu juga akan memengaruhi jumlah dan kualitas gizi air susu ibu selama masa menyusui.

Luka Kecelakaan ataupun Tidak Disengaja

Luka kecelakaan sering dianggap sebagai kejadian kebetulan, namun tingkat dan pola terjadinya suatu kecelakaan dapat mencerminkan risiko lingkungan yang berbeda-beda, sesuai dengan konteks lingkungan dan sosial ekonominya.

Pengendalian Penyakit Perorangan

Salah satu komponen dalam pengendalian penyakit perorangan adalah tindakan preventif yang diambil oleh orang sehat untuk mencegah penyakit. Tindakan preventif yang dilakukan bermacam-macam meliputi tingkah laku tradisional seperti mengikuti hal tabu dalam masyarakat sesuai dengan budaya masing-masing. Tindakan preventif secara modern yang berhubungan dengan kelangsungan hidup anak antara lain imunisasi, pencegahan malaria, dan perawatan antenatal.

Kesehatan dan Mortalitas

Secara umum dapat dimengerti bahwa kependudukan dan kesehatan saling berkaitan. Variabel-variabel kependudukan, misalnya tingkat kelahiran (*nartality*), dan kematian (*mortality*) memengaruhi dan dipengaruhi oleh kondisi kesehatan penduduk. Pengalaman kita selama ini menunjukkan tingkat signifikannya hubungan di antara keduanya, terlebih pada tingkat kematian pada kondisi tidak sehat pada individu.

Tindakan pemerintah untuk meningkatkan mutu kesehatan penduduk secara eksplisit dan langsung berhubungan dengan upaya menekan tingkat kematian dan morbiditas (tingkat ketersakitan). Hal itu secara tidak langsung berhubungan pula dengan upaya mengendalikan tingkat kelahiran. Di belakang tingkat kematian, morbiditas, dan kelahiran pendudukan terdapat variabel-variabel lain yang saling berhubungan dan memengaruhi. Maka kebijakan kependudukan di bidang kesehatan harus memperhatikan dan memperhitungkan keberadaannya. Pengaturan mengenai penurunan angka kematian telah dituangkan dengan jelas pada pasal 30-32 Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pada regulasi tersebut diwajibkan bagi pemerintah guna menciptakan kebijakan publik yang menekan dan mengurangi angka kematian dengan bantuan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan. Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur sosialnya yang selalu berubah. Oleh sebab itu

kebijakan publik juga perlu mementingkan perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat.

Model pemikiran hukum dan sosiologis tentang kebijakan publik merupakan pemahaman terhadap realitas sosial, di mana pembuatan, pemberlakuan dan pelaksanaan kebijakan publik harus mendasarkan dan mempertimbangkan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal itu dilakukan agar tujuan utama dari kebijakan tersebut dapat dicapai secara optimal. Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, sebagai dasar pelaksanaan, sekaligus tujuan (sasaran) dan pengguna hasil-hasil yang dicapai. Sebagai dasar pelaksanaan terkait dengan dasar kebijakan pembangunan. Dinamika kependudukan berpengaruh pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Ukuran tingkat dinamikanya digunakan penanda atau indikator yang terukur yang bisa dibaca, digunakan, dibandingkan bagi kepentingan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, misalnya: tingkat pertumbuhan pendudukan, tingkat kelahiran, kematian, tingkat angka kematian bayi, angka harapan hidup, tingkat kematian ibu dan sebagainya. Ketersediaan indikator kependudukan, tingkat pemahaman konseptual, terutama penggunaannya oleh pihak-pihak penyusunan dan pengelola pembangunan. Contohnya di bidang kesehatan yang sangat berarti bagi rumusan kebijakan dan pelaksanaannya.

Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-

Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum.

Beberapa faktor yang memengaruhi dan yang perlu disoroti yakni beberapa hal berikut ini.

Visi dan Arah Pembangunan

Visi dan Arah Pembangunan dari pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Sebelum ini arah kebijakan dan program-program kependudukan lebih banyak porsinya pada target kuantitatif, sehingga seolah merupakan harga mati untuk mencapai angka yang ditargetkan, hal ini berimbas pada pelaksanaan di lapangan yang kurang *down to earth* dan simpatik pada sasaran program (masyarakat), kini arahnya seharusnya diubah dari target kuantitatif menjadi target kualitatif (penduduk yang berkualitas).

Penduduk Sasaran Program

Penduduk yang menjadi sasaran program sering kali tidak tahu ke mana kebijakan yang membawa mereka berarah, pasalnya informasi dan transparansi publik dalam hal kependudukan kurang bisa diakses oleh kebanyakan orang, hanya terbatas pada pemerintah, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat saja. Apabila sanggup pun, data yang disajikan tidak begitu dan berkualitas, Badan Pusat Statistik yang kualitasnya dipercaya pun hanya mampu memberikan data dalam kala waktu tertentu, oleh karenanya, lembaga pemerintah seperti BKKBN seharusnya lebih mampu meningkatkan kualitas informasinya.

Reformasi Birokrasi

Perlunya reformasi birokrasi dalam hal kependudukan, sebelumnya banyak program dari lembaga pemerintah yang bergerak dalam ranah yang sama, hal ini kontan membuar masyarakat bingung. Badan seperti Bappenas, BKKBN, dan beberapa departemen lain seharusnya membuat program yang tidak tumpang tindih sehingga dapat berjalan efektif.

Keserasian Kerja

Perlunya keserasian kerja antara daerah dan pusat. Tidak hanya itu, hal ini juga dituntut efektif pada tingkat pemerintah desa dan daerah. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang secara filosofis telah sempurna pada tingkat pusat, dapat dihantarkan dengan baik pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa tanpa ada reduksi.

Isu Lama

Perhatian terhadap isu lama yang belum terselesaikan seharusnya lebih diutamakan, seperti isu perempuan, penduduk usia lanjut, penduduk miskin, dsb. Tentunya hal tersebut menjadi faktor penting mortalitas.

Khusus mengenai mortalitas, hal yang dipahami sejak awal yakni penurunan angka mortalitas dengan berbagai caranya merupakan suatu hak asasi manusia, artinya, usaha penurunan angka tersebut merupakan arahan kebijakan publik yang sesungguhnya di samping usaha penekanan jumlah penduduk. Diharapkan tidak saja fokus pada penekanan jumlah penduduk, namun tidak memperhatikan tingkat kematian penduduk, pemerintah harus menyediakan program yang menjamin hak-hak tersebut, antara lain dengan jaminan

kesehatan hingga ke pelosok daerah, penyediaan informasi demografi dan kesehatan yang memadai dan mudah diakses, serta pelayanan pascapenanganan. Usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menjadi penurun angka kematian penduduk di Indonesia.

Tugas

Amati dan observasilah keluarga Saudara. Lingkup keluarga ini termasuk jumlah saudara ayah dan jumlah keluarga saudara ibu. Selanjutnya buatlah perhitungan mortalitas pada keluarga-keluarga Saudara tersebut. Gunakan rumus perhitungan mortalitas dengan memperhatikan dan menggunakan: (1) Tingkat Kematian Kasar (*Crude Death Rate*); (2) Tingkat Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate*); (3) Tingkat Kematian Bayi (*Infant Death Rate* (IDR)/*Infant Mortality Rate* (IMR); (4) Tingkat Kematian Anak; (5) Angka kematian ibu seperti yang kita pelajari di bab ini.

BAB VI
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pendahuluan

Dalam demografi pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan merupakan salah satu variabel yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung memengaruhi pertumbuhan penduduk. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai perkawinan merupakan masukan bagi perencanaan pembangunan seperti penyediaan fasilitas perumahan bagi keluarga-keluarga muda, fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Perkawinan jika dilakukan pada umur yang "tepat" akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan pasangan suami dan istri yang menjalankan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan pada usia yang terlalu muda (dini) akan membawa banyak konsekuensi pada pasangan antara lain adalah dalam hal kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dalam hal kesehatan antara lain dalam hal kejiwaan, di mana perkawinan yang dilakukan pada usia dini akan lebih mudah berakhir dengan kegagalan karena ketiadaan kesiapan mental menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dengan semua tanggung jawab, seperti antara lain tanggung jawab mengatur atau mengurus rumah tangga, mencakupi ekonomi rumah tangga, mengasuh, dan mendidik anak.

Selain memerlukan kesiapan mental, perkawinan terutama bagi anak perempuan merupakan persiapan untuk memasuki tahap kehamilan dan kelahiran. Dari segi kesehatan

seorang perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia terlalu muda secara fisik belum sempurna perkembangan semua organ tubuhnya. Perempuan yang masih berusia muda secara fisik perkembangan tulang panggulnya belum sempurna untuk menjadi jalan lahir bagi bayi yang dikandungnya.

Pengertian Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan merupakan suatu perubahan dari status perkawinan lain menjadi status "kawin", misalnya perubahan status "belum kawin" atau bujangan (*single*) menjadi status "kawin" atau nikah. Sedangkan perceraian adalah perubahan dari status kawin menjadi janda atau duda, baik karena kematian maupun perceraian hidup.

Pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia, dan sejahtera.

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela. Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridai Allah SWT.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan/perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bertolak dengan pernikahan, kita mengenal istilah perceraian. Menurut kamus Bahasa Indonesia, perceraian berarti (1) perpisahan; (2) perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.

Secara umum, perceraian didefinisikan sebagai perubahan dari status kawin menjadi janda atau duda, baik karena kematian maupun perceraian hidup atau pembubaran yang sah dari suatu perkawinan dan perpisahan antara suami istri oleh surat keputusan pengadilan yang memberikan hak kepada masing-masing untuk melakukan perkawinan ulang menurut hukum sipil dan agama, adat dan kebudayaan yang berlaku di tiap-tiap daerah.

Ukuran-Ukuran Perkawinan

Ada beberapa ukuran perkawinan, berikut ini adalah penjelasannya.

Angka perkawinan kasar

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaan merupakan variabel antara yang memengaruhi fertilitas, antara lain melalui pendek atau panjangnya usia subur yang dilalui sebagai pasangan usia subur (PUS) yang menentukan banyaknya kelahiran. Jika tidak memakai suatu alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran, maka perkawinan usia muda akan membuat PUS melewati masa yang panjang dan berpotensi melahirkan

jumlah anak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang menikah di atas usia 25 tahun. Davis dan Blake (1974) mengelompokkan perkawinan sebagai salah satu variabel antara dalam memengaruhi tinggi rendahnya fertilitas.

Cara menghitung angka perkawinan kasar. Jumlah penduduk yang berstatus kawin dibagikan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dan dikalikan dengan 1000.

Rumusnya:

$$\bar{M} = \frac{M}{P} x\ 1000$$

Keterangan:

$\bar{M}$ = Angka Perkawinan Kasar
M = Jumlah perkawinan dalam satu tahun
P = Jumlah penduduk pertengahan tahun

Data yang diperlukannya adalah jumlah penduduk berstatus kawin dalam satu tahun dan jumlah penduduk pertengahan tahun. Contoh dan interpretasinya sebagai berikut.

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk (SP2000) BPS adalah 210.241.999 orang. Jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 orang maka Angka Perkawinan Kasar adalah berikut.

$$\bar{M} = \frac{M}{P} x\ 1000$$

$$\bar{M} = \frac{91274893}{210241999} x\ 1000 = 434{,}14$$

Dari 1000 penduduk Indonesia sebanyak 434 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk berstatus kawin tanpa memedulikan urutan perkawinannya

dan juga tidak menunjukkan rasio banyaknya perkawinan yang terjadi selama tahun 2000, serta tidak memedulikan apakah "umur" faktor penyebut telah berusia "pantas" menikah (*marriageable age*). Interpretasi ini dapat diartikan sebagai Angka Perkawinan Kasar Indonesia pada tahun 2000 adalah sebesar 434 per 1000 penduduk Indonesia.

Angka perkawinan umum

Angka perkawinan umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaan seperti halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun di sini pembaginya adalah penduduk 15 tahun ke atas di mana penduduk bersangkutan lebih berisiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko kawin. Sehingga angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.

Cara menghitungnya, jumlah penduduk yang berstatus kawin dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk berumur 15+ tahun pada pertengahan tahun tertentu serta dikalikan dengan 1000.

Rumusnya

$$M_u = \frac{M}{P_{15}} x\ 1000$$

Keterangan:

M_u = angka perkawinan umum

M = jumlah perkawinan dalam satu tahun

P_{15} = jumlah penduduk pertengahan tahun usia 15+ tahun

Data yang diperlukan adalah jumlah penduduk berstatus kawin yang tercatat dalam satu tahun dan jumlah penduduk pertengahan tahun umur 15 tahun ke atas. Contoh dan interpretasi diilustrasikan seperti berikut.

Jumlah penduduk Indonesia usia 15+ pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk (SP2000) BPS adalah 139.991.180, jika penduduk berstatus kawin 91.274.893 maka angka perkawinan umum adalah:

$$M_u = \frac{M}{P_{15}} x\ 1000$$

$$M_u = \frac{91274893}{139.991.800} x\ 1000 = 652$$

Dari 100 penduduk Indonesia 15+ terdapat 652 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk usia 15+ yang berstatus kawin tanpa memedulikan urutan perkawinannya dan juga bukan rasio banyaknya perkawinan penduduk di atas usia 15+ yang terjadi selama tahun 2000. Interpretasi ini dapat diartikan sebagai angka perkawinan umum Indonesia tahun 2000 adalah sebesar 652 per 1000 penduduk Indonesia.

Angka Perkawinan Spesifik

Angka Perkawinan Spesifik sering juga disebut angka perkawinan menurut kelompok umur. Dalam perhitungan angka perkawinan kasar maupun angka perkawinan umum tidak diperhatikan umur dan jenis kelamin. Perkawinan merupakan hubungan antara dua jenis kelamin yang berbeda dan pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda.

Angka perkawinan spesifik (*age specific marriage rate*) atau angka perkawinan menurut kelompok umur melihat penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kegunaan angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antarkelompok umur maupun jenis kelamin. Menyangkut kesiapan mental, kesiapan reproduksi dan lain sebagainya serta memberikan gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat diperbandingkan perbedaannya.

Cara Menghitung:

$$m_i^s = \frac{M_i^s}{P_i^s}\ x\ 1000$$

m_i^s = Angka perkawinan menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s)

M_i^s = Jumlah penduduk kawin menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s)

P_i^s = Jumlah penduduk menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s)

Contoh dan interpelasi. Jumlah penduduk Laki-laki Indonesia usia 15-19 pada tahun 2000 menurut hasil sensus penduduk (SP2000) BPS adalah 10.649.348 jika penduduk berstatus kawin untuk kelompok yang sama adalah sebesar 247.152 maka angka perkawinan penduduk laki-laki usia 15-19 tahun adalah berikut ini.

$$m_{15-19}^{laki-laki} = \frac{247.152}{10.649.348}\ x\ 1000 = 23{,}21$$

Contoh kedua, jika hendak dilihat berapa angka perkawinan penduduk perempuan kelompok umur yang sama dari data BPS 2000. Jika diketahui jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun 10.500.169 dan yang berstatus kawin ada sebanyak 1.335.881, maka angka perkawinan perempuan usia 15-19 tahun adalah:

$$m_{15-19}^{perempuan} = \frac{1.335.881}{10.500.169}\ x\ 1000 = 127{,}22$$

Dari 1000 penduduk laki-laki Indonesia usia 15-19 tahun terdapat 23 orang berstatus kawin. Angka ini menunjukkan rasio penduduk laki-laki 15-19 tahun yang terjadi selama tahun 2000. Hal yang sama untuk contoh angka perkawinan perempuan usia 15-19 tahun.

Interpretasi ini dapat diartikan sebagai angka perkawinan laki-laki usia 15-19 tahun pada tahun 2000 adalah sebesar 23 per 1000 penduduk Indonesia yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia 15-19 tahun. Jika dibandingkan dengan angka perkawinan perempuan usia 15-19 tahun sudah mencapai 127, artinya dari setiap 1000 perempuan usia 15-19 tahun ada sebanyak 127 orang yang berstatus kawin. Pada kelompok umur yang sama lebih banyak perempuan yang sudah kawin dibandingkan laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada kelompok umur ini yang keluar dari sekolah lebih banyak dari laki-laki. Sebaliknya bagi laki-laki, angka ini menunjukkan bahwa laki-laki menikah pada usia yang lebih tua dibandingkan perempuan dari angka perkawinan di atas.

Dari angka perkawinan di atas, lebih banyak perempuan yang melakukan perkawinan pada usia dini atau muda. Oleh karena itu perempuan perlu diberi pembekalan tentang kesehatan reproduksi pada usia yang lebih muda dibandingkan dengan laki-laki. Pembekalan ini perlu dilakukan sebelum mereka kawin sehingga mereka lebih siap secara mental. Pembekalan dalam bentuk penyuluhan dapat

dilakukan sejak dibangku sekolah dalam bentuk-bentuk seminar-seminar atau acara-acara ceramah serta tanya jawab bersama nara sumber yang ahli. Selain itu perlu penyuluhan dan pelayanan kepada pasangan pengantin, terutama yang perempuannya masih usia muda agar menunda kehamilan anak pertama sehingga perempuan yang menjadi calon ibu siap, baik secara mental maupun fisik.

Ukuran-Ukuran Perceraian

Ada beberapa ukuran perceraian. Berikut ini adalah ukuran-ukuran tersebut.

Angka Perceraian Kasar

Definisi angka perceraian kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk keseluruhan dan pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaannya adalah untuk melihat bahwa perceraian mempunyai implikasi demografis sekaligus implikasi sosiologis. Implikasi demografis adalah mengurangi fertilitas, sedangkan implikasi sosiologis lebih kepada status cerai terhadap perempuan dan anak-anak mereka.

Cara menghitung angka perceraian kasar adalah hasil dari pembagian jumlah kasus perceraian yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun di suatu wilayah tertentu.

$$c = \frac{C}{P}\ x\ 1000$$

c = Angka Perceraian Kasar.
C = Jumlah perceraian yang terjadi selama satu tahun.
P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Angka perceraian menunjukkan jumlah perceraian yang terjadi per seribu penduduk pada suatu tahun tertentu. Sebagai contoh adalah menghitung angka perceraian kasar di Swedia tahun 1960. Jumlah perceraian selama tahun 1960 di Swedia sebesar 8.958 orang dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun sebesar 7.485.615 orang, maka angka perceraian kasar di Swedia tahun 1960 adalah:

$$c = \frac{C}{P}\ x\ 1000$$

$$c = \frac{8.958}{7.458.615}\ x\ 1000 = 1{,}2$$

Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus cerai terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu. Kegunaannya sama seperti halnya dengan angka perceraian kasar, angka perceraian umum dipergunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk cerai. Namun di sini, pembaginya adalah penduduk 15 tahun ke atas di mana penduduk bersangkutan lebih berisiko cerai. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena umumnya mereka tidak berisiko cerai. Sehingga angka perkawinan umum menunjukkan informasi yang lebih baik karena memperhitungkan umur dan faktor risiko.

Untuk memperoleh angka perceraian yang lebih spesifik bisa dihitung dengan angka perceraian umum, yang sudah memperhitungkan penduduk yang terkena risiko perceraian

yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas atau disebut penduduk yang berumur *divorceable*. Rumus umum yang digunakan adalah:

$$c_{15+} = \frac{C}{P_{15+}} \; x \; 1000$$

c15+ = Angka perceraian umum
C = Jumlah perceraian yang terjadi dalam satu tahun
P 15+ = Jumlah penduduk 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun.

Sumber Data Perkawinan dan Perceraian

Terdapat beberapa sumber data perkawinan dan perceraian, yakni sebagai berikut.

Registrasi

Studi tentang perkawinan dan perceraian memerlukan data statistik tentang jumlah perkawinan dan perceraian. Idealnya, statistik tentang hal tersebut dikembangkan dalam suatu sistem pencatatan yang dipelihara dan diperbarui secara terus-menerus. Sebaiknya, statistik tentang perkawinan dan perceraian dikerjakan dalam sistem registrasi vital (di bawah Departemen Dalam Negeri). Sistem registrasi yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan data statistik dengan kualitas yang baik pula, termasuk kelengkapan peristiwa, cakupan, kecermatan, dan kebenarannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara yang mempunyai statistik yang baik semacam ini, misalnya adalah Swedia.

Di Indonesia, pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan (di bawah Departemen Agama). Untuk masyarakat yang beragama non-Islam, pencatatan nikah dan cerai dilakukan oleh gereja,

wihara, pura maupun kelenteng serta diperkuat dengan nikah di kantor catatan sipil (Departemen Kehakiman). Apabila dari ketiga instansi ini bisa dikumpulkan data statistik ini hasil catatan perkawinan secara lengkap maka data statistik ini dapat menjadi sumber utama perhitungan langsung (*direct method*) tentang ukuran-ukuran perkawinan dan perceraian yang diperlukan dalam studi demografi.

Akan tetapi, sampai saat ini, statistik semacam itu belum tersedia karena tidak adanya sistem pelaporan dan penyajian yang terpadu dan terpublikasi. Akibatnya studi perkawinan dan perceraian di Indonesia lebih banyak mengandalkan data lain dengan perhitungan secara tidak langsung (*indirect method*), umunya dari sensus atau survei-survei penduduk.

Sensus Penduduk dan Survei

Sumber data lain yang dapat menjadi bahan perhitungan secara tidak langsung untuk ukuran perkawinan dan perceraian adalah sensus penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan survei khusus yang mengumpulkan keterangan tentang perkawinan dan perceraian. Sensus penduduk dan supas yang diselenggarakan oleh BPS memuat pertanyaan-pertanyaan tentang status perkawinan penduduk dan usia saat kawin pertama kali. Survei khusus yang menanyakan tentang sejarah perkawinan responden adalah Survei Fertilitas Indonesia tahun 1976, Survei Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) tahun 1993, 1997/1998, 2000, dan 2007/2008, serta Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SKDI) TAHUN 1987, 1991. 1994, 1997, 2002/2003, dan 2007.

Tren, Perbedaan, dan Pola Perkawinan di Indonesia

Persentase penduduk berstatus belum kawin menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, sedangkan penduduk berstatus kawin menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 1971-1980 kemudian konstan. Hal ini dimungkinkan karena penduduk yang lahir antara tahun 1965-1975 berjumlah cukup besar dan sudah memasuki umur-umur kawin pada tahun 1980 dan 1990.

Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan yang berstatus cerai juga menunjukkan peningkatan, tetapi peningkatan penduduk yang bercerai lebih rendah untuk laki-laki daripada untuk perempuan. Menurut umur, semakin tua umur, semakin tinggi persentase perempuan yang berstatus janda. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kecenderungan kawin ulang yang tinggi pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Tampaknya perempuan lebih sulit untuk kembali, yang mungkin disebabkan karena adanya beban psikologis akibat perceraian sebelumnya.

Persentase penduduk laki-laki yang berstatus duda menurun dari 1,8% (1971) menjadi 1,2% (1990), sementara penduduk perempuan yang berstatus janda meningkat dari 9,1% pada tahun 1971 menjadi 10,4% pada tahun 1980 dan menurun menjadi 4,1% pada tahun 1990.

Dalam banyak masyarakat, peristiwa kelahiran hanya dapat terjadi melalui hubungan suami istri yang sedang dalam status kawin. Oleh karena itu, perilaku perkawinan merupakan determinan fertilitas. Perilaku perkawinan merupakan salah-satu dari sebelas variabel antara fertilitas yang diajukan oleh Davis dan Blake (1956). Variabel antara

fertilitas adalah faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi tingkat kelahiran.

Perilaku perkawinan merupakan akibat (konsekuensi) dari pembangunan, seperti pembangunan sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik, dan lingkungan. Perempuan yang berpendidikan tinggi, yang tinggal di perkotaan, bekerja di sektor nonpertanian dan berasal dari keluarga yang mampu, lebih cenderung untuk menikah pada usia yang lebih tua. Etnik, kepercayaan, agama, adat istiadat, dan status perempuan dalam masyarakat dapat memengaruhi umur perkawinan dan dengan demikian dapat memengaruhi proporsi laki-laki atau perempuan yang berstatus menikah pada umur tertentu. Di daerah-daerah yang menganut sistem patriarkat, perempuan cenderung kawin pada usia yang lebih muda.

Angka perceraian merupakan refleksi dari hukum perdata yang berlaku, khususnya hukum perkawinan yang menyangkut berakhirnya perkawinan. Oleh karena itu tidak setiap masyarakat memperbolehkan perceraian, maka angka perceraian antarnegara tidak bisa dibandingkan langsung tanpa mempertimbangkan hukum atau adat yang berlaku.

Seperti halnya perkawinan, perceraian juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur, jenis kelamin, daerah asal, etnik, dan tempat tinggal. Faktor-faktor penyebab perceraian antara kondisi ekonomi, pendidikan dan faktor legal dari perkawinan dan perceraian. Sementara itu, faktor lamanya perkawinan sangat penting dalam menghitung potensi dan stabilitas perkawinan seseorang. Pada umunya, dengan meningkatnya jangka waktu perkawinan meningkat

pula proporsi yang bercerai, tetapi intensitas perceraian berbanding terbalik dengan lamanya perkawinan.

Status perkawinan sebelumnya juga dapat memengaruhi kelangsungan perkawinan berikutnya. Perceraian yang terjadi pada laki-laki atau perempuan yang berstatus cerai dan kawin kembali lebih tinggi dibandingkan dengan perceraian dari mereka yang saat perkawinannya berstatus belum kawin atau janda/duda.

Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Undang-undang dan peraturan lain juga ada yang mengatur hal yang berkaitan dengan perkawinan, yakni Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2007, tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2006. Hukum Perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dibuat pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, yang masih diberlakukan oleh Undang-undang No.1 tahun 1974, jika Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya (Pasal 66 Undang-undang Perkawinan).

Sahnya suatu perkawinan memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yakni: (1) sahnya perkawinan menurut hukum negara (perkawinan perdata); (2) sahnya menurut hukum agama; (3) sahnya menurut hukum negara dan agama. Namun terkadang juga ada perkawinan menurut hukum adat yang juga dapat disahkan.

Dalam hal ini sahnya perkawinan menurut hukum negara, artinya suatu perkawinan adalah sah, jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh hukum negara. Sahnya perkawinan menurut hukum agama ialah didasarkan pada hukum agama, yaitu perkawinan yang syarat dan prosedurnya semata-mata berdasarkan pada hukum agama. Terakhir sahnya atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara dan agama, artinya kedua komponen ini saling menentukan dalam mengatur suatu perkawinan.

Batasan umur dapat menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Walaupun undang-undang perkawinan telah berlaku, tetapi penyimpangan-penyimpangannya banyak dilakukan. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan, masih terdapat perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak-anak yang diatur oleh orang tua masing-masing. Kawin gantung misalnya, adalah perkawinan yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan (sering kali di bawah umur) yang disahkan, baik secara adat maupun agama, tetapi dalam perkawinan semacam ini hubungan suami istri dilakukan setelah pasangan tersebut siap secara biologis, yaitu secara istri mendapat haid yang pertama.

Bentuk perkawinan yang lain adalah *kawin kontrak,* yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan untuk jangka waktu tertentu, misalnya 5 tahun. Hal ini biasanya karena laki-laki berada di suatu tempat untuk jangka waktu tertentu ataupun karena pekerjaan. Jika kontrak perkawinan telah berakhir maka untuk selanjutnya tidak ada pertanggungjawaban sebagai seorang suami. Contoh kawin kontrak banyak terjadi di Kalimantan Timur, di mana banyak tenaga kerja asing kontrak yang bekerja di perusahaan kaya atau minyak. Mereka banyak melakukan kawin kontrak dengan perempuan asli daerah tersebut.

Tugas

Bacalah berbagai sumber referensi tambahan. Selanjutnya carilah jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Apa yang kelompok Anda ketahui tentang talak, dan jelaskan faktor pendidikan dan etnik yang dapat memengaruhi perceraian?
2. Bagaimana cara menghitung angka perkawinan pada mereka yang melakukan poligami dan poliandri?
3. Apakah pengaruh perkawinan terhadap fertilitas dan migrasi?
4. Apakah pengaruh faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnik dan tempat tinggal) terhadap perkawinan dan perceraian serta berikan contohnya?
5. Apakah dampak perkawinan dini (di bawah umur) terhadap pertumbuhan penduduk dan bagaimana cara/solusi agar tidak terjadi lagi perkawinan dini?

BAB VII
KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

Pendahuluan

Ketika era globalisasi dan informasi belum sepenuhnya diantisipasi, Indonesia harus menghadapi krisis ekonomi dan reformasi yang berlanjut dengan berbagai tuntutan seperti otonomi, demokratisasi, dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Berbagai hal itu sering terkait satu dengan lainnya. Tuntutan seperti itu pun merupakan hal yang wajar. Sayangnya, masalah-masalah besar itu tidak dapat dipecahkan segera dan serempak, bahkan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa satu permasalahan pun sering kali tidak dapat dipecahkan dengan memuaskan. Karenanya, masalah yang dihadapi Indonesia sekarang sangat kompleks dan berlarut-larut.

Apakah kaitan antara perubahan-perubahan itu dengan kebijakan kependudukan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya dilihat dulu lingkup permasalahan kependudukan. Pada satu sisi, permasalahan itu berputar pada masalah pokok demografis, yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan mobilitas (migrasi).

Secara sepintas, terutama bagi orang awam, permasalahan ini tampak sederhana. Namun, bila menyadari bahwa permasalahan kependudukan tidak mengkaji individu per individu, masalahnya tidak pernah sederhana. Oleh karena itu, pada sisi lain, permasalahan kependudukan bisa melebar ke berbagai permasalahan sosial ekonomi lain.

Konsep Kebijakan Kependudukan

Kebijakan Kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar, komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Sedangkan E. Bergman dari Harvard University mendefinisikan kebijakan penduduk sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan di mana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk.

Secara umum kebijakan penduduk harus ditujukan untuk:

1. Melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan penduduk itu sendiri terutama generasi yang akan datang.
2. Memberikan kemungkinan bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang lebih besar, guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga dan anaknya.
3. Kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.

Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang bersangkutan atau generasi yang akan datang.

Pada tahun 1965, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempunyai kebijakan kependudukan yang jelas dan menjadi dasar bagi tindakan-tindakan yang nyata, walaupun badan yang bernama "*The Population Commission*" dengan resmi sudah dapat disahkan pada tanggal 3 oktober 1946.

Bank Dunia pernah menyebut Indonesia sebagai "salah satu transisi demografis paling mengesankan di negara sedang berkembang". Pada masa itu tingkat fertilitas turun dari 5,5 menjadi tiga per kelahiran, sementara tingkat kelahiran kasar turun dari 43 menjadi 28 per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 1970, pertumbuhan penduduk turun dari sekitar 3,5 persen menjadi 2,7 persen dan turun lagi menjadi 1,6 persen pada tahun 1991. Banyak negara berkembang kemudian belajar implementasi program KB di Indonesia. Tetapi, hampir bisa dipastikan, dalam "transfer pengetahuan" itu tidak disebut metode yang membuat program itu sukses; yakni koersi (pemaksaan dengan ancaman) terhadap perempuan, khususnya dari kelompok masyarakat kelas bawah, terutama saat awal program diperkenalkan.

Di bawah panji-panji Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), program pengendalian penduduk (baca: KB dengan alat kontrasepsi) dilancarkan. Seperti halnya di negara berkembang lain awal tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru meyakini KB sebagai strategi ampuh mengejar ketertinggalan pembangunan. Ajaran Malthusian mengasumsikan, dengan jumlah penduduk terkendali rakyat lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi-yang merupakan pereduksian makna "pembangunan" tinggi guna mencapai kemakmuran, di antara syaratnya adalah "*zero growth*" di bidang kependudukan. Hubungan antara pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi menjadi semacam kebenaran, sehingga tidak lagi memerlukan pembuktian. Dalam Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di

Kairo, Mesir, 1994, lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkapkan, kebijakan kependudukan yang reduksionis ini dikonstruksi sistematis melalui lembaga internasional. Pertumbuhan penduduk menjadi prakondisi bantuan pembangunan.

Di Indonesia, seperti pernah dikemukakan aktivis kesehatan reproduksi Ninuk Widyantoro, para petugas medis hanya diajari cara memasang susuk (nama lain dari Norplant), tetapi tidak cara mengeluarkannya. Pendarahan dan efek samping lain pemasangan kontrasepsi di tubuh perempuan sering dianggap tidak soal. Secara ironis pula, perencanaan program sebagian besar dilakukan laki-laki. Angka keberhasilan KB dijadikan salah satu komponen keberhasilan pembangunan, sehingga cara apa saja digunakan untuk mencapai "angka keberhasilan" itu. Manusia, khususnya perempuan, telah berubah maknanya menjadi hanya angka dan target. Caranya, tak jarang menggunakan pemaksaan dan ancaman aparat.

Ruang Lingkup Kebijakan Kependudukan

Pada konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan (*International conference on Population and Development* atau ICPD) yang berlangsung di Kairo, Mesir dihasilkan program aksi yang mendukung strategi baru dalam kebijakan kependudukan yang menekan adanya keterkaitan secara integral antara penduduk dan pembangunan dengan fokus perhatian diarahkan pada kesesuaian kepentingan individu antara laki-laki dan perempuan. Kunci dari pendekatan baru ini adalah pemberdayaan perempuan dan

memberinya lebih banyak akses pada bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan, pengembangan keterampilan dan pekerjaan.

Dengan demikian, pada dekade terakhir abad ke-20, telah terjadi perubahan visi dalam kebijakan kependudukan, dari fokus pada pengendalian variabel-variabel demografi semata menjadi ke arah kualitas hidup. Ada 3 hal penting yang kaitannya dengan kebijakan kependudukan, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan kependudukan harus berubah dan mencerminkan adanya suatu komitmen yang mendasar pada etika dan HAM.
2. Kebijakan penduduk yang lebih dari sekedar pengendalian fertilitas, hanya akan efektif apabila menjadi bagian dari pendekatan pembangunan manusia yang lebih luas yang menciptakan lingkungan di mana orang-orang memperoleh kesehatan dan haknya.
3. Kebijakan kependudukan mempunyai prioritas strategi pemberdayaan perempuan dan strategi pelayanan kesehatan reproduksi.

Pendekatan kependudukan yang baru ini berbeda dari kebijakan yang ada sebelumnya karena beberapa hal berikut ini.

1. Kebijakan kependudukan memasukkan aspek reproduksi dan seksualitas manusia sebagai komponen yang tak dapat dipisahkan dalam pembangunan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Strategi pemberdayaan dan pelayanan kesehatan reproduksi akan melengkapi program pembangunan manusia yang sedang dijalankan sekarang ini.

3. Pendekatan ini bersifat inklusif dan partisipasif, memberi suara dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan kepada mereka yang berperan dalam reproduksi manusia dan seksualitas.

Kebijakan pronatalis versus antanatalis, kebijakan kependudukan yang bersifat pronatalis ini umumnya dianut oleh negara-negara yang telah mencapai tahap di bawah level penggantian penduduk, yang mengalami tingkat pertumbuhan penduduk amat rendah bahkan negatif. Perancis menerapkan kebijakan pronatalis. Begitu juga menjelang perang dunia kedua yaitu Rusia, Jerman, Italia, Jepang menganut kebijakan pronatalis. Sedangkan negara-negara Asia seperti Asia Selatan, Asia tenggara dan Asia Timur mengikuti kebijakan antinatalis.

Perkembangan Kebijakan Kependudukan di Indonesia

Indonesia menerapkan beberapa kebijakan pendudukan, seperti berikut ini

Transmigrasi

Kebijakan transmigrasi itu terus dijalankan sampai pemerintahan Orde Baru memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang-Undang No. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi di mana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dari tujuh sasaran, yaitu: (1) peningkatan taraf hidup; (2) pembangunan daerah; (3) keseimbangan penyebaran penduduk; (4) pembangunan yang merata di seluruh Indonesia; (5) pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; (6)

kesatuan dan persatuan bangsa; (7) memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

Kebijakan penduduk yang dijalankan saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004. Pada periode GBHN 1999-2004, kebijakan yang menyangkut kependudukan tidak merupakan kebijakan tersendiri, tetapi merupakan kebijakan dari kebijakan di bidang sosial dan budaya, khususnya pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial. Arah kebijakannya yaitu meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Dengan tujuan kebijakan kependudukan untuk mengendalikan jumlah kelahiran menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia.

Keluarga Berencana (KB)

Salah satu kebijakan dalam bidang kependudukan yang sangat penting di Indonesia telah ditunjukkan keberhasilannya adalah kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB. Program KB juga merupakan usaha untuk melaksanakan kegiatan *beyond family planning*. Konsep ini merupakan usaha untuk mempertemukan 3 pandangan, yaitu: (1) pandangan yang menyatakan bahwa penurunan fertilitas hanya dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi; (2) pandangan dalam masyarakat tentang peranan anak dalam kehidupan berkeluarga dan sebagai jaminan hari tua maupun tenaga bantuan untuk keluarga; dan (3) pandangan yang menyatakan bahwa dengan program KB yang dikelola dengan baik, fertilitas akan dapat diturunkan.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia telah mengalami kemajuan sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan program KB, seperti peningkatan jumlah peserta KB, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka fertilitas, penurunan angka kematian bayi, penurunan angka kematian kasar, penurunan angka kelahiran kasar, dan peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Sejalan dengan penurunan tingkat kematian dan meningkatnya tingkat kesehatan penduduk, angka harapan hidup juga mengalami peningkatan. Dengan adanya penurunan beberapa indikator kependudukan terutama indikator fertilitas, maka laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga mengalami penurunan. Akan tetapi, secara kuantitas, jumlah penduduk tetap mengalami peningkatan.

Tantangan Masa Depan Kebijakan Penduduk Indonesia

Tantangan masa depan pada kebijakan kependudukan di Indonesia antara lain sebagai berikut

1. Masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran di bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan.
2. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti lahir, mati, pindah datang masih sangat kurang, sehingga database kependudukan menjadi tidak valid.
3. Diperlukan anggaran yang sangat besar terutama daerah-daerah dengan PAD yang minim.

4. Masih kurangnya pemahaman terhadap tehnologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual.

Tantangan yang terberat dalam mengelola kependudukan berada di tangan Pusat (Depdagri) khususnya Dirjen Minduk sebagai pembuat kebijakan mengenai kependudukan. Karena dengan diberlakukannya SAK (Sistem Administrasi Kependudukan) di mana salah satu komponennya adalak SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah kependudukan. Secara otomatis akan terjadi banyak perubahan ditataran aturan seperti Perda, SK Walikota dll.

Yang menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini Pusat belum memberikan system dan perangkat lunak (*software*) sehingga daerah dalam melaksanakan program kependudukannya menjadi serba salah, mau melangkah lebih jauh kendala aturan kalau menggunakan SIMDUK dianggap tidak legal. Daerah sepertinya dibiarkan melaksanakan SIAK sendiri-sendiri, padahal kalau melihat *blue print*, bahwa SIAK dengan *on line* dan diperkenalkannya NIK secara nasional akan sangat membantu untuk mendata terjadinya setiap peristiwa kependudukan seperti lahir, mati, pindah, dan datang. Dengan diberlakukan identitas tunggal (*single identy number*) secara nasional akan memudahkan administrasi penduduk. Sehingga sampai saat ini daerah-daerah masih banyak menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan

(SIMDUK) bahkan ada yang masih manual dengan mesin tik tanpa menggunakan database.

Dari kacamata kebijakan Publik (*Public Policy*) pelayanan administrasi kependudukan oleh masyarakat masih dianggap rendah akuntabilatasnya, responsivitas, dan efisiensinya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat terutama menyangkut masih lama proses dan biaya yang dibebankan lebih dari yang distandarkan. Untuk menjawab keluhan dari masyarakat tersebut perlu ada perubahan mengenai peraturan, di mana kalau memungkikan ada hukuman (*punishment*) bagi yang melanggar seperti denda yang cukup besar sehingga peraturan kependudukan tidak dipandang sebelah mata. Pelanggaran yang terbesar terjadi adalah adanya pindah datang yang tidak dilaporkan, kepemilikan KTP ganda maupun pemalsuan KTP dan KK. Khusus untuk dokumen kependudukan kalau memungkinkan dilaksanakan dengan metode biaya bertingkat (*price grade*), yaitu kalau mau cepat pengenaan biayanya lebih besar dibandingkan kalau dalam kondisi normal, sehingga memperkecil peluang adanya KKN antara petugas dengan masyarakat.

Hal itu sangat dimungkinkan dengan penggunaan system yang baik dan komputerize diseluruh pelayanan. Inovasi pelayanan juga perlu dilakukan untuk mendapatakan hasil yang terbaik seperti untuk perpanjangan KTP, bagi KTP yang habis masa berlakunya hanya perlu datang ke TPDK(tempat perekaman data kependudukan membawa KTP lama, rekam sidik jari dan langsung difoto, sehingga bisa mengurangi rentang panjang birokrasi. Tetapi untuk memberikan tingkat

kepastian mereka yang menggunakan *price grade* berhak menerima denda dari keterlambatan penyelesaian dokumen kependudukan. Sehingga pelayanan kedepan benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Program KB telah diakui mempunyai andil yang besar dalam perubahan demografis di Indonesia. Khususnya dalam hal pengendalian tingkat fertilitas. Keberhasilan ini perlu dipertahankan mengingat tantangan dalam bidang kependudukan pada masa depan semakin meningkat. Turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang kemudian disusul menurunnya daya beli sangat berpengaruh kepada permintaan alat kontrasepsi oleh masyarakat. Selain itu, mutu pelayanan kontrasepsi tampaknya perlu ditingkatkan pada masa mendatang di samping meningkatkan aksesibilitas alat kontrasepsi itu sendiri agar bisa mudah diperoleh oleh masyarakat.

Status Kebijakan Kependudukan

ICPD KAIRO 1994 menghasilkan rumusan-rumusan Program Aksi yang menekankan program-program kependudukan yang sifatnya mengikat bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rumusan program aksi tersebut dituangkan dalam bab 16 yang terdiri dari 1 bab mengenai preambul, 1 bab mengenai prinsip-prinsip yang mendasari program aksi, 9 bab mengenai kependudukan dan pembangunan, 1 bab mengenai aksi nasional, dan 3 bab mengenai kerja sama internasional, kemitraan, dan tindak lanjut.

Isu-isu kependudukan dituangkan dalam Bab III – Bab XI. Bab III berisi tentang keterkaitan antara kependudukan, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan berkelanjutan. Bab IV berisi tentang kesetaraan, pemerataan gender, dan pemberdayaan perempuan. Bab V mengenai keluarga terutama peranan keluarga, hak-haknya, komposisi, dan struktur keluarga. Bab VI mengenai pertumbuhan penduduk dan struktur umur penduduk.

Isu-isu demografi yang dibahas pada bab VI meliputi fertilitas, mortalitas, pertumbuhan penduduk anak dan remaja, penduduk usia lanjut, penduduk asli, dan penderita cacat. Bab VII Mengenai hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi. Bab VIII membahas tentang kesehatan, morbiditas, dan mortalitas. Bab IX membahas tentang distribusi penduduk, urbanisasi, dan migrasi internal. Bab X mengenai migrasi internasional. Bab XI tentang kependudukan, pembangunan, dan pendidikan. Bab-bab selanjutnya (bab XII – bab XVI) menekankan pentingnya usaha-usaha peningkatan penelitian dan teknologi, penggerakan rencana aksi di tingkat nasional, kerja sama internasional, dan kemitraan dengan sektor non pemerintah.

Pada bangsa Indonesia hasil Konferensi 1994 Kairo diejawantahkan dalam 8 (delapan) tujuan pembangunan milenium sangat jelas dengan keterkaitan dengan pembangunan kependudukan pada umumnya. Sasaran 1 penurunan kemiskinan sebesar separuh dari tahun 1990 Pada tahun 2015. Sasaran 2 mencapai pendidikan dasar secara universal pada tahun 2015, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sasaran 3 menghapuskan perbedaan gender

dalam pendidikan dasar dan sekolah menengah pada tahun 2005 dan menghapuskan semua perbedaan gender pada semua tingkat pendidikan pada tahun 2015. Sasaran 4 menurunkan angka kematian anak balita (akaba) sebesar dua pertiga dari akaba tahun 1990 pada tahun 2015. Sasaran 5 menurunkan angka kematian ibu (AKI) sebesar tiga perempat dari AKM tahun 1990 pada tahun 2015.

Sasaran 6 mencegah penyebaran penyakit HIV/AIDS, malaria, tuberculosis sebesar separuhnya pada tahun 2015 kemudian menurunkan tingkat prevalensinya. Sasaran 7 meningkatkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, mengintegrasikan faktor lingkungan dalam kebijakan pembangunan, menurunkan jumlah penduduk tanpa air minum yang sehat menjadi separuhnya pada tahun 2015, dan meningkatkan taraf hidup 100 juta tunawisma pada tahun 2020. Sasaran 8 membangun kemitraan global untuk pembangunan negara-negara miskin. Kedelapan sasaran ini menjadi acuan dan ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan manusia bagi negara-negara anggota PBB sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan pembangunan di sebagian besar negara-negara di dunia harus mengacu pada hasil ICPD Kairo dan MDGs.

Di Indonesia tujuan jangka panjang diusahakan dapat dijangkau dengan (1) peningkatan volume transmigrasi ke daerah-daerah yang memerlukannya dan (2) menghambat pertumbuhan kota-kota besar yang menjurus ke arah satu-satunya kota besar di suatu pulau tertentu dan mengutamakan pembangunan pedesaan.

Tujuan jangka pendek diarahkan kepada penurunan secara berarti pada tingkat fertilitas, peningkatan volume transmigrasi setiap tahunnya dan perencanaan serta pelaksanaan urbanisasi yang mantap. Program-program kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat. Termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti peningkatan mutu pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, peningkatan status wanita.
2. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan.
3. Merangsang terciptanya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
4. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata.
5. Mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
6. Mengatasi masalah tenaga kerja.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup.

Usaha Pemecahan Masalah Kepadatan Penduduk

Penduduk di hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia selama berabad-abad hidupnya telah dipengaruhi oleh nilai, norma, dan adat istiadat yang bersifat positif terhadap sikap dan tingkah laku yang menginginkan anak banyak. Struktur kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan

budaya serta agama telah memantapkan kehidupan pribadi. Untuk dapat mengubah sikap dan tingkah laku tersebut menjadi sikap dan tingkah laku untuk menyenangi dan menginginkan anak sedikit diperlukan program pendidikan dan program-program pemberian motivasi lainnya.

Kebijaksanaan kependudukan secara menyeluruh harus memperhitungkan hambatan-hambatan dari segi politis, ekonomis, sosial, budaya, agama juga dari segi psikologis perorangan dan masyarakat yang di negara-negara berkembang masih cenderung mendukung diterimanya banyak anak. Program-program "*beyond family planning*" harus lebih diintensifkan dan diekstensifkan.

Di samping usaha peningkatan produksi dalam segala bidang kebutuhan hidup penduduk (pangan, sandang, rumah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain), perlu ditingkatkan usaha yang berhubungan dengan beberapa hal berikut ini.

1. Pelaksanaan wajib belajar.
2. perbaikan mutu pendidikan.
3. Perluasan kesempatan kerja.
4. Perbaikan status wanita dan perluasan kesempatan kerja bagi mereka.
5. Penurunan kematian bayi dan anak-anak.
6. Perbaikan kesempatan urbanisasi.
7. Perbaikan jaminan sosial dan jaminan hari tua.

Tugas

Buatlah kelompok tetap 7-8 Orang. Bacalah berbagai referensi lainnya untuk tema kebijakan pendudukan di Indonesia dan Sumatera Selatan. Laporkan tugas bacaan kelompok Saudara serta diskusikanlah dengan kelompok lain untuk menjawab apakah kebijakan-kebijakan kependudukan yang pernah dilaksanakan berjalan efektif atau tidak. Jika tidak efektif mengapa terjadi demikian. Buatlah kesimpulan hasil diskusi tersebut.

BAB VIII
TANTANGAN KEPENDUDUKAN

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan wilayah negara yang luas ini menyebabkan pembludakan jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan permasalah kependudukan. Permasalahan kependudukan memang sudah menjadi masalah penting bagi pemerintah maupun para pakar kependudukan di Indonesia. Indikator sosial ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk memberikan tingakat kemajuan ekonomi antara negara-nagara maju dengan negara yang sedang berkembang, dan juga dapat memberi gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara. indikator dari social ekonomi adalah pekerjaan.

Karena jumlah penduduk yang sangat banyak, menciptakan masalah dan beban untuk pemerintah dalam menyediakan aspek-aspek yang diperlukan penduduk untuk sejahtera. Selain itu pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat tinggi, akibatnya bagi suatu negara berkembang akan menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu tertentu. Tenaga kerja adalah besarnya bagian dari jumlah ekonomi yang ikut dan berperan dalam sektor ekonomi yang merupakan kegiatan

yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis.

Angkatan kerja ini terdiri dari penduduk yang sedang berkerja maupun sedang dalam tahap mencari pekerjaan di suatu tempat tersebut. Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang dalam semua aspek. Secara keseluruhan kesehatan dicapai melalui kombinasi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Dalam bidang pendidikan, pendidikan merupakan suatu proses yang meliputi seluruh aspek masyarakat yang ikut terlibat, baik itu dalam keluarga, perkampungan, lembaga pendidikan, yang terjadi baik secara formal atau pun nonformal dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan dengan baik. Pendapatan, penghasilan dari seseorang dapat menentukan taraf hidup orang tersebut. Taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh rata-rata per kapita negara tersebut, kekayaan rata-rata setiap orang di negara tersebut

Dalam buku *Ekologi Manusia* dinyatakan ada tiga kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dasar atas udara, air bersih, pangan, papan dan kesehatan. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pendidikan, pendapatan, transportasi, keadilan dan perlindungan hukum. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk bebas

dalam memilih yang diatur secara rinci dalam hukum di negara tersebut.

Ada pula masalah akibat angka kematian. Semakin bertambah angka harapan hidup berarti perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penampungan dan penyediaan gizi yang memadai bagi anak balita. Sebaliknya apabila tingkat mortalitas tinggi akan memiliki dampak yang buruk di mata dunia terhadap Indonesia. Masalah mobilitas penduduk pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus menerus hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan. Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena penduduk desa tidak merasakan perkembangan yang terjadi di kota sehingga memaksa mereka untuk ikut pindah demi mendapatkan kesejahteraan hidup.

Masalah Kependudukan di Indonesia

Terdapat beberapa permasalahan kependudukan, khususnya di Indonesia dapat terjadi karena dua hal: masalah demografis dan masalah non demografis.

Pada masalah demografis menyangkut: (1) besarnya jumlah penduduk (*over population*); (2) tingginya tingkat pertumbuhan penduduk; (3) persebaran penduduk tidak merata.

Pada masalah nondemografis, bersifat kualitatif. Menyangkut: (1) tingkat kesehatan penduduk yang rendah; (2) pendidikan yang rendah; (3) banyaknya jumlah penduduk miskin.

Besarnya jumlah penduduk (*over population*). Telah disebutkan sebelumnya di awal bahwa jumlah penduduk Indonesia berada di urutan ke empat terbesar di dunia setelah berturut-turut China, India, Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah. Dari sensus tahun 1971-2010, jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah.

Dari data yang diambil dari Kabupaten Kepulauan Selayar, akan mewakili jumlah penduduk Indonesia. Di bawah ini dapat dilihat bagaimana jumlah penduduk di Kepulauan-Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin bertambah. Hal ini tentunya memberikan berbagai dampak baik positif dan negatif. Sebelum membahas tentang masalah kependudukan, ada baiknya kita mengetahui dampak positifnya lebih dahulu antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja dalam masalah sumber daya alam, mempertahankan keutuhan negara dari ancaman yang berasal dari bangsa lain, dsb.

Akan tetapi permasalahan kependudukan terkait dengan jumlah penduduk yang besar menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan. Indonesia memiliki berbagai potensi terjadinya konflik. Benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi masa lainnya membuat masalah besarnya populasi menjadi hambatan. Selain itu yang terpenting terkait dengan permasalahan penyediaan sumber daya alam dan berbagai kebutuhan penting lainnya.

Adanya tekanan penduduk terhadap daya dukung lingkungan menjadi masalah yang sangat rumit. Kepentingan untuk membangun tempat tinggal dan ruang gerak sangat penting namun di sisi lain terdapat kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan seperti halnya sebagai daerah aliran sungai, daerah resapan air, pertanian, penyediaan sumber daya alam, dll. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dan keduanya perlu mendapatkan perhatian yang sama demi keseimbangan alam. Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang sangatlah diperlukan guna penentuan kebijakan terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. Terkait dengan jumlah penduduk yang tinggi tentunya terdapat faktor yang memengaruhinya. Salah satunya adalah tingkat atau laju pertumbuhan penduduk. Besarnya laju pertumbuhan penduduk membuat pertambahan jumlah penduduk semakin meningkat. Semakin besar persentase kenaikannya maka semakin besar jumlah penduduknya. Kenaikan ini tentunya membawa dampak bagi kependudukan Indonesia. Dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan baik dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana, fasilitas-fasilitas umum dan yang terpenting adalah kebijakan dalam rangka mengurangi laju pertumbuhan

yang ada di Indonesia. Dari situlah muncul program KB dan kini ditangani oleh BKKBN.

Dari tahun ke tahun tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia semakin menurun. Pertambahan yang terjadi tidak terlalu tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun, alangkah lebih baik apabila persentase pertumbuhannya semakin menurun hingga mencapai angka di bawah 1%. Dalam pengelompokkan negara-negara, negara-negara maju selalu memiliki angka pertumbuhan penduduk di bawah 1% atau bahkan 0%. Melihat dari jumlah penduduk Indonesia yang tinggi, penekanan agar laju pertumbuhan penduduk dapat menurun merupakan langkah yang baik guna menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Apabila tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terus dibiarkan maka akan terjadi berbagai masalah baik masalah pengangguran, tingkat kualitas sumber daya manusia yang menurun, kejahatan, lapangan pekerjaan, dll. yang memberikan dampak negatif bagi kelangsungan umat manusia Indonesia khususnya. Oleh karena itu, usaha untuk menekan laju pertumbuhan sangat penting. Program-program yang ditawarkan pemerintah harus didukung oleh masyarakat seperti halnya KB, penggunaan alat kontrasepsi, penundaan usia perkawinan, dan lain-lain sehingga penurunan laju pertumbuhan penduduk diharapkan menurun.

Persebaran penduduk tidak merata. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibandingkan dengan luas wilayahnya yang dihitung jiwa per Km^2. Berdasarkan sensus penduduk dan survei penduduk, persebaran penduduk Indonesia antara provinsi yang satu

dengan provinsi yang lain tidak merata. Di Indonesia sendiri terjadi konsentrasi kepadatan penduduk yang berpusat di Pulau Jawa. Hampir lebih dari 50% jumlah penduduk Indonesia mendiami Jawa. Hal ini menjadi masalah apabila pusat pemerintahan, informasi, transportasi, ekonomi, dan berbagai fasilitas hanya berada di satu wilayah. Penduduk akan berusaha untuk melakukan migrasi dan akhirnya akan berdampak pada permasalahan pemerataan pembangunan.

Tingkat kesehatan penduduk yang rendah. Usaha untuk terus meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terus digalakkan. Namun, kembali lagi permasalahan itu tetap muncul dan menjadi PR bagi penentu kebijakan guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dalam hal kesehatan yang akan menjadi sorotan bagaimana gambaran tingkat kesehatan adalah angka kematian bayi. Besarnya kematian yang terjadi menunjukkan bagaimana kondisi lingkungan dan juga kesehatan pada masyarakat.

Dari data di atas dapat dilihat bagaimana penurunan yang terjadi pada angka kematian bayi di Indonesia yang dihitung berdasar jumlah kematian di setiap 1000 kelahiran per tahun. Penurunan ini menunjukkan usaha untuk perbaikan dalam bidang kesehatan terus saja diupayakan guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Berbagai layanan kesehatan yang dibuka seperti imunisasi dan juga posyandu tentunya menjadi harapan guna memperbaiki kondisi kesehatan yang ada saat ini.

Pendidikan yang rendah. Kesadaran masyarakat akan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Dari UU yang dikeluarkan pun terlihat bahwa wajib belajar penduduk

Indonesia masih terbatas 9 tahun sementara negara lain bahkan menetapkan angka lebih dari 12 tahun dalam pendidikannya. Namun bagi Indonesia sendiri, angka 9 tahun pun belum semuanya terlaksana dan tuntas mengingat banyaknya pulau di Indonesia yang masih belum terjangkau oleh berbagai fasilitas pendidikan. Dari HDI (*Human Development Indeks*) tahun 2011 pun rata-rata pendidikan bangsa Indonesia masih pada angka 5.8 tahun. Dari sini pun sudah terlihat bagaimana tingkat pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, sebenarnya tingkat pendidikan bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur kualitas SDM penduduk suatu negara. Kualitas SDM berhubungan dengan produktivitas kerja. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi diharapkan punya produktivitas yang tinggi.

Namun kembali pada kenyataan yang terjadi di Indonesia adalah banyak orang berpendidikan tinggi namun tetap saja menjadi pengangguran. Orang yang menganggur menjadi beban bagi orang lain. Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini, pengangguran yang dimaksud di sini merupakan pengangguran yang terjadi karena mereka sedang dalam proses mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Terdapat angka yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi berada pada tamatan SMA/Umum. Ini menunjukkan bahwa pendidikan setara SMA belum cukup untuk mengentaskan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Lulusan ini masih menjadi pertanda bahwa tingkatan produktivitas tidak bertambah jika pendidikan

hanya sebatas ini. Perlunya peningkatan pendidikan serta pendidikan non formal tentunya akan membantu agar pengangguran tidak menumpuk pada lulusan SMA.

Jika diamati, kondisi ini sangat memprihatinkan. Tingkat pendidikan diharapkan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Sehingga pembangunan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan penduduk. Banyaknya jumlah penduduk miskin. Kemiskinan juga menjadi salah satu masalah yang melanda Indonesia. Walau Indonesia bukan termasuk negara miskin menurut PBB namun dalam kenyataannya lebih dari 30 juta rakyat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Yang lebih disayangkan lagi, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun sungguh memprihatinkan ketika melihat bagaimana kemiskinan menjadi bagian permasalahan di negeri yang kaya ini.

Secara garis besar penurunan jumlah warga miskin memang terlihat signifikan. Hal ini juga dibenarkan oleh beberapa pakar yang mengamati penurunan ini. namun, angka 30 juta masih menjadi permasalahan sendiri mengingat adanya berbagai tujuan global yang akan di capai tahun 2015.

Penduduk dan Masalah Pembangunan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Ada dua definisi terkait penduduk. (1).

Orang yang tinggal di daerah tersebut dan (2) orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain orang yang mempunyai surat resmi untuk tinggal di situ. Dalam istilah sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut atau orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dengan kata lain yang mempunyai surat resmi dari pemerintah.

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 sesudah RRC, India, dan USA, sangat merasakan dampaknya. Banyaknya jumlah penduduk berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah semakin banyaknya sumber daya manusia yang dapat mengabdikan diri untuk memajukan negara, tetapi dampak negatifnya adalah dapat memunculkan masalah-masalah kependudukan akibat kurangnya sarana untuk mengimbangi jumlah penduduk dan penyebarannya yang tidak merata.

Masalah-masalah kependudukan dapat berdampak pada alam sekitar. Misalnya, kepadatan penduduk dapat menyebabkan krisis air bersih. Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian besar berasal dari air tanah, air permukaan, dan air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap, sedangkan jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun 2/3 dari luas bumi berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan secara langsung. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh

berbagai macam industri, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dsb. Jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan. Hal ini mengakibatkan kurangnya kesediaan air bersih.

Perkembangan penduduk yang pesat di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami tingkat pertambahan yang berarti, bahkan dalam jangka panjang bisa menurun. Pada negara Indonesia, terdapat hubungan antara kependudukan dengan masalah pembangunan, yakni sebagai berikut.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai peningkatan terus menerus dalam standar hidup penduduk suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan eksternalitas, yaitu pembangunan yang mengacu pada pemanfaatan sumber-sumber alam maupun sumber daya manusia secara optimal, tanpa mengorbankan kepentingan generasi berikutnya.

Kapasitas pembaharuan sumber daya alam tak terbatas, tidak selalu bisa membagi secara berkelanjutan, ini bergantung pada perbedaan antara tingkat kesuburan stasioner dan tingkat kematian. Jika kesuburan stasioner lebih rendah dari angka kematian, jalan untuk pembangunan berkelanjutan tidak akan ditemukan, dan dalam kasus seperti itu intervensi publik diperlukan untuk kelangsungan ekonomi yang berkelanjutan. Ini hanya dapat dilakukan melalui kebijakan yang memengaruhi perhatian publik untuk perlindungan lingkungan atau intensitas yang diinginkan.

Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan diartikan sebagai penurunan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen-komponen lingkungan sebagaimana mestinya. Disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara alami.

Penyusutan Lahan

Deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi pertanian atau produksi kayu menciptakan kelangkaan hasil hutan dan mengurangi kemampuan hutan untuk menghasilkan barang dan jasa ekosistem. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya permintaan akan hasil hutan dan jasa kehutanan, yang dapat memperkuat kelangkaan ini. Harga produk hutan meningkat dan menjadi semakin menguntungkan dengan menanam pohon di hutan dan kebun

Polusi Air dan Ketersedian Air Bersih

Kualitas air didefinisikan sebagai air yang aman dikonsumsi dan menarik bagi semua kehidupan di bumi. Seharusnya tidak mengandung bahan kimia atau zat radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan setiap kehidupan. Ini harus bebas dari organisme penyebab penyakit dan stabil dalam hal korosi atau *scaling*. air tercemar adalah air yang tidak aman dan tidak sehat bagi manusia dan hewan untuk minum atau mencuci.

Ketahanan Pangan dan Energi

Hubungan antara perpindahan penduduk dan keamanan pangan dan membandingkan peta *diversity* makanan untuk tahun 2005 dan 2015, menunjukkan titik keamanan pangan

potensial di masa depan. Kami menemukan bahwa perpindahan penduduk memiliki efek mendalam pada semua dimensi ketahanan pangan dan investasi infrastruktur akan sangat dibutuhkan di kota-kota kecil dan menengah, guna distribusi pangan.

Perkembangan penduduk yang pesat di negara-negara yang sedang berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami tingkat pertambahan yang berarti, bahkan dalam jangka panjang bisa menurun. Jika Perkembangan penduduk tidak sesuai dengan sumber daya alam yang ada, maka pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilakukan.

Tantangan Masa Depan Kependudukan di Indonesia

Tantangan masa depan pada kebijakan kependudukan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan.
2. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan seperti lahir, mati, pindah datang masih sangat kurang, sehingga *database* kependudukan menjadi tidak valid.
3. Diperlukan anggaran yang sangat besar terutama daerah-daerah dengan PAD yang minim.
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap teknologi informasi, sehingga pengolahan data masih bersifat manual.

Tantangan yang terberat dalam mengelola kependudukan adalah berada di tangan Pusat (Depdagri) khususnya Dirjen Minduk sebagai pembuat kebijakan mengenai kependudukan. Karena dengan diberlakukannya SAK (Sistem Administrasi Kependudukan) di mana salah satu komponennya adalak SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah kependudukan. Secara otomatis akan terjadi banyak perubahan di tataran aturan seperti Perda, SK Walikota dll.

Yang menjadi pertanyaan mengapa sampai saat ini Pusat belum memberikan system dan perangkat lunak (*software*) sehingga daerah dalam melaksanakan program kependudukannya menjadi serba salah, mau melangkah lebih jauh kendala aturan kalau menggunakan SIMDUK dianggap tidak legal. Daerah sepertinya dibiarkan melaksanakan SIAK sendiri-sendiri, padahal kalau melihat *blue print*, bahwa SIAK dengan on line dan diperkenalkannya NIK secara nasional akan sangat membantu untuk mendata terjadinya setiap peristiwa kependudukan seperti lahir, mati, pindah dan datang. Dengan diberlakukan identitas tunggal (*single identy number*) secara nasional akan memudahkan administrasi penduduk. Sehingga sampai saat ini daerah-daerah masih banyak menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIMDUK) bahkan ada yang masih manual dengan mesin tik tanpa menggunakan *database*.

Tugas

Buatlah kelompok tetap 7-8 Orang. Bacalah berbagai referensi lainnya untuk tema tantangan pendudukan di Indonesia dan Sumatera Selatan. Laporkan tugas bacaan kelompok Saudara serta diskusikanlah dengan kelompok lain untuk menginventaris masalah-masalah kependudukan sekaligus menjawab apakah penyebab munculnya masalah-masalah kependudukan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Apakah masalah-masalah kependudukan tersebut menjadi tantangan kita ke depan serta apa jalan keluar yang dapat direkomendasikan. Buatlah kesimpulan hasil diskusi tersebut.

BAB IX
PERUBAHAN KEPENDUDUKAN

Pendahuluan

Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertambahan penduduk merujuk pada semua spesies, tetapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertambahan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Pertambahan penduduk sendiri dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Di mana pertambahan penduduk alami hanya dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat dianggap "kurang penduduk" bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi.

Perubahan Penduduk yang Pesat

Pada setiap tanggal 11 Juli, diperingati sebagai Hari Kependudukan Internasional (*World Population Day*). Dalam konteks nasional, kita sedang menghadapi laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Angka pertumbuhan penduduk Indonesia cukup tinggi, yakni 1,49%, yang berarti tiap tahun pertambahan penduduk mencapai 3,5-4 juta. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan, bila pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka diprediksi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050-2060 mencapai 450-480 juta atau dua kali lipat dari jumlah penduduk sekarang. Kenaikan jumlah penduduk tersebut jika dibandingkan dengan negara sekitar kita terlihat sangat besar. Kita lihat saja Malaysia, negara itu jumlah penduduknya 25,7 juta, kalah jauh dengan penduduk kita. Australia juga hanya 23 juta. Bahkan, jika dibandingkan dengan Singapura yang 4,5 juta, pertumbuhan penduduk kita dalam satu dekade enam kali lipat.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat cepat dan terus meningkat. Jika tidak hati-hati dalam mengelolanya, maka negeri ini akan menghadapi ledakan penduduk (*baby booming*). Problem yang akan dihadapi pertambahan penduduk ini terutama adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, jelas setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula ketersediaan pangan. Begitu juga energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi yang besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Karena itu, saat ini

dibutuhkan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan jumlah penduduk.

Berapa banyak dana yang dapat dihemat Indonesia dengan keberhasilan program KB selama ini? Diperkirakan, pada saat yang sama, Indonesia sudah menunda 80 juta angka kelahiran. Di sinilah kita melihat *cost benefit* program KB secara ekonomis, yang sangat mengagumkan dan mampu menghemat triliunan rupiah. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda dan memperlambat program. Bahkan, dengan merujuk hasil kajian ini, pemerintah harus mempercepat pelaksanaan program, dengan dukungan penuh. Pertumbuhan penduduk juga harus diimbangi dengan suplai untuk kebutuhan manusia. Karena secara alamiah, suplai untuk kebutuhan hidup terbatas dan bertambah secara terbatas pula, ketimpangan antara suplai dan kebutuhan akan semakin cepat. Dalam ketimpangan dan kelangkaan itu, ledakan jumlah penduduk akan berdampak pada kualitas kehidupan manusia. Maka, BKKBN perlu melakukan terobosan-terobosan untuk menyasar kelompok muda. Pemerintah dituntut memberikan perhatian lebih pada upaya untuk meredam laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah perlu membuat terobosan dan langkah jitu berkaitan dengan upaya pengendalian kuantitatif penduduk (jumlah, distribusi, dan pertumbuhannya).

Sasaran pokok dari agenda ini adalah menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kependudukan. Sasaran dari agenda ini

adalah menyiapkan data basis dan informasi kependudukan yang akurat untuk kepentingan perencanaan operasional seluruh sektor pembangunan. Termasuk dalam agenda ini adalah penyelenggaraan layanan catatan sipil dalam rangka memenuhi hak-hak sipil setiap warga. Program penyediaan data basis kependudukan merupakan sebuah keniscayaan dalam merealisasikan agenda ketiga ini, terlebih di era otonomi daerah. Bukan hanya data basis kependudukan yang bersifat makro, tetapi juga data kependudukan mikro.

Jika data makro sangat berguna untuk kepentingan evaluasi atau membuat proyeksi, maka data mikro seperti yang sudah dilakukan BKKBN melalui kegiatan pendataan keluarga akan sangat bermakna sebagai bahan perencanaan operasional. Problem kependudukan juga menjadi bagian inti dari peliknya persoalan tentang pengangguran, kemiskinan, lingkungan hidup yang kurang terkontrol, dan juga gap dalam strata masyarakat. Karena itu, aspek manajemen kependudukan yang terkontrol menjadi acuan penting untuk meredam sisi negatif atas kegagalan pelaksanaan pembangunan (Ahcmad Ali, 2004). Ada baiknya pula, Kementerian Kependudukan yang dulu pernah ada dalam pemerintahan Indonesia, sebaiknya dibentuk kembali. Keberadaan kementerian ini sangat diperlukan dalam upaya meredam laju pertumbuhan penduduk.

Kementerian Kependudukan sangat membantu BKKBN dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan. BKKBN yang berjalan di lapangan dengan program-program KB. Ledakan jumlah penduduk akan berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas

kesehatan, pendidikan, lalu lintas serta ketersediaan pangan. Ledakan jumlah penduduk ini pun akan berdampak terhadap pemenuhan gizi bayi serta meningkatnya angka pengangguran. Dalam 20 tahun ke depan, 1,1 miliar orang lagi akan tinggal di kota-kota Asia dibandingkan saat ini. Banyak kota Asia yang tumbuh secara alami meski tanpa migrasi. Namun, bersamaan dengan pertumbuhan alami dan migrasi itu, urbanisasi meledak. Kota-kota di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam akan hampir berlipat dua besarnya dalam waktu 20 tahun mendatang.

Hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035 menunjukkan bahwa Indonesia kini tengah memasuki era bonus demografi dengan puncaknya pada 2028-2030. Adapun angka beban tanggungan pada saat puncak bonus demografi tercatat sebesar 46,9, yang artinya untuk setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 46,9 atau sekitar 47 penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Dengan rasio penduduk usia produktif dan nonproduktif dua berbanding satu itu, merupakan jendela peluang dengan potensi yang sangat luar biasa untuk menggerakkan pembangunan di berbagai sektor.

Negara-negara Eropa Barat, Jepang, dan Korea Selatan, misalnya, berhasil mentransformasi perekonomian mereka menjadi negara kaya karena berhasil memanfaatkan bonus demografi. Untuk itu, pemerintah harus serius dan perhatian terhadap masalah ini. Bonus demografi yang kita miliki jangan sampai menjadi bom waktu yang meruntuhkan bangsa ini. Kuncinya adalah pengendalian jumlah penduduk yang

tepat, benar, dan mampu mendekatkan ke arah tujuan nasional dalam mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera.

Di sinilah dibutuhkan kecerdasan, terobosan, program, dan kinerja nyata pemimpin bangsa dalam pembangunan yang berwawasan kependudukan dan menjadikan bonus demografi sebagai prioritas utama dengan penyelarasan segala bidang supaya tidak menjadi beban.

Perubahan Penduduk dan Migrasi

Salah satu faktor perubahan penduduk adalah migrasi. Berikut ini adalah beberapa teori tentang migrasi.

Teori Dorong-Tarik

Migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Di sini tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah perbedaan itu bersifat sukarela atau terpaksa. Jadi migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Tanpa mempersoalkan jauh dekatnya perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi mempunyai tempat asal, tempat tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Faktor jarak merupakan faktor yang selalu ada dari beberapa faktor penghalang.

Teori Gravitasi Zipl Zipl

Teori mengemukakan suatu model gravitasi klasik dalam kaitannya dengan migrasi. Dikatakan bahwa jumlah migran di antara dua tempat adalah berbanding lurus dengan hasil kali jumlah penduduk dua tempat tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak transportasi terpendek antara dua tempat itu.

Namun begitu teori ini mengabaikan faktor yang penting artinya bagi intensitas migrasi yaitu informasi daerah tujuan dan hubungan dengan kawan atau famili yang telah tinggal lebih dahulu di daerah tujuan. Untuk Indonesia hal ini sangat besar peranannya sebab beradanya kawan atau famili di daerah tujuan mendorong seseorang untuk meninggalkan daerahnya.

Teori Gravitasi

Migrasi yang disusun dalam hukum-hukum migrasi yang terkenal sampai sekarang. Di antaranya adalah semakin jauh jarak, semakin berkurang volume migran. Teori ini dikenal sebagai *distance-decay theory*. Setiap arus migrasi yang benar, akan menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Adanya perbedaan desa dengan kota akan mengakibatkan timbulnya migrasi. Wanita cenderung bermigrasi ke daerah-daerah yang dekat letaknya. Kemajuan teknologi akan meningkatkan intensitas migrasi. Motif utama migrasi adalah ekonomi. Teori-teori Ravenstein tersebut ternyata masih relevan sampai sekarang, meskipun sudah satu abad yang lalu.

Teori migrasi Jones

Dalam bukunya Jones mendeskripsikan bahwa migrasi merupakan salah satu proses modernisasi. Jones juga berpendapat bahwa meningkatnya modernisasi tidak saja akan menarik penduduk dari daerah lain tetapi juga akan mempertinggi motivasi penduduk di daerah itu untuk bermigrasi, karena semakin meningkatnya pendidikan sarana transportasi dan komunikasi. Hal ini terjadi karena untuk bermigrasi sarananya semakin mudah dengan adanya

perkembangan di bidang teknologi transportasi dan juga teknologi komunikasi.

Teori Migrasi Ida Bagus Mantra

Dalam kesimpulan hasil penelitiannya di Yogyakarta, memperkuat pendapat bahwa aspek ekonomi merupakan alasan utama dari migrasi. Ia mengatakan bahwa rata-rata pemilikan tanah pertanian di daerah penelitiannya di Kadirojo sebesar 0,126 ha., sedangkan di Piring sebesar 0,086 ha/keluarga. Sempitnya tanah pertanian mendorong penduduk pergi meninggalkan desanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama orang bermigrasi.

Teori Lewis Fei Ranis

Dalam model ini ekonomi yang belum berkembang terdiri dari dua sektor, yaitu: (1) sektor subsistem pertanian yang tradisional dengan ciri produktivitas nol atau rendah sekali dan (2) sektor industri modern di kota dengan produktivitas tinggi yang mana tenaga kerjanya merupakan transfer secara gradual dari sektor subsistem.

Jumlah transfer tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan lapangan kerja berkaitan dengan perluasan industri. Cepatnya transfer tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja berkaitan dengan perluasan industri. Cepatnya transfer tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja ini bergantung kepada besarnya investasi. Diasumsikan bahwa semua keuntungan yang diperoleh, diinvestasikan kembali, dan upah buruh adalah tetap, dalam arti bahwa upah buruh di sektor industri lebih tinggi dari upah buruh rata-rata di sektor pertanian. Dalam keadaan seperti ini pasaran tenaga kerja yang berasal dari desa akan sangat longgar (*perfecky elastic*).

Teori Migrasi Todaro

Todaro mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah merupakan fenomena ekonomi yang rasional. Model todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antarpendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan dan di perkotaan. Anggapan yang mendasar adalah bahwa para migran tersebut memperhatikan berbagai kesempatan kerja yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang bisa memaksimumkan manfaat yang mereka harapkan dari bermigrasi tersebut. Manfaat-manfaat yang diharapkan ditentukan oleh perbedaan-perbedaan nyata antara kerja di desa dan di kota serta kemungkinan migrasi tersebut untuk mendapatkan kerja di kota.

Pada hakikatnya, teori ini menganggap bahwa angkatan kerja, baik aktual maupun potensial, memperbandingkan pendapatan yang mereka "harapkan" di perkotaan pada suatu waktu tertentu dengan memperhitungkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Akhirnya mereka melakukan migrasi jika pendapatan yang 'diharapkan" di kota lebih besar daripada pendapatan rata-rata di pedesaan.

Teori Migrasi Shryock and Siegel

Migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keruangan yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanent antar unit-unit geografi tertentu.

Teori Migrasi Standing and Mantra

Migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang melampaui batas-batas wilayah yang telah ditetapkan selama satu atau dua tahun dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan.

Teori Migrasi Ogue

Migrasi didefinisikan sebagai perubahan tempat kediaman yang menyangkut terjadinya perubahan menyeluruh yang disertai dengan penyesuaian dari orang yang pindah ke lingkungan masyarakat yang baru.

Perubahan Penduduk dan Imigrasi

Imigrasi menurut *Collins Dictionary* adalah kedatangan orang ke suatu negara untuk tinggal dan bekerja di sana. Sedangkan menurut *Oxford Living Dictionary* adalah tindakan datang untuk tinggal secara permanen di negara asing. Sementara menurut Wikipedia adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, di mana ia bukan merupakan warga negara. Imigrasi merujuk pada perpindahan untuk menetap permanen yang dilakukan oleh imigran, sedangkan turis dan pendatang untuk jangka waktu pendek tidak dianggap imigran. Walaupun demikian, migrasi pekerja musiman (umumnya untuk periode kurang dari satu tahun) sering dianggap sebagai bentuk imigrasi. PBB memperkirakan ada sekitar 190 juta imigran internasional pada tahun 2005, sekitar 3% dari populasi dunia. Sisanya tinggal di negara kelahiran mereka atau negara penerusnya.

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat negara lain. Pengertian imigrasi adalah proses perpindahan orang dari suatu negara/bangsa ke negara lain dengan tujuan untuk menetap secara permanen, di mana orang tersebut bukanlah warga negara dari negara yang dituju.

Pada tataran yang lebih makro kegiatan ini sesungguhnya berada dalam satu *frame* dengan peta perubahan hubungan global, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Dalam bidang pelayanan publik, istilah imigrasi merujuk pada rangkaian kegiatan dalam memberi pelayanan, penegakan hukum, pengamanan terhadap proses keluar masuknya manusia dari dan ke wilayah suatu negara, serta pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah negara tersebut.

Orang yang melakukan imigrasi ke negara lain disebut dengan imigran. Dalam hal ini, turis, rombongan olahraga dan seni, diplomat, dan pekerja asing, tidak termasuk dalam kategori imigran karena hanya sementara di negara yang dituju. Akan tetapi, para pekerja musiman biasanya tetap dianggap sebagai imigran. Menurut data PBB, sekitar 190 juta orang di dunia ini termasuk imigran. Data tersebut diambil pada tahun 2005.

Secara historis, proses imigrasi telah memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya yang besar bagi negara. Pengalaman imigran yang beragam dalam banyak kasus menghasilkan perkembangan masyarakat multikultural, banyak negara modern dicirikan oleh beragam budaya dan etnis yang berasal dari periode imigrasi sebelumnya.

Pada periode pasca-Perang Dunia II, imigrasi sebagian besar merupakan hasil dari gerakan pengungsi setelah perang, dan selama tahun 1950-an dan 60-an, akhir penjajahan di Asia dan Afrika. Imigrasi dari daerah-daerah ini ke bekas pusat-pusat kekaisaran, seperti Inggris dan Perancis, meningkat. Di Inggris, misalnya, Undang-Undang Kebangsaan Inggris 1948

memberikan warga negara di bekas wilayah kolonial Persemakmuran (angka potensial 800 juta) hak kebangsaan Inggris. Imigran memainkan peran penting dalam pembangunan kembali infrastruktur Eropa setelah Perang Dunia II dengan bekerja di industri berat, dalam layanan kesehatan, dan transportasi. Namun, mereka mengalami diskriminasi, yang berkontribusi di beberapa negara terhadap isolasi kelompok etnis dan komunitas minoritas

Beberapa negara berusaha untuk berurusan dengan pengucilan sosial imigran dengan membatasi jumlah imigrasi di masa depan, sedangkan yang lainnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif yang berfokus pada penggabungan berbagai budaya menjadi satu pemahaman koheren tentang kewarganegaraan. Pendekatan ini telah menjadi bagian integral dari gagasan kewarganegaraan di Amerika Serikat, di mana imigran yang mengambil kewarganegaraan Amerika Serikat. bersumpah setia ke tempat tinggal baru mereka. Kritik terhadap pendekatan ini menyoroti asimilasi beragam budaya dan represi perbedaan atas nama negara. Karena itu, imigrasi terkait erat dengan kewarganegaraan dan hak-hak sosial dan politik yang menjadi hak warga negara. Berbagai temuan untuk hubungan antara imigrasi dan kejahatan di seluruh dunia, tetapi penemuan di Amerika Serikat bahwa imigrasi tidak berdampak pada tingkat kejahatan atau mengurangi tingkat kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa negara asal penting untuk kecepatan dan kedalaman asimilasi imigran, tetapi ada keseluruhan asimilasi yang cukup baik untuk imigran generasi pertama dan kedua.

Bukti luas diskriminasi terhadap kelahiran asing dan populasi minoritas dalam peradilan pidana, bisnis, ekonomi, perumahan, perawatan kesehatan, media dan politik di Amerika Serikat dan Eropa. Terkait dengan dampak ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa migrasi bermanfaat bagi negara penerima dan pengirim. Penelitian, dengan beberapa pengecualian, menemukan bahwa rata-rata imigrasi memiliki efek ekonomi positif pada penduduk asli, tetapi dicampuradukkan apakah imigran yang berketerampilan rendah berdampak buruk pada penduduk asli berketerampilan rendah. Penghapusan hambatan terhadap migrasi akan memiliki efek mendalam pada PDB dunia, dengan perkiraan keuntungan berkisar antara 67-147 persen. Ekonom pembangunan berpendapat bahwa mengurangi hambatan mobilitas tenaga kerja antara pengertian negara berkembang dan pengertian negara-negara maju akan menjadi salah satu alat yang paling efisien untuk pengentasan kemiskinan.

Walaupun migrasi manusia telah berlangsung selama ribuan tahun, konsep modern imigrasi, khususnya pada abad ke-19, terkait dengan perkembangan negara-bangsa dengan kriteria kewarganegaraan yang jelas, paspor, pengawasan perbatasan permanen, serta hukum kewarganegaraan. Kewarganegaraan dari suatu negara memberikan hak-hak khusus kepada penduduk negara tersebut, sementara para imigran dibatasi oleh hukum imigrasi. Negara (bangsa) membuat imigrasi menjadi suatu isu politik; per definisi ia adalah tanah air suatu bangsa yang ditandai oleh kesamaan etnis atau budaya, sedangkan imigran memiliki etnis dan budaya yang berbeda. Hal ini kadang menyebabkan suatu

ketegangan sosial, xenofobia, dan konflik identitas nasional pada banyak negara maju.

Ada pula anggota keimigrasian, atau pegawai atau petugas imigrasi yang setiap bertempat di tempat-tempat kedatangan dan keberangkatan internasional. Tugas anggota imigrasi adalah untuk menjaga dan melaksanakan tugas untuk mengawasi datangnya dan perginya suatu warga atau orang dengan melihat serta mengesahkan identitas orang tersebut yang akan bepergian ke luar negeri. Juga memiliki tugas untuk mengawasi orang yang datang dari luar negeri ke negeri imigrasi itu sendiri. Tugas keimigrasian antara lain untuk juga melihat dan mengidentifikasi datangnya orang itu ke negeri imigrasi itu sendiri.

Lokasi para Anggota Keimigrasian itu sendiri antara lain: Bandara Udara Internasional, Pelabuhan Laut Internasional dan Perbatasan Negara guna menjaga, mengawasi, dan memperhatikan datangnya dan perginya suatu orang maupun barang yang datang dan pergi dari negara satu maupun ke negara lainnya.

Masalah keimigrasian Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian, Keimigrasian adalah "*hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.*" Perkembangan global dewasa ini telah mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Sehingga

hal tersebut perlu diatur dalam UU Imigrasi dan Peraturan Pelaksanaannya guna menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Imigrasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Sesuai dengan pengertian imigrasi di atas, adapun jenis-jenis migrasi adalah sebagai berikut.

1. Migrasi masuk *(in migration)*, yaitu masuknya penduduk ke daerah tujuan tertentu (dari luar provinsi, luar pulau, atau bahkan luar negeri).
2. Migrasi keluar *(out migration)*, yaitu perpindahan penduduk keluar menuju daerah lain. Penduduk tersebut bisa berpindah ke luar provinsi, luar pulau, atau luar negeri.
3. Migrasi netto *(nett migration)*, yaitu istilah yang dipakai untuk menjelaskan selisih jumlah migrasi masuk dan keluar.
4. Migrasi bruto *(gross migration)*, yaitu istilah yang dipakai untuk menjelaskan jumlah migrasi masuk dan keluar.
5. Migrasi Total *(total migration)*, yaitu total keseluruhan kejadian migrasi, mencakup migrasi semasa hidup dan migrasi pulang.
6. Migrasi internasional *(international migration)*, yaitu perpindahan penduduk antarnegara.
7. Migrasi semasa hidup *(life time migration)*, yaitu perpindahan penduduk yang dilakukan berdasarkan tempat kelahiran. Artinya, saat pencacahan atau sensus penduduk, mereka tinggal di daerah lain atau berbeda dari tempat lahirnya. Migrasi ini juga dikenal dengan istilah *life time migration*.

8. Migrasi parsial *(partial migration)*, yaitu jumlah perpindahan penduduk suatu daerah ke daerah lain sebagai tujuan.
9. Arus migrasi *(migration stream)*, yaitu besarnya jumlah migrasi dari suatu daerah tertentu ke dearah tujuan dalam periode tertentu.
10. Urbanisasi *(urbanization)*, yaitu perpindahan penduduk dari daerah perdesaan menuju ke wilayah perkotaan atau kota besar dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu.
11. Transmigrasi *(transmigration)*, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang lebih jarang penduduknya di wilayah Indonesia untuk menetap yang mana perpindahan ini ditetapkan dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan pembangunan. Perpindahan ini juga bisa dikarenakan faktor lain yang dirasa perlu menurut ketentuan dalam undang-undang.

Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor penarik (*pull factor*) yang mendorong terjadinya imigrasi.

1. Adanya kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
2. Adanya kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
3. Adanya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Karena keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.

5. Adanya tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung
6. Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang -orang dari desa atau kota kecil.

Ada juga faktor penarik lain yang meliputi empat faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi.

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal.
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan.
3. Rintangan-rintangan yang menghambat. hal ini berbeda bagi masing-masing individu, ada yang memandang ringan dan ada pula yang memandangnya sebagai hal yang berat(tidak dapat di atasi), contoh: jarak yang jauh, dan biaya transportasi sehingga menjadi penghalang bagi seseorang untuk bermigrasi.
4. Faktor-faktor pribadi yakni kepastian seseorang dalam mengambil keputusan untuk ke daerah lain.

Ada juga beberapa faktor yang tidak kalah penting dalam mendorong terjadinya migrasi penduduk, antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyumbang kepada berlakunya proses migrasi ini. kedudukan ekonomi yang mantap dan kukuh menyebabkan wujudnya banyak sektor-sektor pertanian, pembinaan dan perkilangan, sekaligus membuka peluang kepada rakyat sebuah negara termasuk juga golongan pendatang yang datang khususnya untuk mencari rezeki di negara orang.

2. Taraf ekonomi. Taraf ekonomi yang rendah di negara sendiri. Bagi negara Jerman dan Eropa lain khususnya, kemakmuran ekonomi sering dijadikan alasan untuk menjelaskan mengapa negara ini menarik perhatian ramai para imigran untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak meskipun nyawa yang menjadi taruhannya.
3. Faktor sosial budaya. Sebenarnya faktor sosial budaya juga memainkan peranan utama menyebabkan pendatang ke Jerman semakin bertambah dari tahun ke tahun apalagi dengan kebijakan yang dibuat oleh Negara Jerman, bahwasanya Jerman membuka negaranya bagi para imigran. Bahkan boleh dikatakan faktor sosial budaya ini memainkan peranan yang sama pentingnya dengan faktor ekonomi, menjadi daya tarik kepada pendatang.
4. Faktor kestabilan politik. Kestabilan politik sebuah negara memainkan peranan yang penting dan berkaitan erat dengan ekonomi negara dan proses migrasi antara bangsa. Sebuah negara yang aman dan makmur secara tidak langsung dapat mengelakkan berlakunya migrasi penduduk negara tersebut ke negara lain, sebaliknya menyebabkan penduduk negara lain berhijrah ke negara tersebut.

Proses Imigrasi penduduk dari daerah tujuan. Peristiwa migrasi telah terjadi sejak dahulu baik dari kota ke kota, dari desa ke desa maupun dari desa ke kota. Faktor yang menyebabkannya adalah faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Pada umumnya faktor pendorong dan penarik disebabkan oleh sosial ekonomi, budaya, agama, politik, pribadi, dan sebagainya. Salah satu dari faktor itu sudah menimbulkan migrasi misalnya faktor

alam yang semakin sempitnya lahan di daerah asal dan adanya kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan di daerah tujuan (faktor ekonomi), maka seseorang memutuskan untuk pindah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan migrasi karena terdapat nilai kemanfaatan atau ketimpangan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain. Demikian juga tentang rute yang ditempuh migran adakalanya langsung dan tak langsung dari daerah asal menuju daerah tujuan dipengaruhi oleh faktor rintangan seperti faktor jarak, biaya, dan informasi. Bila faktor rintangan bukan merupakan faktor penghambat, maka biasanya migran melakukan migrasi langsung dan sebaliknya jika merupakan penghambat biasanya migran melakukan migrasi tidak langsung.

Pola migrasi di negara-negara yang sudah berkembang pesat biasanya sangat kompleks. Fenomena ini menggambarkan kesempatan ekonomi yang lebih seimbang dan menunjukkan saling ketergantungan (interdependensi) antarwilayah di dalamnya, serta merefleksikan keseimbangan aliran sumber daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang, pola migrasi yang terjadi menunjukkan suatu pengutuban (polarisasi), yaitu pemusatan arus migrasi ke wilayah-wilayah tertentu saja, khususnya kota-kota besar. Pola migrasi desa-kota di negara berkembang (termasuk di Indonesia) menunjukkan adanya konsentrasi pendatang yang tinggi di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, yaitu kota-kota yang relatif mempunyai sektor modern yang besar dan dinamis. Sedangkan kota-kota kecil lainnya yang kurang

dinamis sering kali menunjukkan tingkat migrasi netto (selisih migrasi keluar dengan migrasi masuk) yang rendah.

Dengan demikian dikemukakan migrasi desa-kota tidak hanya disebabkan oleh faktor dorongan dari desa, tetapi juga oleh faktor daya tarik di kota. Berkenaan dengan hal tersebut, perpindahan (mobilitas) tenaga kerja desa-kota tidak selalu berpola pada pergerakan tenaga kerja dari daerah kecil (kecamatan/kabupaten) ke daerah besar (kota provinsi/ibu kota). Pola daerah tujuan tenaga kerja tersebut mempunyai empat kategori, yaitu: *urban town*, *small city*, *medium-sized city* dan *big city*.

Secara umum migrasi menimbulkan dampak positif dan negatif di daerah tujuan. Dampak positifnya sesuai dengan tujuan migran yakni semakin meningkatnya pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan, tersedianya lapangan kerja baru, terjadinya transformasi gaya hidup dan sebagainya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan para migran adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, menyempitnya lahan pertanian, munculnya pengangguran dan meningkatnya kriminalitas.

Masalah demikian ternyata terus berlangsung sampai saat ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Peristiwa migrasi masih berlangsung hingga sekarang, ini berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama ini belum dapat mengimbangi jumlah migrasi dan arus migrasi, sehingga menimbulkan masalah sosial ekonomi dan budaya baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Adanya migrasi berdampak pada perkotaan. Arus migrasi akan membawa dampak bagi daerah yang dituju yaitu daerah perkotaan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Beberapa ahli ekonomi menyatakan bahwa migrasi yang berlebihan akan mengakibatkan pengangguran kota dan ada juga yang menyatakan sebaliknya bahwa migrasi akan membawa dampak baik bagi para migran.

Arus migrasi yang berlebihan akan berdampak negatif pada daerah tujuan yaitu perkotaan antara lain timbulnya pengangguran kota dan terbentuknya pemukiman kumuh, yang disebut sebagai *slum area*. Dan daerah perkotaan, dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya.

Adapun dampak positif yang diperoleh daerah tujuan (perkotaan) akibat migrasi yaitu terbentuknya aglomerasi atau yang disebut dengan pengelompokkan beberapa perusahaan dalam suatu daerah atau wilayah sehingga membentuk daerah khusus industri. Aglomerasi terjadi karena adanya hubungan saling membutuhkan produk di antara berbagai industri, seperti tersedianya fasilitas (tenaga listrik, air, perbengkelan, jalan raya, pemondokan, juga terdapat tenaga kerja terlatih). Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya migrasi ke daerah tujuan perkotaan secara otomatis memunculkan tenaga kerja terlatih maka akan menciptakan aglomerasi yang membawa dampak positif bagi daerah perkotaan.

Tugas

Buatlah kelompok tetap 7-8 Orang. Bacalah berbagai referensi lainnya untuk tema perubahan kependudukan di Indonesia dan Sumatera Selatan. Laporkan tugas bacaan kelompok Saudara serta diskusikanlah dengan kelompok lain untuk menjawab perubahan-perubahan kependudukan apa yang ada di sekitar kita. Jawablah juga apakah perubahan kependudukan ini mengarah pada dampak positif atau negatif. Jika berdampak negatif apa jalan keluar yang dapat direkomendasikan. Buatlah kesimpulan hasil diskusi tersebut.

BAB X
ANGKATAN KERJA

Pendahuluan

Jumlah atau besarnya penduduk umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan *income per capita* suatu negara, yang secara kasar mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah penduduk yang sangat besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Tetapi ada pula yang berpendapat lain yaitu bahwa justru penduduk yang jumlahnya sedikit yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di samping kedua pendapat ini, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jumlah sumber-sumber ekonominya, baru dapat diperoleh kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah penduduk tidak boleh terlampau sedikit tetapi juga tidak boleh terlampau banyak.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Pembangunan ekonomi sangat diperlukan untuk memperkecil tingkat pengangguran. Dengan pembangunan ekonomi diharapkan laju pertumbuhan ekonomi dapat selalu dipertahankan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan penduduk, sehingga kegiatan perekonomian akan menjadi lebih luas dan selanjutnya dapat memperkecil jumlah orang yang menganggur.

Uraian mengenai ketenagakerjaan dalam *resume* ini akan disoroti mengenai ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang digunakan di samping hasil sensus penduduk juga digunakan hasil Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) maupun hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Jakarta. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah data ketenagakerjaan dari Susenas lebih banyak digunakan daripada data Sakernas karena dimungkinkan untuk analisis wilayah kabupaten atau kota madya.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Studi Demografi dan Karakteristik Ekonomi Penduduk

Di masyarakat, banyak topik yang bersifat ekonomi ketenagakerjaan dianggap hanya "kepunyaan" ekonom. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, analisis topik tersebut memerlukan data yang berasal dari disiplin ilmu

demografi, seperti sensus dan Supas (Survei Penduduk Antar Sensus), atau ilmu sosial lainnya seperti Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Contoh studi demografi yang menghasilkan informasi ekonomi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

1. Jumlah tenaga kerja (*manpower*), angkatan kerja (*labor force*), serta proporsi penduduk berusia dewasa yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu negara.
2. Jumlah orang yang menganggur (*unemployed*) atau setengah menganggur (*underemployed*), dan proporsi mereka terhadap angkatan kerja secara keseluruhan.

Komposisi angkatan kerja dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

1. Lapangan pekerjaan (*industry*), yaitu meliputi ragam dari lapangan pekerjaan dan jumlah orang yang berada di masing-masing lapangan pekerjaan tersebut.
2. Jenis pekerjaan (*occupation*), yang meliputi ragam jenis pekerjaan dan jumlah orang yang berada pada masing-masing jenis pekerjaan tersebut.
3. Status pekerjaan, yakni apakah penduduk bekerja di sektor formal atau informal.
4. Regularitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh angkatan kerja, karena terdapat pekerjaan yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja (*part-time*), atau jumlah jam kerja yang dilakukan dalam satu hari atau satu minggu.
5. Tingkat pendapatan atau upah dan distribusinya di kalangan penduduk yang bekerja.

Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Dalam studi kependudukan sering disebut "tenaga kerja" yang diterjemahkan dari istilah *man power*, yakni seluruh penduduk yang dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif. Dulu Indonesia sering kali menyebutkan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Setelah itu dipakai ukuran 15 tahun ke atas yang disesuaikan dengan ketentuan internasional. Dalam dunia industri atau bisnis konsep "tenaga kerja" diartikan sebagai personel yang bekerja dalam industri atau bisnis. Penduduk di suatu negara mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi hanya sebagian dari mereka yang secara langsung terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa tersebut (disebut kegiatan produktif).

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diaktakan bahwa penduduk di suatu negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Penduduk yang "aktif" secara ekonomi (*economically active population*). Penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama adalah penduduk yang bekerja memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Kelompok kedua adalah penduduk yang belum bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan (termasuk mereka yang baru pertama kali mencari pekerjaan).
2. Penduduk yang "tidak aktif" secara ekonomi (*economically inactive population*). Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi adalah mereka yang tidak bekerja

atau tidak sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini tidak memproduksi barang dan jasa, dan hanya mengonsumsi barang yang diproduksi orang lain.

Skema Ketengakerjaan dengan bagan, seperti di bawah ini.

Ukuran Dasar Ketenagakerjaan

Dalam studi ketenagakerjaan, dipakai beberapa ukuran yang menggambarkan situasi ketenagakerjaan suatu negara atau sekelompok masyarakat. Umumnya, indikator ketenagakerjaan memakai angka (*rate*), seperti angka partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah tenaga kerja (penduduk 15 tahun ke atas). Angka ini sering disebut angka partisipasi umum, tetapi untuk analisis yang lebih mendalam dipakai ukuran yang lebih spesifik.

Ada beberapa ukuran dasar ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut.

Angka aktivitas kasar

Angka aktivitas kasar disebut juga *Crude activity rate*. Angka aktivitas kasar adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah seluruh penduduk 15 tahun ke atas dan dinyatakan dalam persentase. Angka ini dikatakan kasar sebab belum mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah angkatan kerja, antara lain komposisi umur penduduk dan jenis kelamin. Akan tetapi, angka ini dapat digunakan untuk melakukan perbandingan, di mana peneliti ingin menunjukkan jumlah relatif dalam angkatan kerja tanpa memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Angka Aktivitas Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Perhitungan ini paling banyak dipakai dalam analisis ketenagakerjaan dan biasa disebut dengan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menurut umur dan jenis kelamin. Angka ini merupakan angka dasar (*basic rates*) yang dipelajari dan menjadi dasar untuk membuat proyeksi angkatan kerja. APAK selanjutnya dapat dipecah menurut tingkat pendidikan, status perkawinan, tempat tinggal di perkotaan atau pedesaan, dan lain-lain.

Angka Aktivitas Menurut Jenis Kelamin

Angka aktivitas menurut jenis kelamin adalah jika angka aktivitas (atau angka partisipasi) disajikan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dilihat dari perbedaan, biasanya angka aktivitas untuk laki-laki lebih tinggi daripada angka aktivitas untuk perempuan.

Sumber-Sumber Data Ketenagakerjaan

Garis besar sumber data untuk keperluan analisis ketenagakerjaan yang dipakai di Indonesia adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dalam meneliti mengenai ketenagakerjaan hendaknya diperhatikan definisi bekerja, referensi waktu yang berbeda dari berbagai sensus, serta dalam metodologi pengambilan sampelnya. Dari pengamatan, sejarah pengumpulan data angkatan kerja di Indonesia terdapat perubahan referensi waktu dan tambahan definisi tentang bekerja. Ada beberapa sumber data ketenagakerjaan, yakni sebagai berikut.

Sensus Penduduk

Sensus Penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Sampai sekarang telah dilakukan empat sensus penduduk pada tahun 1961, 1971, 1980 dan 1990. Sensus Penduduk 2000 sekarang sedang berjalan. Empat sensus terdahulu mengumpulkan informasi kependudukan umum yang memungkinkan dianalisis struktur dan permasalahan kependudukan.

Ciri umum sosial-ekonomi penduduk juga dikumpulkan. Sebagian informasi penting yang dikumpulkan berkaitan dengan aktivitas ekonomi penduduk, yaitu mengenai angkatan kerja dan kesempatan kerja. Di sini digunakan pendekatan "*labor force*" dalam menstruktur pertanyaan. Tujuan utama adalah memberikan data "*benchmark*" untuk angkatan kerja dan kesempatan kerja setiap sepuluh tahun.

Daftar pertanyaan tidak serinci seperti yang dipakai Sakernas dan Susenas, tetapi semua pertanyaan penting yang diperlukan untuk analisis struktur angkatan kerja dan kesempatan kerja dimasukkan dalam sensus. Sebelum sensus tahun 2000, pengumpulan data dilakukan dalam dua bagian, yaitu pencacahan lengkap dan sampel. Pencacahan lengkap mengumpulkan informasi dasar mengenai struktur keluarga meliputi nama anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin dan hubungan keluarga dengan kepala rumah tangga.

Tujuan utama adalah untuk menghasilkan informasi kependudukan pokok untuk tingkat daerah administrasi terendah (desa). Di samping itu informasi ini juga digunakan sebagai *kerangka* untuk pemilihan sampel rumah tangga yang akan diwawancarai dalam *sensus sample*, di mana pada setiap anggota rumah tangga diajukan pertanyaan yang rinci di samping pertanyaan mengenai ciri rumah dan fasilitasnya.

Kedua tahap sensus dilaksanakan di semua provinsi. Pelaksanaan lapangan dari sensus lengkap dilakukan pada bulan September – Oktober, sedangkan sampel sensus pada bulan Oktober. Tanggal sensus adalah 31 Oktober tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2000 referensi waktunya diubah ke bulan Juli untuk bisa dibandingkan secara internasional, karena sebagian besar negara lain mengumpulkan data kependudukan tengah tahun. Data ketenagakerjaan dikumpulkan dalam "*sensus sample*". Sampelnya besar mencakup sekitar 4-5 persen dari seluruh rumah tangga. Pada tahun 1990 mencakup sekitar 200.000 rumah tangga. Dengan sampel yang demikian besar, *sensus sample* menghasilkan data agregasi untuk tingkat kabupaten atau kota madya.

Sensus Penduduk merupakan satu-satunya sumber data yang bisa memberikan data ketenagakerjaan untuk tingkat kabupaten atau kota madya.

Karena itu di samping informasi dasar tentang struktur keluarga, pencacahan lengkap sensus 2000 memasukkan satu atau dua pertanyaan tentang fertilitas, pendidikan, migrasi, dan ketenagakerjaan.

Survei Penduduk Antar Sensus (Supas)

Supas dilakukan secara berkala di tengah antara dua sensus. Tujuannya untuk menghasilkan data kependudukan yang bisa dikaitkan dengan kedua sensus. Survei ini sampai sekarang sudah dilakukan pada tahun 1976, 1985 dan 1995 dan akan tetap dipertahankan di masa depan karena Indonesia tidak mampu melakukan sensus setiap lima tahun.

Sensus sepuluh tahunan saja tidak dapat menangkap secara akurat struktur penduduk Indonesia yang berubah cepat. Data yang lebih sering diperlukan untuk mengikuti penurunan pesat fertilitas dan mortalitas, serta akselerasi migrasi karena program pemerintah yang intensif.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Untuk pertama kali Sakernas dilaksanakan pada tahun 1976, dengan tujuan khusus mengumpulkan data ketenagakerjaan. Survei ini awalnya dirancang untuk memperbaiki kelemahan data ketenagakerjaan dalam sensus penduduk tahun 1971. Sakernas menggunakan "*labor force approach*" murni dengan memakai dua referensi waktu "*current"* dan "*usual".* Karena "*labor force approach*" baru dipakai untuk pertama kali pada tahun itu, sebelum survei

dilaksanakan uji coba secara komprehensip oleh BPS bekerja sama dengan Depnaker dan ILO.

Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas)

Susenas adalah survei rumah tangga multi-tujuan yang dilakukan BPS sudah sejak lama. Susenas pertama dirancang dan dilaksanakan pada tahun 1963 oleh Statistical Research and Development Center (StRDC), sebuah organisasi PBB yang dibentuk untuk membantu pengembangan statistik di BPS. Tujuan utama Supas adalah mengumpulkan data demografis dan ciri sosial-ekonomis rumah tangga.

Survei Seratus Desa (SSD)

Menyediakan informasi untuk daerah kecil sangat mahal, karena dibutuhkan sampel yang besar yang memerlukan organisasi dan implementasi survei dalam skala besar dan bersifat nasional. Kualitas data bisa menurun karena kesalahan sampling atau non-sampling.

Komposisi Penduduk yang Bekerja

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada Februari 2011, jumlah angkatan kerja yang merupakan tenaga kerja aktif secara ekonomi mencapai 119,4 juta orang naik sebesar 2,9 juta orang dibanding keadaan Agustus 2010 dan naik 3,4 juta orang dibanding keadaan Februari 2010. Penduduk yang bekerja pada Februari 2011 sebesar 111,3 juta orang, bertambah sebesar 3,1 juta orang (2,84 persen) dibanding keadaan Agustus 2010, dan

bertambah 3,9 juta orang (3,61 persen) dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2010).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sejak Februari 2010 hingga Februari 2011 TPAK mengalami peningkatan sebesar 2,13 persen, yaitu dari 67,83 persen menjadi 69,96 persen.

Peningkatan TPAK ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang relatif membaik, sehingga memberikan pengaruh terhadap faktor-faktor produksi di Indonesia. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini karena sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

Pada Februari 2011, dari total angkatan kerja sebesar 119,4 juta orang sekitar 93,20 persennya adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja pada keadaan Februari 2011 bertambah sebanyak 6,4 juta orang (6,11 persen) dibandingkan keadaan Agustus 2009 dan bertambah sebanyak 6,8 juta orang (6,50 persen) dibandingkan keadaan dua tahun yang lalu (Februari 2009).

Isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah isu pengangguran. Konsep penganggur yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*). Jumlah penganggur pada Februari 2011 sebesar 8,1 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 475 ribu orang (5,53 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (Februari 2010) yang besarnya 8,6 juta orang.

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), di mana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2011 sebesar 6,80 persen, mengalami penurunan sebesar 0,61 persen dibandingkan pada Februari 2010 yang besarnya 7,41 persen.

Tabel 10.1 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan, 2009–2011 (dalam ribuan)

Kegiatan	2009		2010		2011
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
Angkatan Kerja	113744,41	113833,28	115998,06	116527,55	119399,37
Bekerja	104485,44	104870,66	107405,57	108207,77	111281,74
	(91,86)	(92,13)	(92,59)	(92,86)	(93,20)
Penganggur	9258,96	8962,62	8592,49	8319,78	8117,63
	(8,14)	(7,87)	(7,41)	(7,14)	(6,80)
Bukan Angkatan Kerja	54520,04	55494,93	55019,35	55542,79	51256,76

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,60	67,32	67,83	67,72	69,96
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,14	7,87	7,41	7,14	6,80
Pekerja Tidak Penuh	31 363,29	31 569,93	32 802,94	33 269,34	34 194,26
Setengah Penganggur	15 001,98	15 395,57	15 272,94	15 258,76	15 736,48
Pekerja Paruh Waktu	16 361,31	16 174,36	17 530,00	18 010,58	18 457,79

Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Sehingga permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marginal produk (*Value of Marginal Product, VMP*).

Nilai marginal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product, MPP*) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit *input* variabel (tenaga kerja). Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka

besarnya VMP yang merupakan perkalian antara MPP x P akan sama dengan harga input produk yang bersangkutan yaitu PN. besarnya VMP = P didapatkan dari pernyataan bahwa kombinasi input optimal atau biaya minimal dalam proses produksi akan terjadi bila kurva isoquan menjadi tangens terhadap isocost.

Bila sudut garis pada isoquant sama dengan w/r. sedangkan besarnya sudut di setiap titik pada isoquant sama dengan MPPI/MPPK, maka kombinasi *input* yang optimal adalah: w/r = MPPL/MPPK atau MPPK/r = MPPi7w. Di mana r adalah tingkat bunga implisit yang bersumber dari modal sedangkan w adalah tingkat upah per unit. Apabila persamaan di atas diperluas secara umum maka akan menjadi: MPPX/PX = MPPY/PY.

Dalam kalimat lain, minimisasi biaya input atau maksimalisasi output atas penggunaan input mensyaratkan penggunaan kombinasi yang sedemikian rupa sehingga MPP untuk setiap input dengan harganya sama besar untuk setiap input. Dengan demikian kenaikan satu unit input, misalnya x, akan memperbanyak biaya produksi sebanyak Px, sekaligus akan memperbesar volume produk sebanyak MPPx itu berarti Rasio Px / MPPx merupakan tingkat perubahan total biaya perusahaan untuk setiap perubahan output fisiknya yang secara definitif berarti sama dengan biaya marginalnya (*Marginal Cost, MC*). Dari sini maka persamaan di atas juga bisa diubah menjadi : MPPX/PX = MPPY/PY = MFPN/PN = 1/MC.

Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan beroperasi pada pasar kompetitif sempurna maka persamaan di atas bisa diubah menjadi: MPPx/Px = MPPY/PY = MPPN/PN = 1/MC-1/MR = 1/P

Dari persamaan di atas kita bisa mengetahui bahwa : MPPx/Px = 1/MR = 1/P, sehingga MPPx x P = Px untuk semua input. Ini berarti kurva VMP untuk tenaga kerja merupakan kurva permintaan tenaga kerja *-jangka pendek-* dari perusahaan yang bersangkutan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna (dengan catatan kuantitas semua input lainnya konstan). Bagi setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar kompetisi sempurna itu, harga outputnya senantiasa konstan terlepas dari berapa kuantitas output yang dijualnya. Harga input di sini juga kita asumsikan konstan. Penawarannya elastisitas sempurna untuk semua perusahaan. Dengan demikian kuantitas tenaga kerja yang memaksimalkan laba perusahaan terletak pada titik perpotongan antara garis upah (tingkat upah/uang berlaku untuk pekerja terampil yang dibutuhkan perusahaan) dan kurva VMP perusahaan.

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam teori klasik sumber daya manusia (pekerja) merupakan individu yang bebas mengarnbil keputusan untuk bekerja atau tidak. Bahkan pekerja juga bebas untuk menetapkan jumlah jam kerja yang diinginkannya.

Teori ini didasarkan pada teori tentang konsumen, di mana setiap individu bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan dengan kendala yang dihadapinya. Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang *(leisure)*. Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontroversi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Kombinasi waktu nonpasar dan barang-barang pasar terbaik adalah kombinasi yang terletak pada kurva indefferensi tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. sebagaimana gambar 3, kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu penyediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari W ke W1). Setelah mencapai upah tertentu (W), pertambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja (dari W1 ke WN). Hal ini disebut *Backward Sending Supply Curve*.

Keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan nonkerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. Semakin besar elastisitas tersebut semakin besar peranan input tenaga kerja

untuk menghasilkan output, berarti semakin kecil jumlah tenaga kerja yang diminta.

Sedangkan untuk menggambarkan pola kombinasi faktor produksi yang tidak sebanding (*variable proportions*) umumnya digunakan kurva isokuan (*isoquantities*) yaitu kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) yang menghasilkan volume produksi yang sama. Lereng isokuan menggambarkan laju substitusi teknis marginal atau *marginal rate of technical substitution* atau dikenal dengan istilah MRS. Hal ini dimaksudkan untuk melihat hubungan antara faktor tenaga kerja dan kapital yang merupakan lereng dari kurva isokuant.

Faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja antara lain: (1) faktor ekonomi, seperti fluktuasi ketidakpastian dalam perusahaan; (2) faktor sosial dan politik; (3) faktor perundang-undangan; (4) faktor kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan berbeda-beda sesuai dengan bidang masing-masing; (5) faktor upah tenaga kerja; dan (6) faktor produksi.

Angkatan kerja Indonesia selama 1997 - 2010 tumbuh sebesar 26,13% dengan rata-rata pertumbuhan 2,01% per tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami sedikit kenaikan, dari 66,3% tahun 1997 menjadi 67,7% tahun 2010. Kenaikan jumlah angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk. Sedang pertumbuhan penduduk yang bekerja selama periode tersebut mencapai sekitar 23,2% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,78% per tahunnya.

Tugas 1: Perkembangan Tenaga Kerja Indonesia

Buatlah observasi di sekitar Saudara tentang perkembangan ketenagakerjaan. Buatlah laporan dalam hal-hal apa ada peningkatan dan dalam hal apa saja terdapat penurunan. Diskusikanlah di kelas bersama rekan-rekan dengan menambahkan analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut.

Tugas 2: Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia

Buatlah laporan observasi singkat dengan mendata beberapa orang sarjana di sekitar Saudara (minimal 5 orang). Wawancarai untuk melihat Sarjana lulusan PT, fakultas, dan jurusan apa saja. Buat daftar kendala-kendala yang mereka hadapi. Diskusikanlah di kelas dengan rekan-rekan dengan dosen sebagai narasumber utamanya dengan topik mengapa banyak sarjana yang mengalami pengangguran dan bagaimana menanggulangi agar para sarjana tidak menjadi pengangguran. Buatlah laporan singkat hasil diskusi tersebut.

BAB XI
KELUARGA BERENCANA

Pendahuluan

Salah satu masalah kependudukan utama yang dihadapi Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi, hingga saat ini telah dilakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, terutama melalui pengendalian angka kelahiran atau fertilitas. Upaya penurunan angka kelahiran ini dilakukan dengan cara pemakaian kontrasepsi secara sukarela kepada pasangan usia subur. Dengan pemakaian kontrasepsi oleh pasangan usia subur yang semakin memasyarakat diharapkan semakin banyak kehamilan dan kelahiran yang dapat dicegah, yang kemudian akan menurunkan angka kelahiran atau fertilitas.

Salah satu contoh kebijakan kependudukan yang sangat populer dalam bidang kelahiran (fertilitas) adalah program keluarga berencana. Program ini telah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Tujuan utama program KB ada dua macam yaitu demografis dan nondemografis. Tujuan demografis KB adalah terjadinya penurunan fertilitas dan terbentuknya pola budaya *small family size*, sedangkan tujuan nondemografis adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk yang merata dan berkeadilan. Keluarga berencana merupakan contoh kebijakan langsung di bidang fertilitas dan migrasi.

Pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu dari sekian banyak variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat fertilitas. Sementara itu kontribusi pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran tidak saja

ditentukan oleh banyaknya pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas pemakaiannya. Terkait dengan itu, selama ini program KB nasional memberikan prioritas pada pemakaian jenis kontrasepsi yang mempunyai efektivitas atau daya lindung tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.

Selain itu sasaran pemakaian kontrasepsi juga lebih difokuskan pada pasangan usia subur muda (usia di bawah 30 tahun) dengan paritas rendah (jumlah anak paling banyak dua orang). Dengan meningkatnya pemakaian kontrasepsi yang efektif dan mempunyai daya lindung yang tinggi bagi pasangan usia subur muda paritas rendah diharapkan kontribusi pemakaian kontrasepsi terhadap penurunan angka kelahiran di Indonesia juga akan menjadi semakin besar.

Pengertian Keluarga Berencana

Usia antara 15 – 49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Salah satu cara untuk menekan laju penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Fertilitas memiliki pengukuran, di mana angka fertilitas menurut golongan umur dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan angka kelahiran kasar karena tingkat kesuburan pada setiap golongan umur tidak sama hingga gambaran kelahiran menjadi lebih teliti.

Perhitungan angka fertilitas menurut golongan umur biasanya dilakukan dengan interval 5 tahun hingga bila wanita dianggap berusia subur terletak antara umur 15 – 49 tahun, akan diperoleh sebanyak 7 golongan umur. Dengan demikian

dapat disusun menjadi distribusi frekuensi pada setiap golongan umur. Dari distribusi frekuensi tersebut, dapat diketahui pada golongan umur berapa yang mempunyai tingkat kesuburan tertinggi. Hal ini penting untuk menentukan prioritas program keluarga berencana.

KB dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau dalam Islam disebut sebagai *tanzim al nasl* (pengaturan keturunan).

Sejauh pengertiannya *tanzim al nasl* bukan *tahdid al nasl* (pembatasan keturunan) dalam arti pemandulan (*taqim*) dan aborsi (*isqath al-haml wa al ijhadl*) maka KB tidak dilarang. Meski secara teoretis telah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti *tanzim al nasl* tetapi tetap harus memperhatikan jenis dan cara kerja alat atau metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

Peserta keluarga berencana adalah pasangan usia subur di mana salah satu atau dua orang dari pasangan tersebut menggunakan salah satu atau alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non-program. Pasangan usia subur memiliki batasan umur yang digunakan adalah 15–44 tahun dan bukan 15–49tahun. Hal ini tidak berarti berbeda dengan perhitungan fertilitas yang menggunakan batasan 15–49 tahun, tetapi dalam kegiatan keluarga berencana mereka yang berada pada kelompok umur 44–49 tahun bukan merupakan sasaran keluarga berencana lagi. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa mereka

yang berada pada kelompok umur 44–49 tahun, kemungkinan untuk melahirkan lagi sudah sangat kecil.

Tujuan Program Keluarga Berencana

Program KB bagaimanapun harus tetap berhasil, sehingga ledakan penduduk pada 2050 seperti yang diramalkan PBB tidak terjadi, yakni berjumlah sekitar 290 juta jiwa. Namun dengan keberhasilan menjaga program KB, jumlahnya diharapkan tidak sebesar itu. Penduduk Indonesia pada 2000 sekitar 205 juta, jauh di bawah proyeksi semula pada 1990 sebanyak 226 juta jiwa. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan program KB.

KB bukan prioritas pembangunan. Namun tanpa KB, pembangunan di bidang lain akan kurang bermakna, mengingat penduduk yang terlalu besar dengan pertumbuhan yang tidak terkendali, dibarengi kualitas yang rendah akan menjadi beban berat bagi pembangunan.

Jadi, salah satu tujuan dari keluarga berencana yakni mampu mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini diartikan KB mampu menurunkan tingkat kelahiran kasar (CBR) pada suatu negara. Tidak hanya itu, program KB juga bertujuan untuk mengelola penduduk yang ada agar memperhatikan kualitas yang baik yang dimiliki suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Para orang tua akan tergerak untuk mementingkan kualitas daripada kuantitas anak, atau memberi kesempatan kepada istri dan ibu untuk bekerja demi menunjang

pemeliharaan anak. Dengan demikian, salah satu cara untuk mendorong para keluarga agar menginginkan sedikit anak adalah dengan memperbesar kesempatan di bidang pendidikan dan membuka lapangan-lapangan pekerjaan berpenghasilan tinggi kepada kaum wanita. Semakin tinggi pendidikan semakin rendah kesuburan yang mengakibatkan penurunan pada fertilitas.

Masyarakat tentu lebih merasa bahagia dan sejahtera bukan karena tingkat fertilitas secara nasional telah turun dari keadaan masa lalu, tetapi dirinya sendiri, yaitu setiap keluarga bisa merasakan bahwa dengan adanya program KB yang melayani dirinya dengan baik, sebagai suatu keluarga yang tadinya tidak mengetahui apapun juga tentang program ini, sekarang bisa mengambil manfaat sebaik-baiknya. Kebahagiaan pribadi inilah yang kiranya jarang muncul ke permukaan karena setiap rakyat jelata yang beruntung biasanya bukan masuk dalam tatanan berita nasional, tetapi diam dan tenang saja sebagai bagian dari mayoritas diam yang jumlahnya jutaan keluarga.

Walaupun pertumbuhan yang pesat dan penggunaan paksaan untuk mengikuti program keluarga berencana (KB) dapat dianggap sebagai bagian dari penyebab turunnya tingkat fertilitas, ada penyebab lainnya termasuk meningkatnya jumlah perempuan yang melek huruf, perbaikan kesehatan anak, dan kesempatan kerja yang lebih besar bagi kaum perempuan.

Teori Bongaarts mengatakan bahwa penentu fertilitas adalah proporsi wanita kawin 15–19 tahun, pemakaian kontrasepsi, aborsi, kemandulan, frekuensi hubungan seksual,

selibat permanen dan mortalitas janin. Kemudian menurut Kingsley Davis dan Judith Blake yakni penurunan fertilitas diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya konsepsi salah satunya adalah dengan pemakaian alat kontrasepsi. Palmore dan Bulatao**,** dengan teori *Contraceptive Choice* berpendapat bahwa dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat menjarangkan atau membatasi kelahiran.

Pada teori Malthus dan Neo-Malthus juga dijelaskan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah kelahiran. Menurut Malthus, pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *vice restraint* (pengurangan kelahiran) yakni melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi, pengguguran kandungan, dan lain-lain sebagainya.

Cara mengendalikan kelahiran tiap negara berbeda-beda. Beberapa negara memusatkan programnya pada IUD dan Pil, sedangkan beberapa lainnya menggunakan karet keluarga berencana dan ada pula yang hampir sepenuhnya bergantung pada menggugurkan kandungan.

Penilaian dan Ukuran-Ukuran Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, atau terkenal dengan singkatan BKKBN, adalah suatu lembaga pemerintah nondepartemen, yang selama tiga puluh tahun terakhir ini mengoordinasikan upaya besar membangun norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan hasil

yang sangat positif. Salah satu peranan BKKBN adalah menurunkan angka kelahiran kasar (CBR) sebanyak 50% .

Tingkat kelahiran telah menurun lebih lima puluh persen, yaitu dari sekitar 6 (enam) anak setiap keluarga, menjadi hanya kurang dari 2,5 (dua setengah) anak setiap keluarga. Tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi, anak, dan remaja telah turun dengan drastis. Akibatnya tingkat pertumbuhan penduduk yang meroket di tahun 1970-an di atas angka 2,5 persen, telah diturunkan menjadi sekitar 1,2 persen, bahkan di beberapa provinsi telah dapat diturunkan ke bawah angka 1 (satu) persen.

Dengan bekal mengecilnya jumlah anggota dari setiap keluarga itu, peranan keluarga yang semula seakan-akan hanya terbatas sebagai *"pabrik anak",* dengan *target produksi anak* sebanyak-banyaknya, mulai dituntut menghasilkan, memberdayakan dan memelihara anak dengan kualitas yang andal, tahan banting dan nantinya bisa berumur panjang. Anak-anak itu bukan saja harus sehat jasmani, tetapi harus mempunyai iman dan takwa yang tinggi, dipersiapkan dengan baik agar mempunyai kemampuan intelektual yang andal, cinta tanah air dan bangsanya, mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta sanggup menjaga kelestarian dan dinamika lingkungan sekitarnya.

Uraian kalimat di atas merupakan suatu harapan dalam berkeluarga. Setiap keluarga mengharapkan keluarga yang benar-benar berkualitas. Dan inilah yang menjadi salah satu pendukung terbentuknya program-program dalam kependudukan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga kependudukan baik departemen maupun nondepartemen pasti

akan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Untuk dapat mengetahui apakah yang telah digariskan dapat dicapai atau tidak, serta penyimpangan-penyimpangannya mengapa tujuan tersebut tidak tercapai, perlu diadakan penilaian pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam program keluarga berencana telah ditentukan empat tahapan penilaian sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.

Tahap pertama, penilaian pencapaian target peserta keluarga berencana yang meliputi peserta keluarga berencana yang merupakan pasangan suami istri yang baru menggunakan alat kontrasepsi dan peserta keluarga berencana yang kembali menggunakan alat kontrasepsi.

Tahap kedua, penilaian pencapaian target peserta keluarga berencana usia subur yang aktif menggunakan alat kontrasepsi. Tahap ketiga, penilaian terhadap perkembangan ciri-ciri peserta keluarga berencana, terutama dari umur dan paritas peserta keluarga berencana. Tahap keempat, penilaian terhadap penurunan fertilitas yang dicapai.

Sejalan dengan tujuan kuantitatif keluarga berencana yaitu menurunkan angka kelahiran kasar (CBR) diperlukan adanya tujuan-tujuan antara yang tercermin pada banyaknya peserta keluarga berencana yang perlu dicapai pada suatu waktu tertentu di suatu daerah. Sistem target merupakan pedoman perencanaan administrasi bagi para pelaksana program dan pedoman perencanaan masa mendatang bagi para pembuat kebijaksanaan. Hasil dari penilaian target tersebut belum dapat diinterpretasikan lebih jauh yaitu dikaitkan dengan penurunan fertilitas yang mungkin dapat

dicapai. Dengan perkataan lain, jumlah peserta keluarga berencana yang menggunakan alat kontrasepsi yang banyak, belum tentu menghasilkan pencegahan kelahiran yang cukup banyak, apabila tidak disertai waktu pemakaian yang cukup lama.

Beberapa ukuran KB yang dikenal dalam pelaksanaan kegiatan KB antara lain sebagai berikut.

Angka Kelangsungan

Angka kelangsungan merupakan angka yang menunjukkan proporsi peserta keluarga berencana yang masih menggunakan alat kontrasepsi setelah suatu periode pemakaian tersebut. Ada 4 macam angka kelangsungan yang dikenal dan terbagi menjadi 2 kelompok pendekatan yaitu: (1) Kelompok pertama, ditinjau dari pendekatan klinik (pemakaiannya) terdiri dari angka kelangsungan cara pertama dan angka kelangsungan semua; (2) Kelompok kedua, ditinjau dari pendekatan demografi (kegagalan setelah pemakaian, tanpa memedulikan apakah masih memakai atau tidak) terdiri dari kehamilan yang dapat dihindarkan dan kelahiran yang dapat dihindarkan.

Peserta KB Aktif

Tahap yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah peserta KB aktif yaitu dengan menggunakan angka kelangsungan dan mendasarkan pada distribusi alat kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. Perhitungan ini menggunakan kombinasi dari kedua cara tersebut (sesuai dengan yang dilakukan oleh BKKBN pada saat ini). Dalam memperkirakannya peserta KB aktif perlu rincian terhadap perkiraan jumlah pil oral yang disampaikan, perkiraan jumlah

pemberian kondom yang disampaikan kepada peserta KB, perkiraan jumlah suntikan yang dilakukan kepada peserta KB, jumlah peserta medis operatif pria, perkiraan jumlah pengguna medis operatif wanita, dan perkiraan tingkat kelangsungan pemakaian dari peserta KB baru IUD.

Bulan Pasangan Perlindungan

Bulan pasangan perlindungan atau tahun pasangan perlindungan adalah banyaknya bulan pasangan suami istri yang terlindung dari kemungkinan mengalami kehamilan karena menggunakan salah satu alat kontrasepsi. Dan tahun pasangan perlindungan adalah banyaknya tahun pasangan yang terlindungi dari kemungkinan mengalami kehamilan karena menggunakan salah satu alat kontrasepsi. Cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara menggunakan angka kelangsungan penggunaan alat kontrasepsi dan menggunakan banyaknya alat kontrasepsi yang didistribusikan.

Perkiraan Penurunan Fertilitas

Perkiraan penurunan fertilitas diakibatkan pelaksanaan KB. Perhitungan perkiraan penurunan fertilitas dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode "John Laing" dengan alasan metode cukup halus dan mudah. Cukup halus karena di dalam perhitungannya telah dilakukan penyesuaian dari ukuran efektivitas kontrasepsi dengan cara menghilangkan kemungkinan adanya "PPA" yaitu *overlap* antara masa "*post-parfum amernorhea*" dengan masa menggunkan kontrasepsi. Dengan kata lain tanpa menggunakan kontrasepsi pun, orang tercegah dari kehamilan karena masa steril. Jadi, penggunaan kontrasepsi yang dilakukan tidak efektif.

Metode Langsung Estimasi Ukuran KB

Estimasi demografi terdiri dari upaya mengukur nilai dasar parameter demografi seperti tingkat kelahiran dan tingkat kematian dalam kondisi data yang kurang sempurna. Parameter dasar ini mengindikasikan cara sebuah penduduk akan berkembang sepanjang waktu baik dari segi jumlah maupun struktur umur.

Pada dasarnya estimasi fertilitas, dan juga mortalitas, dapat dilakukan memakai dua jenis data yaitu yang langsung berhubungan dengan peristiwa kelahiran (cara langsung, *direct method*) dan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kejadian kelahiran tetapi dengan teknik tertentu dapat dikonversikan menjadi ukuran fertilitas. Estimasi langsung dapat dilakukan jika sistem registrasi vital dapat berjalan dengan baik; tidak saja secara administratif tetapi juga secara statistik. Jika sistem registrasi berjalan dengan baik maka angka kelahiran, dan juga kematian, dapat "langsung" dihitung dari data yang ada. Kita bisa menghitung berapa jumlah kelahiran selama kurun waktu tertentu dan membaginya dengan jumlah penduduk atau jumlah wanita pada kurun waktu yang sama (pertengahan tahun).

Estimasi langsung sebenarnya juga dapat dihitung dari data sensus atau survei. Estimasi langsung melalui sensus atau survei dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini.

Menanyakan Jumlah Kelahiran

Menanyakan jumlah kelahiran selama jangka waktu tertentu. Dalam survei atau sensus diajukan pertanyaan tentang jumlah kelahiran selama jangka waktu tertentu,

misalnya satu tahun sebelum pencacahan, berikut tanggal dan bulan kelahirannya. Dengan diketahui jumlah dan tanggal kelahiran pada jangka waktu tertentu maka secara teoretis dapat diestimasi secara langsung angka kelahiran pada periode tersebut. Dalam Susenas yang diadakan pada tahun enam puluhan ditanyakan kelahiran dan kematian yang terjadi selama satu tahun sebelum pencacahan. Namun ternyata hasilnya sangat tidak memuaskan karena adanya kesalahan berupa "*memory lapse*"; responden lupa tanggal kejadian atau sengaja tidak mau menyebutkan adanya kelahiran karena alasan tertentu.

Kemudian untuk pertama kali cara bertanya diubah menjadi "kapan melahirkan anak terakhir" dalam Sensus Penduduk 1980. Cara bertanya kemudian diperbaiki dalam Survei Kependudukan Jawa Timur 1980-1982. Data kelahiran yang dihasilkan cukup baik dan konsisten dengan estimasi metode lain dan faktor-faktor yang memengaruhi parameter demografis tertentu. Pertanyaan serupa dicantumkan dalam kuesioner SUPAS 1985. Ternyata hasilnya kurang memuaskan. Dari penelitian yang dilakukan BPS dapat disimpulkan bahwa agar pertanyaan mengenai anak terakhir ini dapat menghasilkan data yang baik, perlu diadakan latihan yang sangat intensif terhadap petugas dan pengawasan pelaksanaannya harus ketat. Selain itu konsep/definisi harus jelas dan susunan pertanyaan perlu disederhanakan sehingga mudah dimengerti oleh semua petugas lapangan.

Mencatat Riwayat Kehamilan atau Kelahiran.

Estimasi langsung juga dapat dilakukan jika sensus atau survei mampu memperoleh data tentang riwayat kehamilan atau kelahiran responden secara tepat dan benar. Riwayat kehamilan atau kelahiran dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan terinci dari semua kehamilan yang dialami oleh responden (wanita) sejak ia menikah hingga saat dilakukan wawancara (survei). Responden diminta untuk mengingat kembali semua kehamilan, kapan terjadinya, apakah berakhir dengan keguguran, lahir hidup atau lahir mati. Jika anak tersebut lahir hidup, apakah jenis kelaminnya, dan apakah anak tersebut masih hidup. Bila anak itu sudah meninggal, berapa umur ketika meninggal.

Semua tanggal dicatat demi kelengkapan, sekaligus untuk memeriksa konsistensi jawaban. Secara teoretis pendekatan ini sangat baik, jauh lebih baik dari cara pada butiran, tetapi dalam praktik sangat sulit diterapkan. Dalam masyarakat di mana peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari tidak selalu diingat, apalagi dicatat, maka unsur lupa atau bahkan ketidakmampuan responden untuk mengingat waktu kejadian banyak ditemui di lapangan. Petugas sering kali terpaksa memperkirakan waktu kejadian, dan untuk mempertahankan konsistensi mungkin membuat kesalahan yang sifatnya sistematis. Kesalahan akan makin besar jika usia responden sudah tua sehingga waktu kelahiran anaknya sudah berpuluh tahun berlalu. Anak-anak itu sendiri sudah tidak tinggal bersama mereka sehingga makin sulit untuk diingat. Meskipun tampaknya banyak masalah dalam penggunaan cara ini, namun hasil Survei Fertilitas Indonesia 1976

memperlihatkan bahwa data yang diperoleh cukup dapat dimanfaatkan. Cara yang sama diulang dalam Survei Prevalensi Kontrasepsi Indonesia 1987.

Survei Multi Putaran (multiround survey)

Estimasi langsung dapat pula dilakukan dengan melakukan *multiround survey,* di mana survei dilakukan beberapa kali (dua kali) untuk selang waktu tertentu. Selama selang waktu tersebut ditanyakan apakah ada perubahan dalam beberapa kejadian seperti kelahiran, kematian atau perpindahan. Kunjungan yang berulang pada rumah tangga sampel membuat kedua belah pihak, responden dan petugas saling mengenal sehingga memperlancar pengumpulan data. Pengukuran tingkat fertilitas dapat dilakukan dengan dua cara: (1) membandingkan penduduk yang dicatat pada dua kunjungan berurut, dan mencatat perubahan yang terjadi dalam selang antara dua kunjungan dan (2) untuk mendapatkan dua peristiwa yang dialami oleh seorang penduduk dalam selang waktu tersebut, lahir kemudian meninggal, datang kemudian pindah dan lain-lain, perlu diajukan pertanyaan-pertanyaan khusus.

Masalah utama dalam penyelenggaraan survei seperti ini adalah besarnya biaya. Keterangan lengkap mengenai lokasi survei dan rumah tangga sampel harus dipertahankan dan dipenuhi selama jangka waktu survei dan petugas harus tetap, sebab petugas baru perlu dilatih terlebih dahulu. Selain itu responden bisa bosan dikunjungi berkali-kali dan ditanya hal yang sama.

Metode Tidak Langsung Estimasi Ukuran KB

Secara tradisional estimasi demografi didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui sensus dan registrasi vital. Sistem registrasi vital biasanya mencatat kejadian-kejadian vital seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan sebagainya. Jika sistem registrasi vital dan data sensus sempurna maka parameter demografi dapat dihitung secara langsung dan tidak diperlukan lagi teknik estimasi secara tidak langsung. Sayangnya, di banyak negara sistem registrasi vital tidak berjalan dengan baik dan data sensus yang ada juga kurang sempurna. Sensus umumnya memiliki dua jenis kelemahan; yaitu kesulitan dalam mendata semua anggota populasi yang relevan dan kelemahan dalam pelaporan umur.

Di negara-negara yang sudah maju, khususnya di Eropa Barat, Jepang dan Amerika Serikat, sumber utama statistik vital adalah registrasi penduduk. Pelaksanaan registrasi penduduk di negara-negara tersebut diatur oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh suatu instansi yang khusus melaksanakan registrasi dan ditunjang oleh biaya yang cukup. Pada umumnya kualitas data yang dihasilkan registrasi penduduk sangat baik dan memberikan gambaran kecenderungan untuk waktu yang panjang di masa lampau. Sebaliknya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sistem registrasi penduduk belum berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik memperlihatkan bahwa kelahiran yang tercakup dalam registrasi hanya 58 persen, sedangkan kematian hanya 75 persen.

Pola, Perbedaan, dan Determinan KB

Terdapat 2 (dua) perilaku praktik dalam keluarga berencana (*family planning practice*), yakni: (1) praktik masa kini (*current practice*): pemakaian (*use*), pemilihan (*choice*); (2) dinamika praktik (*dynamic practice*): ganti (*switch*), ketidaklangsungan (*discontinuation*).

Praktik masa kini (*contraceptive use*). Pola dan perbedaan praktik KB di Indonesia menurut hasil SPI 1987 dan SDKI 1991, 1994 dan 1997. Ukuran: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei. Menurut umur: berbentuk huruf U terbalik. Artinya: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei rendah untuk perempuan usia 15–19 tahun, kemudian meningkat untuk perempuan kelompok umur lebih tua, dan turun lagi untuk perempuan usia 40–49 tahun.

Pada awal masa reproduksinya biasanya perempuan belum mempraktikkan KB dalam rangka memiliki anak. Sementara itu, pada pertengahan masa reproduksinya praktik KB biasanya tinggi dalam rangka baik penjarangan maupun pembatasan kelahiran. Menjelang akhir masa reproduksinya biasanya praktik KB rendah. Hal ini mungkin disebabkan karena para perempuan menyadari bahwa kesuburan mereka sudah berkurang atau pasangan suami dan istri berkurang frekuensi hubungan suami-istrinya.

Menurut jumlah anak lahir hidup (ALH): positif. Artinya: semakin banyak ALH, semakin tinggi persentase yang praktik KB. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan di mana

perempuan yang mempunyai anak lebih banyak lebih mempraktikkan program KB untuk membatasi kelahiran.

Menurut lama menikah: berbentuk huruf U terbalik. Artinya: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei rendah untuk mereka yang telah menikah selama kurang dari lima tahun, kemudian meningkat untuk mereka yang telah menikah selama 10–19 tahun, dan kemudian turun untuk mereka yang telah menikah selama 20 tahun atau lebih.

Praktik KB biasanya rendah pada perempuan yang baru menikah karena mereka mungkin berencana untuk mempunyai anak. Sementara itu, perempuan yang telah menikah selama 10-19 tahun biasanya mempraktikkan KB dalam rangka menjarangkan atau membatasi kelahiran. Perempuan yang telah menikah selama 20 tahun atau lebih biasanya menyadari bahwa kesuburannya telah berkurang atau jarang melakukan hubungan suami-istri sehingga praktik KB-nya rendah.

Menurut keinginan mempunyai anak lagi: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang tidak ingin mempunyai anak lagi daripada untuk mereka yang ingin mempunyai anak lagi. Menurut "Dikunjungi oleh PLKB atau tidak": persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang dikunjungi oleh PLKB daripada untuk mereka yang tidak dikunjungi oleh PLKB. Artinya, adanya kunjungan PLKB membawa dampak positif pada peningkatan praktik KB. Dengan demikian, kegiatan ini sangat penting dan perlu

diteruskan. Selain itu, para PLKB juga perlu terus dibina dan diberi pengertian bahwa kunjungan dalam rangka mendorong pasangan usia subur untuk praktik KB sebaiknya dilaksanakan secara berkala.

Menurut provinsi tempat tinggal: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang tinggal di provinsi-provinsi Jawa dan Bali daripada untuk mereka yang tinggal di Luar Jawa dan Bali. Hal ini merupakan cermin dari tahapan implementasi program KB di Indonesia, yang mula-mula dilaksanakan di Jawa dan Bali pada Pelita I (1969–1974) dan kemudian diteruskan di provinsi-provinsi lain di luar Jawa dan Bali pada Pelita II (1974–1979) dan Pelita III (1974–1979).

Menurut tempat tinggal saat survei: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang tinggal di wilayah perkotaan daripada untuk mereka yang tinggal di wilayah perdesaan. Menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan: positif. Artinya: Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan (baik pendidikan istri ataupun pendidikan suami) semakin tinggi persentase yang praktik KB. Dengan demikian, promosi praktik KB juga dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Para calon ibu dan calon bapak perlu diberikan informasi mengenai program KB serta manfaatnya saat mereka mengikuti pendidikan.

Menurut akses kepada informasi: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang membaca koran secara teratur, mendengar radio secara teratur, atau menonton televisi secara

teratur. Penyebaran informasi mengenai program KB serta manfaatnya perlu terus dilakukan melalui radio, koran dan televisi supaya lebih banyak pasangan usia subur yang tahu tentang program KB dan melaksanakannya.

Menurut status bekerja: persentase perempuan usia 15–49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang bekerja. Perempuan yang bekerja biasanya mempunyai waktu yang terbatas untuk mengurus anak sehingga mereka lebih cenderung untuk membatasi kelahiran dengan praktik KB. Menurut lapangan pekerjaan suami: persentase perempuan usia 15-49 tahun berstatus kawin yang praktik KB saat survei lebih tinggi untuk mereka yang suaminya bekerja di sektor non-pertanian.

Faktor-Faktor berpengaruh pada KB

Manfaat keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk (bangsa dan negara) adalah sebagai berikut.

1. Program Keluarga Berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia, agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dengan kemampuan produksi nasional.
2. Manfaat Keluarga Berencana bagi kepentingan nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya.
3. Meningkatkan taraf hidup rakyat dengan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksi.

Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Indonesia berpijak pada dua landasan, (1) prinsip kepentingan nasional dan (2) Prinsip sukarela, demokrasi dan menghormati hak asasi manusia. Karena berpijak pada prinsip sukarela maka usaha yang dilakukan merangsang minat masyarakat terhadap pelaksana Keluarga Berencana.

Adapun usaha-usaha syang dilakukan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan dan pendekatan medis. Kegiatan penerangan dan penyuluhan ditujukan pada masyarakat umum agar setiap anggota masyarakat memiliki pengertian dan rasa tanggung jawab akan terciptanya keluarga sejahtera dengan menerima norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS).

Dua inti pokok mengapa BKKBN di adakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan jalan Keluarga Berencana (KB). Jadi dua kata kuncinya adalah kualitas manusia dan KB. Kualitas manusia dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, dan sosial-ekonomi. Pendidikan dapat secara formal di sekolah dan nonformal di keluarga dan masyarakat. Kesehatan meliputi kesehatan lahir, spiritual, dan emosional. Kesehatan lahir tergantung pada ketersediaan pangan, sandang dan papan.

Manusia miskin di Indonesia cukup banyak tergantung kriteria mana yang mau dipakai, kriteria BPS, kriteria Bank Dunia atau kriteria yang lain. Dari berbagai kriteria dapat diestimasi jumlah penduduk miskin antara 20–50% penduduk Indonesia. Penerapan program KB demi mencapainya kesejahteraan dalam masyarakat kita sehingga masalah ekonomi juga dapat di atasi dengan adanya program KB ini.

Tugas

Berdasarkan kelompok tetap Saudara. Buatlah observasi di sekitar Saudara dengan mendata sekitar 10 keluarga. Pada 10 keluarga tersebut inventaris keluarga mana saja yang melaksanakan KB dan yang tidak melaksanakan KB. Wawancarai juga apakah motivasi mereka mengikuti Program KB dan alasan tidak mengikuti Program KB. Selanjutnya, buatlah laporan singkat 3–5 halaman dan diskusikanlah di kelas mengenai masalah ini. Buatlah kesimpulan bersama hasil yang didapat dari diskusi bersama tersebut.

BAB XII
KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pendahuluan

Manusia hidup di dunia ini menentukan dan ditentukan lingkungannya. Lingkungan dapat berubah berdasarkan perubahan sikap dan perilaku manusia. Kepadatan penduduk, memerlukan tingkat kebutuhan alias pangan, sandang, dan perumahan akan meningkat. Alam menjadi bebas, dan menanggung segala risiko yang dibutuhkan manusia. Alam secara fisik dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Memang benar, bumi ini dijadikan untuk kebutuhan manusia dan manusialah yang diamankan Allah untuk memakmurkannya. Dengan amanah itu, bukan berarti secara semena-mena manusia mengeksploitasi tanpa mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam.

Dalam penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun nabati dapat memengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang tidak berimbang dan serasi antara kehidupan itu sendiri. Manusia secara sadar atau tidak sadar telah terjebak dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tidak mempertimbangkan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan (*ecologi the environmental*). Keadaan seperti ini dialami oleh beberapa negara di dunia ini. Di negara-negara berkembang dengan alasan mempercepat pembangunan di segala bidang untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak menyadari dari suatu perubahan.

Indonesia adalah negara yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar kelima dunia. Di satu sisi mempercepat pelaksanaan pembangunan. Di sisi yang lain percepatan pertumbuhan penduduk semakin tinggi. Dalam konsep pembangunan nasional jumlah penduduk yang begitu besar menjadi modal dasar pembangunan dan bisa menjadi beban pembangunan. Jumlah penduduk yang begitu besar sedangkan sumber daya manusia sangat rendah akan rentan terhadap masalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan dalam perolehan atau penggunaan sumber daya alam atau ketidakmampuan manusia. Pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya akan sangat berpengaruh terhadap sumber daya alam (SDA) baik secara kuantitatif maupun kualitatif terutama terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hal ini membawa implikasi yang cukup berat bagi upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Pengaruh langsung dari pertumbuhan penduduk terhadap sumber daya alam dapat dilihat dari kehidupan nyata masyarakat.

Terjadinya banjir dan erosi di musim hujan, kekeringan di musim kemarau akibat penebangan hutan yang berlebihan. Pencemaran air, udara, darat secara langsung menurunkan kualitas sumber daya alam sebagai akibat pembangunan industri dari teknologi. Eksploitasi sumber daya alam mineral dan minyak bumi di lepas pantai menyebabkan kerusakan sumber daya hayati di laut dan masih banyak lagi kasus-kasus lain. Kasus lingkungan merupakan suatu realita kontemporer

yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi lingkungan, proliferasi malapetaka lingkungan (*environmental*) telah mencapai titik kulminasi yang terus berdampak dramatis.

Hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya bersifat sirkular, manusia memengaruhi lingkungan dan begitu juga hidup manusia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar suatu obyek yang saling memengaruhi. Yang termasuk dalam lingkungan hidup tersebut dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam dan sistem hubungan antara sumber daya alam tersebut. Lingkungan alam dibagi menjadi lingkungan fisik dan kimia, lingkungan biologi, dan lingkungan manusia meliputi bentuk sosio ekonomi dan sosial kebudayaan.

Ketersediaan alam bagi kehidupan manusia dimanfaatkan secara beragam. Keberagaman cara memanfaatkan disebabkan oleh perbedaan cara pandang manusia terhadap alam sehingga muncul beragam perilaku penduduk. Ada sebagian penduduk memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menggunakan secukupnya saja. Namun sebaliknya ada juga yang berperilaku sampai pada perbuatan melampaui batas dalam bentuk eksploitasi besar-besaran sehingga sangat merusak lingkungan.

Keterkaitan Masalah Kepadatan Penduduk dan Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling memengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pada suatu lingkungan terdapat dua komponen penting pembentukannya sehingga menciptakan suatu ekosistem yakni komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pada lingkungan hidup mencakup seluruh makhluk hidup di dalamnya, yakni hewan, manusia, tumbuhan, jamur dan benda hidup lainnya. Sedangkan, komponen abiotik adalah benda-benda mati yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di sebuah lingkungan yaitu mencakup tanah, air, api, batu, udara, dan lain sebagainya. Kerusakan pada lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, baik faktor alami dari lingkungan itu sendiri ataupun akibat dari tingkah laku manusia. Pentingnya lingkungan hidup yang terawat terkadang dilupakan oleh manusia, dan hal ini bisa menjadikan ekosistem serta kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut.

Lingkungan hidup adalah kesatuan dari beberapa lingkup ruang di mana lingkungan tersebut terisi dengan segala makhluk hidup serta benda-benda mati yang berada di dalam lingkup lingkungan tersebut dan itu juga termasuk manusia beserta adab perilakunya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bukan hanya lingkungan secara fisik saja yang merupakan lingkungan. Lingkungan hidup juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku sosial, adat istiadat dan budaya,

bahkan juga unsur benda mati seperti tanah, api, air, dan udara yang ada pada lingkungan tersebut.

Beberapa ahli memberikan pengertian tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala hal yang berada di sekitar kita, baik itu benda ataupun makhluk hidup yang terpangaruh oleh kegiatan yang dilakukan manusia. Lingkungan hidup adalah mengacu kepada semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang berada dalam ruangan yang sedang kita tinggali dan hal tersebut memengaruhi kehidupan sekitarnya baik itu hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Lingkungan hidup adalah lingkungan yang meliputi semua kondisi dan benda, misalnya manusia dan aktivitasnya, yang termasuk dalam aspek bagaimana manusia berperan dalam memengaruhi sebuah proses kelangsungan hidup, baik kepada sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Menurut kamus *Ekologi*, lingkungan hidup adalah keseluruhan yang saling berkaitan antara makhluk hidup dan nonhidup secara alamiah di bumi atau di sebagian daerahnya. Menurut UU No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Unsur-unsur penyusun lingkungan hidup tersebut sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu unsur biotik, unsur abiotik, dan unsur sosial budaya.

1. Unsur lingkungan hidup biotik adalah unsur atau komponen yang tersusun dari berbagai macam makhluk

hidup bernyawa yang ada di muka bumi ini atau pada lingkungan tertentu sebagai contoh kecilnya. Contoh dari lingkungan hidup biotik adalah seperti manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup di suatu lingkungan.

2. Unsur lingkungan hidup abiotik (nonbiotik) adalah sebuah tempat atau kondisi pada suatu lingkungan yang menjadikannya sebagai penyusun bentuk untuk mendukung terjadinya suatu yang dinamakan lingkungan. Contohnya adalah seperti air, tanah, udara, bebatuan, dan benda mati lainnya.
3. Unsur lingkungan hidup sosial budaya merupakan unsur yang terbentuk dari aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia dan tersusun membentuk sebuah sistem yang terdiri dari nilai, gagasan, dan juga keyakinan atas perilaku sebagai makhluk sosial.

Lingkungan hidup terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan hidup alami dan buatan. Berikut di bawah ini adalah penjelasan secara lebih lengkapnya.

1. Lingkungan hidup alami. Lingkungan hidup alami adalah sebuah sistem yang bergerak secara dinamis dan mencakup suatu kesatuan ruang dengan segala kondisi, organisme, benda serta unsur abiotik yang lainnya tanpa adanya perbuatan campur tangan dari manusia. Interaksi yang berlangsung antara lingkungan alamiah dengan sekitarnya ini kemudian membentuk sebuah kesatuan yang bernama ekosistem. Contoh sederhana dari lingkungan alami adalah hutan primer. Proses yang terjadi dalam lingkungan alami ini berupa pertukaran energi, Interaksi antar komponen, perubahan atau

pergantian flora dan fauna akibat perubahan yang terjadi karena peristiwa alam seperti banjir, gempa dan sebagainya. Proses ini bisa terjadi berulang kali namun akan selalu kembali stabil seperti sedia kala lagi. Namun, perubahan yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti melakukan penebangan hutan untuk membuka lahan, melakukan aktivitas pertambangan dan sejenisnya dapat mengubah fungsi dan struktur ekosistem secara permanen. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menyemarakkan untuk membuat taman nasional dan cagar alam guna melestarikan dan melindungi ekosistem tersebut dari kerusakan.

2. Lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan adalah hasil dominasi manusia atas lingkungan hidup alami. Pembentukan lingkungan hidup buatan ini umumnya didasari oleh kebutuhan manusia. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang membuat manusia terpaksa mengubah lingkungan alamiah. Namun, dalam proses pembentukan ini biasanya akan menghasilkan produk negatif berupa limbah. Yang jika tidak ditangani secara tepat dan cepat maka akan berimbas pada manusia itu sendiri.

Kehidupan adalah sebuah struktur yang saling berkaitan satu sama lain dan sangat ketergantungan dengan unsur lingkungan hidup. Kehidupan bermasyarakat yang ideal bukan hanya menjadikan manusia sebagai satu-satunya tolok ukur, namun juga berdasarkan unsur lain seperti unsur hayati dan juga fisik guna mendukung sebuah proses kelangsungan hidup yang harmonis. Beberapa fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan yang perlu diketahui adalah: (1) tempat mencari

makan; (2) tempat berlangsungnya berbagai aktivitas; dan (3) tempat tinggal.

Hubungan Antara Kependudukan dengan Lingkungan Hidup

Tingkat perkembangan jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi, banyak lapangan pekerjaan di Indonesia tidak dapat menampung keadaan yang telah melampaui batas ini. Telah banyak penyuluhan tentang kependudukan, yang bertujuan unutuk mengurangi tingkat kelahiran pada Negara Indonesia. Permasalahan pertambahan penduduk telah pula menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan di Indonesia. Diawali dengan perhatian pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk, serta usaha penyebaran penduduk yang lebih serasi di seluruh kepulauan Indonesia pada awal Pola Pembangunan.

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar kelima sesudah RRC, India, USSR dan USA, sangat merasakan betapa berat tekanan-tekanan akibat adanya masalah kependudukan yang sangat dirasakan adalah pertumbuhannya

yang pesat dan penyebarannya ke seluruh wilayah yang tidak seimbang. Di samping itu, Indonesia sebagai negara yang berkembang juga menghadapi masalah urbanisasi penduduk ke kota-kota yang umumnya tidak memiliki lapangan pekerjaan, sehingga pemanfaatan SDA semakin diperluas yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup (*environmental problems*) akhir-akhir ini telah dijadikan isu global terutama dua dekade terakhir sehingga baik pemerintah maupun masyarakat di negara-negara maju yang sedang berkembang telah memberikan perhatian yang serius pada masalah tersebut. Dunia semakin menyadari bahwa eksploitasi SDA (*natural resources*) yang hanya berorientasi ekonomi tidak hanya membawa efek positif tetapi juga membawa efek negatif. Dapat dijelaskan bahwa pertambahan penduduk di negara-negara berkembang jauh lebih cepat daripada negara-negara maju. Risiko yang ditanggung oleh bumi yang diliputi keterbatasan penyediaan kebutuhan manusia yang kian meningkat secara tajam, dan timbulnya akibat degradasi alam sekitar walaupun lingkungan hidup, di lain pihak, tuntutan manusia akan pangan, sandang, papan dan pendidikan telah memberikan derita dan beban kepada bumi yang makin berat. Sedang tuntutan manusia akan lingkungannya yang baik, justru lingkungan memberikan tuntutan balik kepada manusia akan lingkungan dan pencapaian tuntutan pada suatu lingkungan kehidupan yang nyaman. Lingkungan hidup berasal dari kata "lingkungan dan hidup" dalam kamus besar *Bahasa Indonesia,* lingkungan diartikan sebagai daerah

(kawasan dan sebagainya), sedang lingkungan alam diartikan sebagai keadaan (kondisi, kekuatan) sekitar, yang memengaruhi perkembangan dan tingkah laku organisme.

Populasi dunia ini perlahan-lahan meningkat. Ketika hal ini terjadi, kita perlu mengambil hati-hati dalam memastikan kita tidak merugikan lingkungan. Jika kita tidak berhati-hati maka bisa menimbulkan dampak bencana bagi kita dan alam. Sebagai kota tumbuh lebih besar dan lebih besar tanah alam sekitar mereka sedang berubah menjadi rumah dan gedung perkantoran. Kita perlu mengatur lebih dalam taman kota untuk memungkinkan sejumlah besar urbanisasi. Ini membantu untuk memperindah taman kota sambil membantu melestarikan lingkungan kita. Seperti kita membangun rumah-rumah dan kota-kota kita menggunakan kayu semakin banyak dan sumber daya alam lainnya untuk bangunan. Kita perlu membatasi berapa banyak penggalian diperbolehkan dalam satu area dan mereka harus ditanam kembali, bukan dibiarkan gundul. Jika Anda pernah melihat bekas galian tambang, Anda akan mengerti bagaimana bekas luka ke bumi.

Ketika kita menggunakan pohon-pohon di hutan tropis atau hutan apapun kita harus menanam setidaknya jumlah yang sama dari pohon yang diambil. Burung, tupai, dan hewan lainnya menggunakan hutan-hutan untuk bertahan hidup dan mengumpulkan makanan. Tanpa ini habitat alami mereka perlahan-lahan akan mulai mati. Sumber daya alternatif juga harus diteliti dan digunakan lebih besar. Seperti kita membakar bahan bakar fosil, semakin banyak kita menyakiti atmosfer dan perlahan-lahan kehilangan sumber-sumber yang berharga. Belajar bagaimana untuk memperluas penggunaan

sumber daya matahari, angin, dan energi hidro-listrik akan sangat membantu menyelamatkan lingkungan. Ini mungkin tidak tampak seperti alam yang terluka setiap saat. Namun, seiring waktu kita perlahan akan mulai melihat penurunan hewan dan bahkan mungkin melihat beberapa spesies punah, dan jika kita tidak mengubah cara hidup, kita akan segera mendapat dampak negatifnya.

Lingkungan alam ini saling berhubungan karena setiap organisme, dari kuman untuk ikan paus kepada orang-orang, adalah bagian dari rantai makanan yang bergantung pada habitat yang sehat untuk bertahan hidup. Sebagai penduduk tumbuh, ada yang kurang dari sumber daya dunia bagi setiap orang; pribadi kita sepotong kue semakin kecil. Pernyataan itu menyiratkan bagaimana tindakan manusia dan bahkan semakin banyak orang yang membutuhkan sumber daya, dampak negatif terhadap lingkungan. Daya dukung merujuk pada jumlah orang bumi dapat mendukung secara berkelanjutan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pemanfaatan sumber daya dan distribusi sumber daya. Daya dukung diperkirakan di berbagai derajat dari angka terendah satu miliar sampai sekitar 44 milyar. Daya dukung telah ditingkatkan oleh ilmu pengetahuan dan diperkirakan bahwa jika Dunia melebihi "daya dukung" nya maka ilmu akan menjadi harapan terakhir kami untuk menemukan solusi.

Umat manusia harus menyadari bahwa bumi tempat berpijak memiliki keterbatasan daya tampung baik dari segi daya yang dimilikinya maupun dari segi materi yang dikandungnya. Memperhatikan jumlah penduduk yang terus meningkat hingga memasuki abad ke-21, masyarakat jangan

terpaku pada jumlah peduduk yang semakin bertambah, tetapi perhatian itu terutama lebih difokuskan pada kebutuhan yang diperlukan manusia yang berlipat ganda. Manusia terlalu arogan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Padahal manusia pendatang baru di bumi, nenek moyang manusia tertua muncul baru sekitar 3 juta tahun yang lalu. Manusia dikatakan modern adalah hasil proses evolusi, seperti halnya mahluk hidup lainnya, manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, maka setiap perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, padahal manusia ingin hidup sejahtera. Pada hakikatnya, untuk membina kesejahteraan hidup manusia memerlukan 4 macam kebutuhan hidup yaitu: pangan, sandang, papan dan pendidikan.

Teknologi saat ini, kebijakan, dan pengaruh budaya hubungan antara dinamika populasi manusia dan lingkungan alam. Perubahan teknologi yang paling terpengaruh kondisi lingkungan yang berhubungan dengan penggunaan energi. Konsumsi minyak, gas alam, dan batubara meningkat secara dramatis selama abad kedua puluh. Sampai sekitar tahun 1960, negara-negara maju bertanggung jawab untuk kebanyakan konsumsi ini. Sejak itu, bagaimanapun, industrialisasi di negara-negara berkembang yang baru telah mengakibatkan ketergantungan lebih besar pada intensif dan sangat mencemari proses produksi-sumber daya.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan terdpat upaya atau cara dalam mengatasi krisis dan kependudukan dan lingkungan hidup antara lain: (1) menjelaskan bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungannya, manusia memengaruhi

lingkungan hidupnya dan juga di pengaruhi oleh lingkungannya. Dalam usaha menjaga kelangsungan hidupnya, manusia berusaha menyatakan sumber-sumber alam yang ada dengan pengelolaan yang baik; (2). menyarankan bagaimana cara pengolahan air kawat. Salah satu cara yang bijaksana pada saat ini adalah dengan membuat waduk-waduk pada daerah aliran sungai (DAS), sehingga energi potensial yang terkandung dalam air tidak langsung terbuang ke laut, tanah-tanah yang tandus dapat dihijaukan kembali atau di buat lahan pertanian, pertanahan, perikanan, kehutanan dan kombinasi dari kegiatan usaha tersebut, yang telah di kenal sebagai agroforesti. (James G, Lovelok ,1984).

(3) Menyatakan, bahwa perlu pengembangan IPTEK untuk menyatakan kembali hasil buangan, agar sampah-sampah berasal dari perkotaan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya untuk rabuk (kompas), tenaga listrik dan sebagainya. Kotoran ternak selain untuk pupuk dapat digunakan untuk biogas. Model pengembangan ogroforesti di Cina sejak tahun 1049, ternyata memberikan hasil yang mengembirakan termasuk Jerman dalam pengolaan hutan masa depan.

Masalah kependudukan yang sangat memengaruhi lingkungan adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat memengaruhi kualitas penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk lebih sulit dilaksanakan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, keamanan, kesejahteraan, ketersediaan lahan dan air bersih, kebutuhan pangan, dan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Tumbuhnya kawasan industri dan

semakin padatnya pemukiman penduduk di daerah perkotaan menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang nyata.

Kepadatan penduduk memengaruhi beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan-kehidupan penduduk berikut ini.

Ketersediaan Udara Bersih

Udara bersih merupakan kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup manusia. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Semakin banyak jumlah penduduk berarti semakin banyak oksigen diperlukan. Namun kebersihan udara tidak semata-mata ditentukan oleh kadar oksigen saja. Gas-gas lain yang ada di udara seperti karbon dioksida, oksigen nitrogen dan oksigen belerang juga memengaruhi kualitas udara. Apabila kandungan gas-gas ini meningkat, maka dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar.

Bertambahnya pemukiman, alat transportasi, dan kawasan industri yang menggunakan bahan bakar fosil (minyak bumi, bensin, solar dan batu bara) mengakibatkan kadar CO_2 dan CO di udara semakin tinggi. Berbagai kegiatan industri juga menghasilkan gas-gas pencemar seperti oksida nitrogen (NO_x) dan oksida belerang (SO_x) di udara. Tak heran jika udara pada lingkungan tersebut pasti tercemar. Oleh karena itu, marilah menanam pohon sebanyak-banyaknya. Selain sebagai penyejuk dan keindahan, pepohonan berfungsi sebagai hutan kota untuk menurunkan tingkat pencemaran udara.

Ketersediaan Pangan

Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan makanan. Dengan bertambahnya jumlah populasi penduduk, maka jumlah makanan yang diperlukan juga semakin banyak.

Ketidakseimbangan antara bertambahnya jumlah penduduk dengan bertambahnya produksi pangan sangat memengaruhi kualitas hidup manusia. Akibatnya penduduk dapat kekurangan gizi atau bahkan kekurangan pangan.

Di kota-kota besar, lahan pertanian boleh dikatakan hampir tidak ada lagi. Sebagian besar lahan pertanian di kota digunakan untuk lahan pembangunan pabrik, perumahan, kantor dan pusat perbelanjaan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat kota sangat tergantung dengan tersedianya pangan dari desa. Jadi semakin meningkat pertumbuhan penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan pangan dan lahan. Padahal pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan produksi pangan.

Ketersediaan Lahan

Kepadatan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan lahan, baik lahan untuk tempat tinggal, sarana penunjang kehidupan, industri, tempat pertanian, dsb. Untuk mengatasi kekurangan lahan, sering kali dilakukan pembukaan hutan. Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai solusi, sesungguhnya kegiatan itu merusak lingkungan hidup yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Jadi, peluang terjadinya kerusakan lingkungan akan meningkat seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk.

Ketersediaan Air Bersih

Air bersih yang digunakan sehari-hari sebagian besar berasal dari air tanah, air permukaan, dan air atmosfer. Jumlah air di bumi ini tetap, sedangkan jumlah penduduk makin bertambah dari tahun ke tahun. Meskipun 2/3 dari luas bumi berupa air, namun tidak semua jenis air dapat digunakan

secara langsung. Oleh karena itu, persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius. Air bersih dibutuhkan oleh berbagai macam industri, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, irigasi, ternak, dan sebagainya. Jumlah penduduk yang meningkat juga berarti semakin banyak sampah atau limbah yang dihasilkan.

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air, dan polusi suara. Pencemaran tanah disebabkan berbagai hal, seperti sampah-sampah plastik, kaleng-kaleng, rongsokan kendaraan yang sudah tua. Plastik tidak dapat hancur oleh proses pelapukan dan besi-besi tua menimbulkan karat, sehingga tanah tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Pemakaian pupuk yang terlalu banyak, tidak menurut aturan yang telah ditentukan, menyebabkan pula polusi tanah. Tanah pertanian menjadi kering dan keras, karena jumlah garam yang sangat besar akan menyerap air tanah. Guna mencegah atau mengurangi polusi tanah, maka pemakaian pupuk di daerah pertanian hendaklah menurut aturan yang sudah ditentukan. Sampah-sampah harus dibuang di tempat sampah atau dibuang di tempat pembuangan, tempat sampah perlu diatur dan disediakan secukupnya.

Pencemaran udara disebabkan oleh asap yang keluar dari pabrik-pabrik dan kendaraan bermotor. Makin besar jumlah penduduk, makin berkembanglah ilmu pengetahuan, sehingga banyak didirikan pabrik-pabrik dan diproduksi mesin-mesin serta kendaraan bermotor untuk mencukupi kebutuhan hidup penduduk.

Pencemaran air dapat juga disebabkan oleh air yang mengandung sampai kimia dari pabrik-pabrik, sebagai bahan pencuci yang dibuang ke sungai-sungai. Untuk mencegah polusi air, maka penggunaan obat-obatan dan bahan kimia hendaklah menurut aturan atau petunjuk-petunjuk yang telah ditentukan. Juga pembuangan sampah dari pabrik-pabrik, kendaraan bermotor, kapal terbang dan sebagainya.

Polusi suara yang terlalu bising mengganggu ketenangan, dapat menimbulkan gangguan jasmaniah dan rohaniah, misalnya gangguan jantung, kelenjar-kelenjar pernapasan, gangguan syaraf, perasaan gelisah dan sebagainya. Untuk mencegah polusi suara, hendaknya kita menyadari bersama, agar dalam memakai kendaraan mengurangi suaranya. Dalam hal ini juga Pemerintah telah mengatur bagi orang yang mendirikan industri agar meminta izin. Ini dimaksudkan supaya penetapan industri itu dapat diatur begitu rupa, sehingga tidak menimbulkan polusi suara pada penduduk sekitarnya.

Jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat masyarakat terlalu terpaku pada jumlah penduduk yang kian meningkat. Dampak dari meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya juga kebutuhan yang diperlukan oleh manusia juga. Kepadatan penduduk dengan kecepatan pertumbuhannya dapat menekan sumber daya alam, dan juga meningkatkan eksploitasi pada lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan seiring berjalannya waktu kita perlahan akan mulai melihat berbagai penurunan jenis-jenis hewan dan bahkan kita

juga akan melihat berbagai spesies hewan akan punah dengan sendirinya, dan ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah pada masyarakat seperti kemiskinan. Umat manusia harus menyadari bahwa bumi memiliki keterbatasan daya tampung baik dari segi daya yang dimilikinya maupun dari segi materi yang dikandungnya dan juga tidak selamanya bumi akan selalu menyediakan bahan-bahan tersebut.

Penanggulangan Masalah-Masalah Kependudukan

Lingkungan berarti keadaan atau kondisi yang mengelilingi kita. Bumi, rumah kita, memberikan semua hal penting yang dibutuhkan untuk hidup kita. Untuk kelangsungan hidup kita di lingkungan, kita harus melestarikan biosfer yang sehat dengan semua sistem ekologi, semua tumbuhan dan hewan, tanah yang subur, air murni, dan udara bersih. Sekarang, keindahan alam bumi ini menghilang, sebagian orang di seluruh dunia menghancurkan keindahan oleh eksploitasi sumber daya alam secara maksimum (berlebihan). Tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah sangat tinggi sehingga perlu adanya solusi dari masalah lingkungan ini.

Berbagai masalah lingkungan sekarang memengaruhi bumi kita. Sebagai akibat dari era globalisasi yang terus-menerus mengeksploitasi proses alami dari bumi mengubah masalah lokal menjadi isu-isu global, beberapa masalah yang sekarang memengaruhi dunia adalah hujan asam, polusi udara, pemanasan global, limbah berbahaya, penipisan ozon, asap, polusi air, dan lain sebagainya serta *overpopulasi Smog* dan racun mengapung di udara, yang disebabkan oleh

pemborosan asap kotor dari perusahaan industri dan juga dari pembakaran bahan bakar yang dikeluarkan oleh kendaraan.

Penyalahgunaan sumber daya energi akibat masalah kependudukan ini sebagai salah satu masalah lingkungan yang terjadi dari banyaknya masalah yang lain. Dalam hal ini akan berdampak menjadi masalah serius jika orang-orang pada jaman sekarang tidak bisa menyadari akan pentingnya daur ulang energi dan konservasi lingkungan. Untuk pertama yang mungkin dapat dilakukan adalah mendaur ulang produk-produk yang sudah tidak terpakai, baik organik maupun non-organik sehingga ketegangan lingkungan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan dapat kita kurangi dengan hal ini. Contohnya seperti menggunakan barang-barang yang tidak terpakai lalu didaur ulang menjadi kompos limbah tanaman sehingga dapat meminimalkan limbah yang terbuang di lingkungan. Dari limbah tersebut kita juga dapat menciptakan pupuk organik yang sehat.

Deforestasi atau penggundulan hutan untuk kehidupan manusia akan dapat berkurang dengan kita memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk mendaur ulang bahan yang digunakan, sehingga tak hanya dampak pencemaran lingkungan saja yang akan berkurang namun pohon juga dapat kita selamatkan. Dalam memenuhi kebutuhan saat ini, kita tidak harus berlebihan dalam penggunaan sumber daya alam yang ada, karena dengan begitu generasi manusia yang akan datang tidak harus mengorbankan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka merupakan keberlanjutan pelestarian lingkungan yang harus diwujudkan. Bukan berarti pengelolaan dominasi dan eksploitasi atau dalam

menggunakan sumber daya alam harus selalu berlebihan dan tanpa memperhatikan kapasitas bumi dalam memproduksi dan merehabilitasinya dari kekuasaan kita atas alam dan makhluk hidup lainnya sehingga dapat menghindarkan kita dari masalah-masalah kependudukan yang terus-menerus meningkat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kepadatan penduduk untuk mengurangi masalah kependudukan dan memfasilitasi sumber daya terbarukan agar dapat lebih diperbaharui sebagai efek kelestarian lingkungan yang dapat menjaga daya dukung lingkungan.

Pengendalian lingkungan hidup harus menyusun rencana program dan kegiatan yang kreatif, inovatif, dan realistis yang didukung oleh SDM yang terampil dan anggaran yang memadai. Program dan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan, di antaranya sebagai berikut.

Pemeliharaan sungai dan situ, pembuatan sumur resapan dan biopori yang bertujuan untuk mengatasi bahaya banjir dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) bertujuan untuk menanggulangi polusi udara di kota. Program Pengawasan dan Penegakkan Hukum dengan kegiatan-kegiatan, antara lain: Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, pengawasan terhadap kegiatan industri yang bertujuan untuk penaatan oleh masyarakat atau industri terhadap ketentuan dan kebijakan bidang lingkungan dan penanganan kasus bagi masyarakat atau industri yang merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Program Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup dengan kegiatan-kegiatan: Pemantauan kualitas lingkungan (air, tanah, udara) yang bertujuan untuk mengetahui status kondisi lingkungan secara terus menerus, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Masyarakat umum harus meningkatkan kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, di antaranya pembangunan rumah tinggal harus mengikuti ketetapan RT/RW, mengadakan pengolah limbah atau tinja berupa tangki septik, tidak merusak dan memanfaatkan secara berlebihan sumber daya alam (air tanah).

Industri harus meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya pembuatan dan pengoperasian IPAL secara optimal, pengelolaan limbah (terutama B3) sesuai dengan ketentuan, tidak membuang limbah hasil kegiatan industri ke badan sungai yang berakibat mencemari air sungai dan ekosistemnya. Sebagai implikasinya ada beberapa hal-hal yang dapat dilakukan dalam menjalankan peran serta melestarikan lingkungan hidup yakni sebagai berikut: (1). Hemat energi dengan cara menghemat penggunaan air dan listrik serta bahan bakar; (2). Memanfaatkan barang-barang yang masih dapat digunakan, mendaur ulang barang- barang bekas. (3). Tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan agar lingkungan bersih dan terhindar dari banjir lokal, dan menjaga kebersihan selokan/parit-parit.

Tugas

Berdasarkan kelompok tetap Saudara. Buatlah observasi di sekitar Saudara bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal mereka dengan pendudukannya. Datalah masalah-masalah penduduk dengan lingkungan hidup di sekitar tempat tersebut. Bacalah referensi lain untuk menjelaskan dan memberi rekomendasi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Buatlah hasil laporan singkat 3-5 halaman dan diskusikan di kelas. Buatlah kesimpulan hasil diskusi dengan tujuan utama apakah kesimpulan tiap kelompok dalam memberi rekomendasi sama atau berbeda. Kenapa terjadi kesamaan dan juga perbedaan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M. 1998. Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini. *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX 1998.

Abdullah. 2007. Keterkaitan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Dalam Meningkatkan Kualitas Kehidupan. *Jurnal Lingkungan Hidup*. 3 (2): 89-101.

Abdurrahman. 1978. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Alumni.

Abidin, Z. 2000. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.

Adioetomo dan Samosir. 2013. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.

Al Ghozali, I. 2005. *Menyingkap Rahasia Perkawinan*. Bandung: Kharisma.

Amin Summa, M. 2004. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Ananta, A. 1993. *Ciri Demografis Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Demografi.FEUI. Jakarta.

Azis Dahlan, A. 2007. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 1982. *Kumpulan Data Kependudukan Indonesia*. Jakarta: BKKBN Biro Data Kependudukan

Barclay, G. W. 1984. *Teknik Analisa Kependudukan*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Becker, G, S. 1995. *An Economic Analysis of Fertility*. California: Hoover Institution Press. Stanford University.

Bintarto, R. 1998. *Geografi Penduduk dan Demografi*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Boouman, P. J. 1957. *Ilmu Masyarakat Umum*. Jakarta: Dian Rakyat.

Boserup, E. 1981. *Population and Technological Change*. USA: The University of Chicago.

Bushar, M. 2007. *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Calvin, G. 1985. *Populasi, Modernisasi dan Struktur Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Chandra, B, 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: EDC.

Coale, A. J. dan Hoover, E. 1955. *Population Growth and Economic Development in Low Income Countries*.

New Jersey: Princeton University Press.

Daldjoeni, N. 1986. *Masalah Penduduk dalam Fakta dan Angka*. Solo: Tiga Serangkai.

Daldjoeni, N. 1987. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung: Alumni.

Davis, K. dan Blake, J. 1974. *Struktur Sosial dan Fertilitas (Social Structure and Fertility: an Analytical Framework)*. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan UGM.

Faqih, A. 2002. *Kependudukan: Teori, Fakta dan Masalah*. Yogyakarta: Depublish.

Harahap, Y. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

Hatmadji, S. H. 2004. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Hauser, P. M. 1964. *The Study of Population: An Inventory and Appraisal*. Chicago, USA: University of Chicago Press

Heer, D. M. 1985. *Masalah kependudukan di Negara Berkembang*. Jakarta : PT Bina Aksara Jakarta.

Hungu. 2007. *Demografi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Husin, A. 2010. Peranan Pendidikan Kependudukan Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup. Jurnal Lingkungan Hidup. 5 (2) : 12-19.

Indraswari, R. R. dan Yuhan R. J. 2017. Faktor-faktor yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data SDKI 2012. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 12 (1), 1-12.

Iskandar, N. 1974. *Beberapa Aspek Permasalahan Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.

Iskandar, N. 1977. *Demografi, Arti dan Tujuannya*. Jakarta: Lembaga Demografi FEUI.

Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 1990. Kependudukan dan Lingkungan Hidup: Suatu Tinjauan: Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup.

Lee, E. .S. 1995. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM. Yogyakarta

Lucas, D. dkk. 1990. *Pengantar Kependudukan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Jayanti, E. 2017. Hubungan Pertumbuhan Penduduk Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera.

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. 4 (2), 136-155.

Malthus, T. R. 2004. *An Essay on the Principle of Population*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mantra, I. B. 1985. *Pengantar Studi Demografi*. Nur Cahaya.Yogyakarta:

Mantra, I. B. 1991. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM.

Mantra, I. B. dan Kasto. 1984. *Analisis migrasi indonesia*. Yogyakarta: BPS.

Manuaba, I. B. 2008. *Gawat Darurat Obstetri Ginekolog & Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta : EDC.

Mulia, M. 2009. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation.

Munir, R. 1981. *Migrasi Dalam Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: FEUI.

Munir, R. 1985. *Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mustofa, B. 2008. *Kamus Kependudukan*. Jakarta: Panji Pustaka.

Nasikun. 2000. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramulyo, I. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Remi, S. S. 1997. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta.

Rochaida, E. 2016. Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Forum Ekonomi*. 18 (1), 14-24.

Said, R. 1983. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES.

Saleh, W. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sanderson, S. 2010. *Makro Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Shadily, H. 1997. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Pembangunan.

Siagian, S. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.

Siasah Masruri, M. dkk. 2002. *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: MKU UNY.

Singarimbun, M. 1996. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soekamto, S. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soegianto, A. 2010. *Ilmu Lingkungan: Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf (Online). Diakses pada tanggal 20 Oktober 12.

Soerjani, dkk, 1987. *Lingkungan: Sumber daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Soerjono, S. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renaka Cipta.

Sudiyat, I. 2011. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Pengantar Liberty.

Suparmoko. 2000. *Ekonomika Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.

Todaro, M. P. dan Smith, S. C 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

UNFPA. *Programme of Action - Adopted at the International Conference on Population and Development*, Cairo, 5-13 September 2004. New York: United Nations Population Fund. ISBN 0-89714-696-4

Utomo, B. 1985. *Mortalitas: Pengertian dan Contoh Kasus di Indonesia*. Fakultas Kesehatan Masyarakat UI: Jakarta.

Wood, S. N. dan Nisbet, R. M. 1990. *Estimation of Mortality Rates in Stage-Structured Population*. Berlin: Springer-Verlag.

BIODATA PENULIS

Dr. Agustina Bidarti, S.P., M.Si. Putri dari pasangan Abah bernama Almarhum Mayor (Pol.) Dalil Waris dan Mami bernama Nurhayati Yaman. Lahir di Palembang Sumatera Selatan tanggal 12 Agustus 1977. Menyelesaikan Pendidikan SDN 29 Palembang (1990), SMPN 43 Palembang (1993), SMAN 10 Palembang (1996).

Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya pada tahun 2000, S2 Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tahun 2012. Jenjang doktoral pada Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (2018). Menikah dengan Dedi Irwanto, Dosen FKIP Universitas Sriwijaya. Dikaruniai empat orang anak: Bhagawan Fitriradjasa Detin (2004); Poedjangga Sastraradjasa Detin (2007); Choennienk Chierrannaratoeaoera Detin (2008); dan Poetieh Chiennantieratoeaoera Detin (2012). Tinggal di Griya Tiga Putri CD-3 Jalan PDAM-Tirta Musi Kelurahan Bukit Lama Palembang. E-mail: agustinabidarti@unsri.ac.id

Ada begitu banyak buku-buku asing yang ditulis mengenai situasi dan kondisi negara-negara di luar Indonesia. Bagi pengajar maupun mahasiswa di Indonesia tentu saja contoh-contoh maupun analisis-analisis yang disajikan tersebut sering tidak cocok dalam penerapannya di Indonesia. Agar teori kependudukan ini berguna, sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia, dan memiliki hubungan yang selaras, maka diperlukan buku-buku pelajaran yang ditulis oleh pengajar sekaligus penulis-penulis di Indonesia. Buku "Teori Kependudukan" ini ditujukan untuk memberi sumbang saran atas pemecahan masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia sebagai "pengantar" untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa yang hendak memulai mempelajari Ilmu Kependudukan. Buku ini merupakan pengembangan dari modul yang telah penulis gunakan sebagai bahan ajar sejak tahun 2013 sehingga penulis mengganggap buku ini memadai digunakan sebagai bahan perkuliahan.

Dr. Agustina Bidarti, S.P., M.Si.
Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian di Universitas Sriwijaya pada tahun 2000, S2 Manajemen Agribisnis Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada tahun 2012. Jenjang doktoral pada Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (2018). Kini berprofesi sebagai dosen di Universitras Sriwijaya, Palembang.

Lindan Bestari

NONFIKSI

ISBN 978-623-94601-0-5

9 786239 460105

agustina bidarti

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

< 1%

★ Meily Ika Permata, Yanfitri Yanfitri, Andry Prasmuko. "FENOMENA LABOR SHIFTING DALAM PASAR TENAGA KERJA INDONESIA", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2010

Publication

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		